

2022



KANTOR GUBERNUR

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH



PANIRADYA KAISTIMEWAN DIY

Kepatihan, Danurejan, Yogyakarta

Telp. : (0274) 562811; Fax : (0274) 588613

Surel : paniradya.kaistimewan@jogjaprovo.go.id

Laman : paniradyakaistimewan.jogjaprovo.go.id

Kata Pengantar

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Paniradya Kaistimewan DIY Tahun 2022 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2022. LKjIP Paniradya Kaistimewan DIY Tahun 2022 merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi dan penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah. Penyusunan LKjIP Tahun 2022 diwarnai agenda *refocusing* dan realokasi anggaran untuk penanganan darurat serta dampak *pandemic* COVID-19. Sumber Daya yang dimiliki Pemerintah Daerah difokuskan untuk menjamin ketersediaan dukungan bidang Kesehatan, bantuan sosial dan upaya pemulihan ekonomi dari dampak *pandemic* COVID-19. Meskipun demikian, sebagai jajaran Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah DIY, Paniradya Kaistimewan DIY tetap mengupayakan optimalisasi capaian target kinerja sebagaimana tertuang dalam RPJMD DIY Tahun 2017-2022.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKjIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Yogyakarta, Februari 2023

PANIRADYA PATI,



ARIS EKO NUGROHO, SP., M.Si

NIP. 1972110111997031005

Ikhtisar Eksekutif



Capaian kinerja Paniradya Kaistimewan DIY tahun 2022 dalam mewujudkan sasaran strategis dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Capaian sasaran strategis 1 “Terfasilitasinya Kinerja Parampara Praja”:
 - Diukur dengan indikator meningkatnya kualitas pelayanan sekretariat kepada Parampara Praja dengan meta indikator skor indeks pelayanan dengan beberapa indikator (Bahan rekomendasi, fasilitas sarpras, fasilitas kegiatan).
 - Capaian indikator dimaksud didukung oleh kinerja 1 (satu) Program, yakni Program Peningkatan Pelayanan Parampara Praja.
 - Target capaian indikator sasaran tahun 2022 sebesar 78%; sampai dengan bulan Desember 2022 terealisasi sebesar 87,67%. Dengan demikian capaian ini telah melampaui target. Prosentase realisasi terhadap target (capaian dibagi target dikalikan 100%) mencapai 112,40%.
2. Capaian sasaran strategis 2 “Meningkatnya kualitas implementasi urusan keistimewaan”:
 - Diukur dengan rerata persentase capaian kinerja fisik dan keuangan program-program urusan keistimewaan (rerata jumlah capaian kinerja fisik + jumlah capaian keuangan program-program urusan keistimewaan bagi 2 dikali 100%).
 - Capaian indikator dimaksud didukung oleh kinerja 5 (lima) Program yaitu: Program Perencanaan dan Pengendalian Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Tata Cara, Program Perencanaan dan Pengendalian Keistimewaan Urusan Pertanahan dan Tata Ruang, Program Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan

Keistimewaan, Program Perencanaan dan Pengendalian Keistimewaan Urusan Kebudayaan, serta Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Keistimewaan.

- Target capaian indikator sasaran tahun 2022 sebesar 98,20%; sampai dengan akhir Bulan Desember 2022 terealisasi 98,11%. Prosentase realisasi terhadap target (capaian dibagi target dikalikan 100%) mencapai 100%.
3. Capaian sasaran strategis 3 “Terwujudnya kelembagaan perangkat daerah yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah”:
- Diukur dengan indikator persentase kelembagaan yang efektif dan efisien (Jumlah kelembagaan yang efektif dibagi Jumlah kelembagaan dikali 100%).
 - Capaian indikator dimaksud didukung oleh kinerja 3 (tiga) Program, yakni Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan, Program Peningkatan Budaya Pemerintahan dan Program Peningkatan Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi.
 - Target capaian indikator sasaran tahun 2022 sebesar 83 %; sampai dengan bulan Desember 2022 terealisasi 94,30 %. Dengan demikian capaian ini telah melampaui target. Prosentase realisasi terhadap target (capaian dibagi target dikalikan 100%) mencapai 113,6%.
 - Dibandingkan dengan capaian target tahun 2021 sebesar 84,8% terjadi peningkatan sebesar 9,5%.

Terhadap capaian kinerja sebagaimana tersebut di atas terdapat beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Paniradya Kaistimewan DIY ke depan, sebagai berikut:

1. Implementasi *Performance Based Organization* terus memerlukan pendampingan dan evaluasi, termasuk merespon kebijakan Pemerintah Pusat yang berkaitan dengan penyederhanaan birokrasi;

2. Era revolusi industri 4.0 dan era society 5.0 serta kebijakan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) yang ditandai dengan disrupsi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di segala bidang, *internet of thing*, *artificial intelegent*, dan era *big data* yang melingkupi semua bidang kehidupan, termasuk dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.
3. Berakhirnya *Road Map* Reformasi Birokrasi Nasional periode 2015 – 2019 menuju diberlakukannya *Road Map* Reformasi Birokrasi Nasional periode 2020 – 2024.

Daftar Isi

Kata Pengantar	1
Ikhtisar Eksekutif	2
Daftar Isi	5
Daftar Tabel	6
Daftar Gambar	7
BAB I Pendahuluan	8
1.1 Cascading Kinerja sebagai Dasar Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah	8
1.2 Mandat Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi	10
1.3 Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan	11
1.4 Isu-Isu Strategis	13
1.5 Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran	14
1.6 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2021	19
BAB 2 Perencanaan dan Perjanjian Kinerja	Error! Bookmark not defined.
2.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD	21
2.2 Strategi dan Arah Kebijakan	21
2.3 Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2022	22
2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2022	26
2.5 Instrumen Pendukung Capaian Kinerja	29
BAB 3 Akuntabilitas Kinerja	31
3.1 Capaian Kinerja Tahun 2022	31
3.2 Realisasi Anggaran	67
3.3 Inovasi	68
BAB 4 Penutup	122
L A M P I R A N	1229

Daftar Tabel

Tabel I.1 Jumlah Pegawai Menurut Kualifikas Jabatan, Jenis Kelamin dan Kompetensi.....	13
Tabel I.2 Sarana-Prasarana.....	14
Tabel I.3 Perbandingan Anggaran Tahun 2021 dan 2022.....	15
Tabel II.1 Sasaran Strategis Paniradya Kaistimewan DIY, 2017-2022.....	17
Tabel II.2 Strategi dan Arah Kebijakan.....	17
Tabel II.3.1 Struktur Program dan Kegiatan terkait Langsung Pencapaian Sasaran Tahun 2022.....	18
Tabel II.3.2 Struktur Program dan Kegiatan Pendukung Pencapaian Sasaran Tahun 2022	20
Tabel II.4 Perjanjian Kinerja Kepala Paniradya Kaistimewan DIY Tahun 2022.....	21
Tabel III.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja.....	23
Tabel III.2 Capaian Kinerja Tahun 2020.....	23
Tabel III.3 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan.....	24
Tabel III.4 Pengukuran Capaian Sasaran 1.....	26
Tabel III.5 Target dan Realisasi Kinerja.....	27
Tabel III.6 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan.....	28
Tabel III.7 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022.....	29
Tabel III.8 Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung per Sasaran Tahun 2022.....	30

Daftar Gambar

Gambar I.1. Cascading Kinerja.....	9
Gambar I.2. Mandat Kinerja Peta Proses Bisnis dan Struktur Paniradya Kaistimewan DIY Setda DIY	10
Gambar I.3. Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan pada Organisasi Paniradya Kaistimewan DIY Setda DIY.....	11
Gambar II.1. Sistem Integrasi ROPK,Monitoring dan Evaluasi, E-SAKIP.....	22

BAB I

Pendahuluan

Bab I berisi:

1. *Cascading Kinerja*
2. *Mandat Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi*
3. *Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan*
4. *Isu-Isu Strategis*
5. *Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran*
6. *Tindak Lanjut atas Rekomendasi LHE SAKIP Tahun 2021*

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk pertanggung-jawaban setiap instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah yang menyusun Perjanjian Kinerja, atas penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD dan/atau APBN. Dasar hukum penyusunan meliputi:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 94 Tahun 2016 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Adapun tujuan penyusunan LKjIP sebagai berikut:

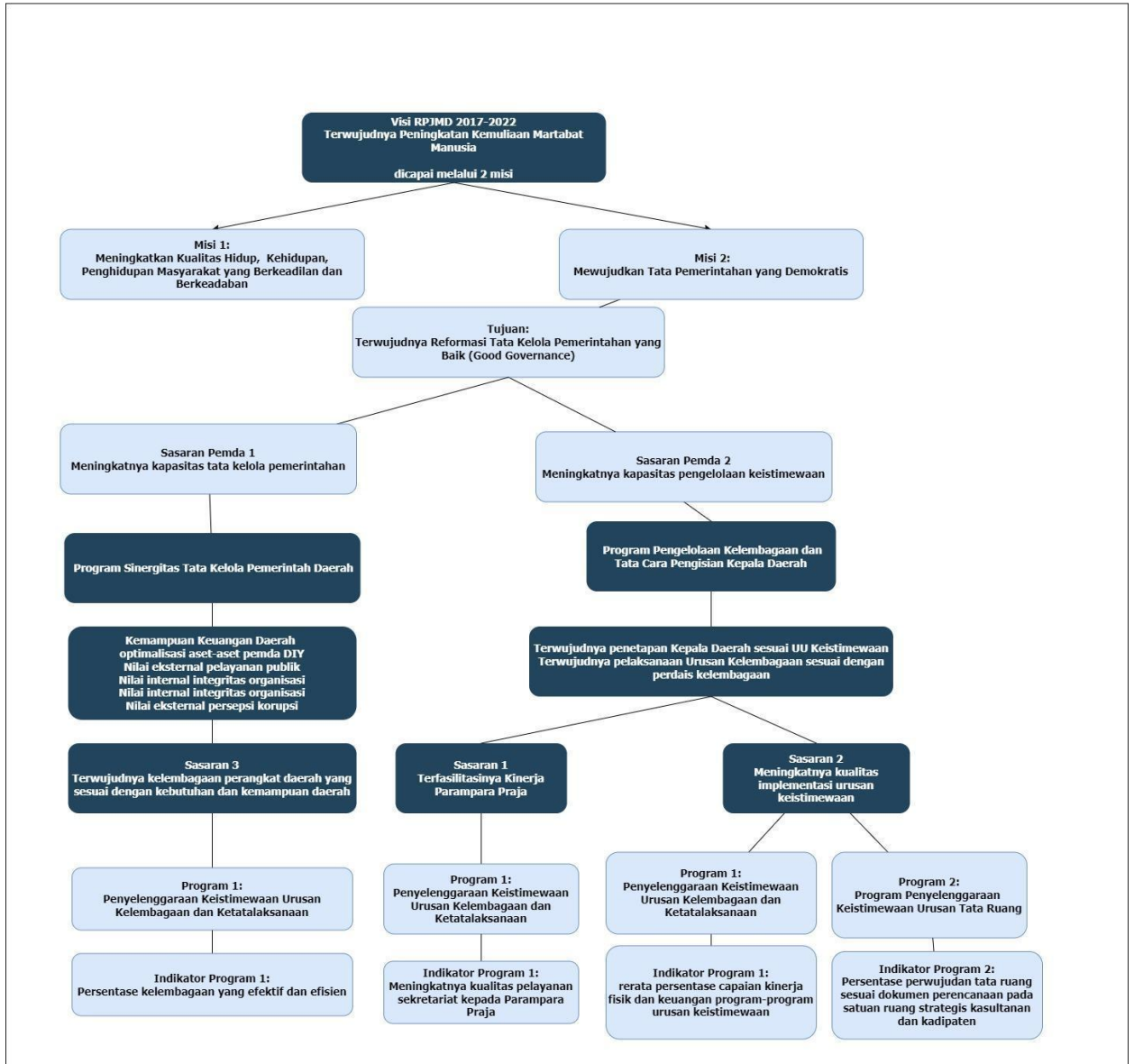
1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja instansi.

1.1 *Cascading* Kinerja sebagai Dasar Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah

Selaras dengan paradigma Organisasi Berbasis Kinerja (*Performance Based Organization*) yang diterapkan Pemerintah Daerah DIY, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dibentuk untuk memberikan kontribusi pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah DIY

tahun 2017 – 2022. Paniradya Kaistimewan DIY dibentuk dengan skema kinerja sebagai berikut:

Gambar I.1 *Cascading Kinerja*

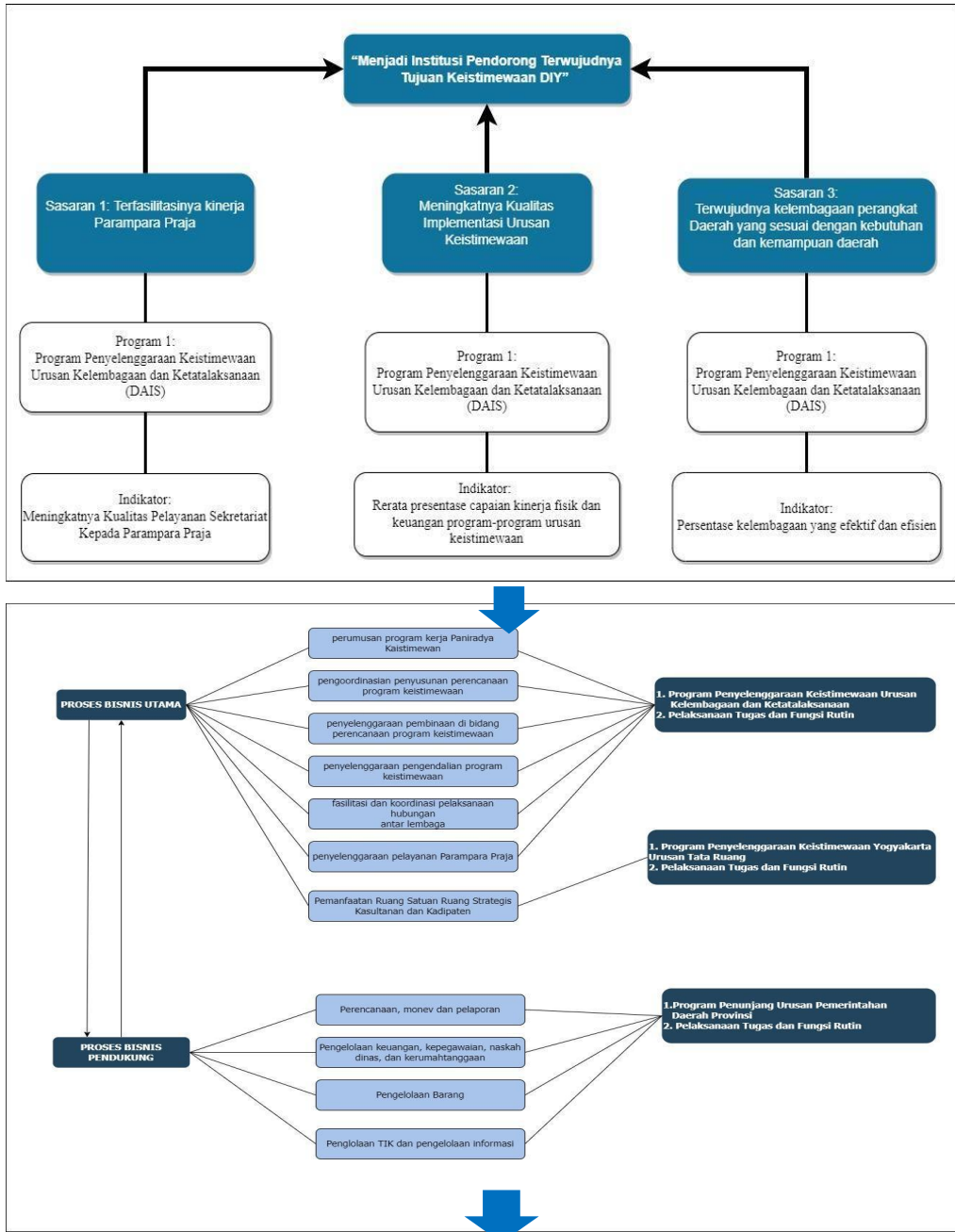


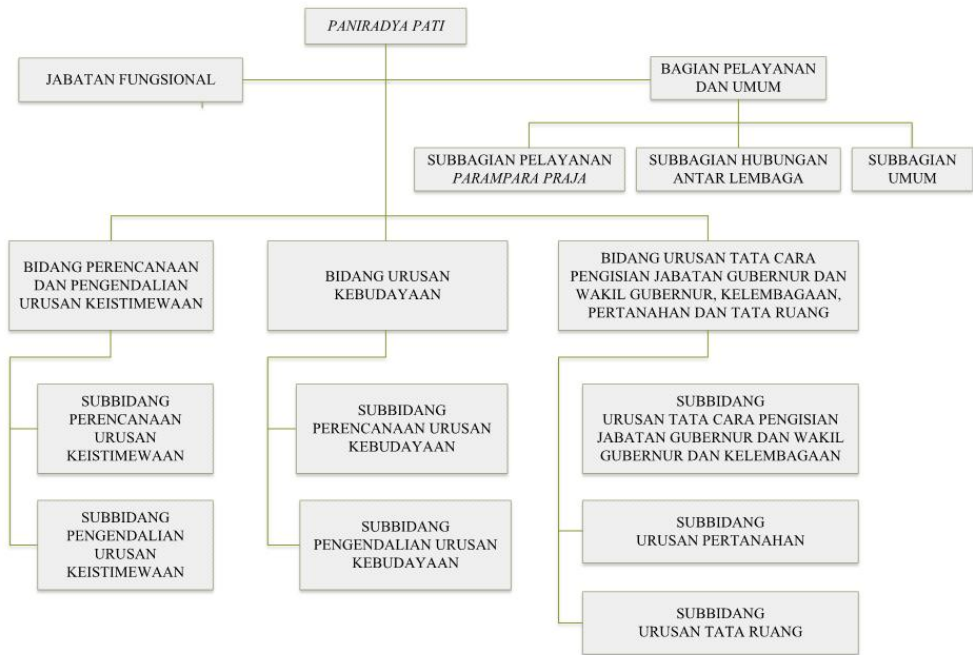
Sumber: Renstra Paniradya Kaistimewan DIY 2017-2022

1.2 Mandat Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi

Hubungan antara mandat kinerja, peta proses bisnis dan desain struktur organisasi Paniradya Kaistimewan DIY sebagaimana tersaji dalam gambar berikut:

Gambar 1.2 Mandat Kinerja Peta Proses Bisnis dan Struktur Paniradya Kaistimewan DIY





Sumber: *Perdais DIY No. 1 Th. 2018 dan Pergub DIY No. 20 Th. 2020; SK Proses Bisnis 2021*

1.3 Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan

Dalam upaya mewujudkan kinerja sebagaimana telah dimandatkan dalam RPJMD, Paniradya Kaistimewan DIY memiliki tugas dan fungsi yang kemudian menjadi dasar penempatan personil dalam jabatan sebagaimana gambar berikut:

Gambar I.3. Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan pada Organisasi Paniradya Kaistimewan DIY

Berdasarkan Peraturan Gubernur DIY Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Paniradya Kaistimewan, *Paniradya Kaistimewan* DIY mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah dalam penyusunan kebijakan urusan keistimewaan, perencanaan, dan pengendalian urusan keistimewaan serta pengoordinasian administrasi urusan keistimewaan. Untuk melaksanakan tugas tersebut *Paniradya Kaistimewan* DIY mempunyai fungsi:

- n program kerja *Paniradya Kaistimewan*;
- pengordinasian penyusunan kebijakan urusan Keistimewaan
- pengkoordinasian penyusunan perencanaan program keistimewaan;
- penyelenggaraan pembinaan di bidang perencanaan program keistimewaan;
- penyelenggaraan pengendalian program keistimewaan;

penyelenggaraan kegiatan kesekretariatan;
 fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan hubungan antar lembaga;
 penyelenggaraan pelayanan *Parampara Praja*;
 penyusunan laporan pelaksanaan tugas *Paniradya Kaistimewan*; dan
 pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsi *Paniradya Kaistimewan*.

Sesuai Pelaksanaan tugas fungsi *Paniradya Kaistimewan* dibagi habis ke dalam jabatan struktural dan jabatan pelaksana berdasarkan Peraturan Gubernur DIY Nomor 15 tahun 2021 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Pergub 48 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Kualifikasi Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan komposisi sebagai berikut:

Jabatan Struktural	Jabatan Pelaksana
<i>Paniradya Pati</i> Kabag Pelayanan dan Umum: Kasubbag Pelayanan Parampara Praja; Kasubbag Hubungan Antar Lembaga; Kasubbag Umum. Kabid Perencana dan Pengendalian Keistimewaan; Kasubid Perencanaan Urusan Keistimewaan; Kasubid Pengendalian Urusan Keistimewaan; Kabid Kebudayaan: Kasubid Perencanaan Urusan Kebudayaan; Kasubid Perencanaan Urusan Keuayaan; Kabid Urusan Tata Cara, Pengisian Jabatan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Kelembagaan, Pertanahan Dan Tata Ruang Kasubid Urusan Tata Cara Pengisian Jabatan Gubernur Dan Wakil Gubernur dan Kelembagaan; Kasubid Urusan Pertanahan; Kasubid Urusan Tata Ruang.	Dibawah Kasubbag Pelayanan Parampara Praja: Pranata Tatapraja Dibawah Kasubbag Hubungan Antar Lembaga: Pengadministrasi Umum Analisis Hubungan Antar Lembaga Pengelola Sistem dan Jaringan Dibawah Kasubbag Umum Pengadministrasi Persuratan; Pranata Kearsipan; Penyusunan Program Anggaran dan Pelaporan; Pengadministrasi Kepegawaian; Pengelola Barang Milik Negara; Bendahara; Pengadministrasi Keuangan; Pengelola Gaji; Pengelola Akuntansi; Verifikator Data Laporan Keuangan; Pengemudi Dibawah Kasubid Perencanaan: Pengadministrasi Umum Analisis Perencanaan Dibawah Kasubid Pengendalian: Pengevaluasi Program dan Kinerja Dibawah Kasubid Kebudayaan: Pengadministrasi Umum Analisis Perencanaan Dibawah Kasubid Kelembagaan: Pengadministrasi Umum Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Di bawah Kasubid Pertanahan: Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Di bawah Kasubid Tata Ruang: Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

1.4 Isu-Isu Strategis

Eksistensi sebuah institusi bergantung sejauh mana institusi tersebut mampu menemukan dan merespon isu strategis dengan berbagai kebijakan dan tindakan yang tepat. Secara umum isu strategis dapat bersumber dari lingkungan eksternal maupun lingkungan internal. Isu-isu strategis yang melingkupi Paniradya Kaistimewan DIY sebagai bagian dari Perangkat Daerah yang memiliki tujuan "menjadi institusi pendorong terwujudnya tujuan keistimewaan DIY", antara lain sebagai berikut:

1. Optimalisasi perencanaan, koordinasi dan pembinaan, serta monitoring dan evaluasi urusan keistimewaan

Dalam rangka pelayanan kepada pimpinan serta pelaksanaan program dan kegiatan, Paniradya Kaistimewan DIY dituntut untuk mampu menciptakan sinergitas kebijakan antar pemangku kepentingan sekaligus melakukan pembinaan, serta monitoring dan evaluasi urusan keistimewaan.

2. Mengawal implementasi urusan keistimewaan

Sesuai tugas pokok dan fungsinya, Paniradya Kaistimewan DIY mempunyai peranan penting dalam mengawal implementasi lima urusan keistimewaan sebagaimana tercantum dalam UU No. 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, yang diatur secara khusus di dalam Peraturan Daerah Istimewa (Perdais).

3. Tahun 2022 sebagai tahapan penguatan sosial ekonomi sebagai dampak Pandemi
4. Wabah Covid-19 dinyatakan sebagai Pandemi oleh WHO tanggal 11 Maret 2020. Jumlah orang yang terpapar virus semakin bertambah tiap harinya, termasuk di Indonesia. Sejak itu pula kondisi ekonomi dan sosial Indonesia terus melemah. Demi mencegah penyebaran virus

maka diberlakukan *lockdown*, *social distancing*, dan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Hal tersebut menyebabkan aktivitas perekonomian dan interaksi sosial antar individu terganggu. Akibat Pandemi ini banyak masyarakat kehilangan pekerjaan, dirumahkan, dan upah yang diturunkan sehingga tingkat kemiskinan semakin meningkat. Pemerintah dituntut untuk melakukan berbagai cara dalam memulihkan perekonomian dan sosial yang sempat terpuruk, termasuk dengan memanfaatkan dana keistimewaan.

1.5 Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran

Dukungan sumber daya manusia, sarana-prasarana dan anggaran pada tahun 2022 sebagaimana tabel berikut:

Tabel I.1 Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Jabatan, Jenis Kelamin dan Kompetensi

No	Jabatan	Formasi		Pegawai yang ada		Jenis Kelamin	
		Jml	Kualifikasi	Jml	Kualifikasi	Laki	Peremp
1	2	3	4	5	6	7	8
A. Jabatan Struktural							
1.	Paniradya Pati	1	S2, S1	1	S2	√	-
2.	Kabag Pelayanan dan Umum	1	S2, S1	1	S1	-	√
3.	Kabid Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan	1	S2, S1	1	S2	√	-
4.	Kabid Kebudayaan	1	S2, S1	1	S2	√	-
5.	Kabid Urusan Tata Cara Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Kelembagaan, Pertanahan dan Tata Ruang	1	S2, S1	1	S2	√	-
6.	Kasubag Pelayanan Parampara Praja	1	S1	1	S1	√	-
7.	Kasubag Hubungan Antar Lembaga	1	S1	1	S2	-	√
8.	Kasubag Umum	1	S1	1	S2	√	-

No	Jabatan	Formasi		Pegawai yang ada		Jenis Kelamin	
		Jml	Kualifikasi	Jml	Kualifikasi	Laki	Peremp
1	2	3	4	5	6	7	8
9.	Kasubid Perencanaan Urusan Keistimewaan	1	S1	1	S2	-	√
10.	Kasubid Pengendalian Urusan Keistimewaan	1	S1, D4	1	S2	-	√
11.	Kasubid Perencanaan Kebudayaan	1	S1	1	S1	-	√
12.	Kasubid Pengendalian Kebudayaan	1	S1	1	S1	-	√
13.	Kasubid Urusan Tata Cara Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Kelembagaan	1	S1	1	S2	-	√
14.	Kasubid Urusan Pertanahan	1	S1	1	S2	√	-
15.	Kasubid Urusan Tata Ruang	1	S1	1	S2	√	-
B.Jabatan Fungsional Tertentu							
16.	Perencana Ahli	6	S1	-	-	-	-
17.	Perencana Madya	-	-	1	S1	√	-
18.	Perencana Pertama	-	-	1	S2	-	√
				1	S1	√	-
19.	Calon Perencana Pertama	-	-	1	S1	√	-
20.	Calon Arsiparis Pertama	-	-	1	D4	-	√
C.Jabatan Pelaksana Substantif							
21.	Pranata Tatapraja	2	D3	-	-	-	-
22.	Analisis Hubungan Antar Lembaga	2	S1	1	D4	√	-
23.	Analisis Perencanaan	4	S1	1	S1	-	√
				1	S1	√	-
24.	Pengevaluasi Program dan Kinerja	4	S1	1	S1	-	√
				1	S1	√	-
25.	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	6	S1	1	S1	-	√
D.Jabatan Pelaksana Pendukung/ Administratif							
26.	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	2	S1	1	S2	-	√
				1	S1	-	√
27.	Bendahara	1	S1	1	S1	-	√

No	Jabatan	Formasi		Pegawai yang ada		Jenis Kelamin	
		Jml	Kualifikasi	Jml	Kualifikasi	Laki	Peremp
1	2	3	4	5	6	7	8
28.	Verifikator Data Laporan Keuangan	1	D3	-	-	-	-
29.	Pengelola Akuntansi	1	D3	-	-	-	-
30.	Pengelola Barang Milik Negara	2	D3	1	STM, SMA	√	-
31.	Pengelola Gaji	1	D3	-	-	-	-
32.	Pengadministrasi Keuangan	3	D3	1	D3	-	√
33.	Pengadministrasi Kepegawaian	1	D3	-	-	-	-
34.	Pengadministrasi Umum	4	D3	2	S1/SLTA	√	-
35.	Pengadministrasi Persuratan	1	D3	1	SMEA	-	√
36.	Pranata Kearsipan	1	D3	1	D3	-	√
37.	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur	1	S1	1	S1	-	√
38.	CPNS	-	-	1	S1	√	-
	Jumlah	59		37		17	20

Sumber: Data Kepegawaian Paniradya Kaistimewan Desember 2022

Berdasarkan data pada tabel I.1, tingkat pendidikan SDM Paniradya Kaistimewan DIY relatif tinggi untuk jenjang struktural namun relatif rendah untuk jabatan pelaksana pendukung/administratif, didominasi oleh jenjang pendidikan S1 sebanyak 17 orang (45,95%), disusul oleh jenjang pendidikan S2 sebanyak 13 orang (35,13%), SLTA/SMEA/SMA 3 orang (8,10%), D4 2 orang (5,41%), D3 2 orang (5,41%). Walaupun komposisi pegawai perempuan lebih sedikit dibanding pegawai laki-laki, untuk jenjang jabatan struktural dijabat berimbang yaitu 7 laki-laki dan 8 perempuan. Hal ini menunjukkan adanya sistem merit dan kesetaraan gender dalam manajemen SDM aparatur.

Masih terdapat kekurangan pegawai sebanyak 23 orang (tidak memperhitungkan CPNS), terdiri dari 12 orang jabatan pelaksana substantif, 1 orang perencana (JFT) dan 10 jabatan pelaksana pendukung/administratif. Terdapat 5 orang pegawai yang tidak memenuhi kualifikasi pada jabatan pelaksana pendukung/administratif dan 1 orang pegawai Arsiparis (JFT). Unit kerja eselon IV pada bidang rata-rata hanya memiliki 1 staf. Kondisi yang tidak ideal ini jika disandingkan dengan tuntutan pekerjaan *Paniradya Kaistimewan* DIY yang tentunya akan mempengaruhi kinerja penyusunan kebijakan urusan

keistimewaan, perencanaan, dan pengendalian urusan keistimewaan serta pengoordinasian administrasi urusan keistimewaan.

Tabel I.2 Sarana-Prasarana

No	Klasifikasi	Jumlah Barang	Nilai Aset (Rp)*
01.3	Aset Tetap	1629 unit	11.383.820.891,92
01.3.02	Peralatan dan Mesin	1320 unit	9.167.539.991,96
01.3.02.02	Alat Angkutan	19 unit	2.889.522.626,00
01.3.02.03	Alat Bengkel dan Alat Ukur	1 unit	533.500,00
01.3.02.05	Alat Kantor dan Rumah Tangga	984 unit	3.146.267.945,97
01.3.02.06	Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	85 unit	864.373.035,99
	Alat Kedokteran Dan Kesehatan		
01.3.02.07	Alat Laboratorium	1 unit	2.875.000,00
01.3.02.08	Komputer	8 unit	23.754.500,00
01.3.02.10		222 unit	2.240.213.384,00
	Gedung dan Bangunan		
01.3.03	Bangunan Gedung	4 unit	6.530.435.706,00
01.3.03.01		4 unit	6.530.435.706,00
	Aset Tetap Lainnya		
01.3.05	Bahan Perpustakaan	304 unit	223.891.200,00
01.3.05.01	Barang Bercorak	296 unit	35.104.200,00
01.3.05.02	Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	9 unit	188.787.000,00

Sumber: Buku Inventaris Aset *Paniradya Kaistimewan* 2022

*Nilai aset belum memperhitungkan penyusutan di tahun 2022

Kendaraan *Paniradya Kaistimewan* DIY terdiri atas Kendaraan Dinas Jabatan sebanyak 1 unit Kendaraan Dinas Operasional sebanyak 19 unit yang terdiri dari Kendaraan Bermotor Roda Empat (9 unit), Kendaraan Bermotor Beroda Dua (7 unit), Kendaraan Tak Bermotor Berpenumpang dinas (3 unit). Kebutuhan ruangan kantor umum sudah tersedia meliputi ruang rapat, ruang mushola, ruang baca, ruang gudang, ruang tunggu, ruang laktasi, dan toilet beserta dengan fasilitasnya. Adapun alat kantor dan rumah tangga kantor berupa meja, kursi, lemari, filling cabinet, pendingin ruangan, alat pemadam kebakaran dan lain-lain sudah tersedia dalam kondisi baik. Rasio personal computer/laptop dibanding jumlah pegawai sudah mendekati 1 : 1. Namun, sebagian komputer saat ini dalam keadaan rusak/ tidak bekerja secara optimal, sehingga tahun 2023 akan dilakukan penghapusan untuk unit-unit yang sudah tidak bisa diperbaiki lagi.

Tabel I.3 Anggaran Tahun 2022

Sumber data: Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Paniradya Kaistimewan DIY Tahun 2022

Kode Rekening			Uraian	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
4			PENDAPATAN DAERAH			
4	1		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0
4	1	02	Retribusi Daerah	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0
			Jumlah Pendapatan	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0
5			BELANJA DAERAH			
5	1		BELANJA OPERASI	Rp23.529.605.772	Rp24.814.838.758	Rp1.285.232.986,00
5	1	01	Belanja Pegawai	Rp6.917.447.022	Rp6.519.409.756	(Rp398.037.266,00)
5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	Rp16.612.158.750	Rp18.295.429.002	Rp1.683.270.252,00
5	1	05	Belanja Hibah	Rp. 0	Rp. 0	
5	2		BELANJA MODAL	Rp2.400.336.000	Rp2.605.723.522	Rp205.387.522,00
5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp1.769.324.000	Rp2.082.287.522	Rp312.963.522,00
5	2	03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp. 330.676.000	Rp. 279.000.000	(Rp51.676.000,00)
5	2	05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Rp300.336.000	Rp244.436.000	(Rp55.900.000,00)
			Jumlah Belanja	Rp23.529.605.772	Rp24.814.838.758	Rp1.285.232.986,00
			Total Surplus/(Defisit)	(Rp23.529.605.772)	(Rp24.814.838.758)	(Rp1.285.232.986,00)
6			PEMBIAYAAN DAERAH			
			Jumlah Penerimaan Pembiayaan	Rp0	Rp0	Rp0
			Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	Rp0	Rp0	Rp0
			Pembiayaan Neto	Rp0	Rp0	Rp0

Dukungan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi *Paniradya Kaistimewan* berasal dari APBD Daerah Istimewa Yogyakarta dan Dana Keistimewaan. Terlihat pada tabel I.3, untuk tahun 2022 Anggaran *Paniradya Kaistimewan* semula Rp23.529.605.772 dan mengalami perubahan menjadi Rp24.814.838.758 atau bertambah Rp 1.285.232.986,00. Perubahan anggaran Tahun 2022 merupakan cerminan dukungan Paniradya Kaistimewan DIY dalam

bentuk *Refocusing* dan realokasi anggaran. *Refocusing* dan realokasi anggaran dilakukan sebagai bentuk konsolidasi fiskal menjamin ketersediaan dukungan bidang kesehatan, bantuan sosial dan upaya pemulihan ekonomi dari dampak *pandemic* COVID-19.

1.6 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2021

No	REKOMENDASI LHE SAKIP (Surat Inspektur DIY Nomor 700/01191 tanggal 21 Maret 2022)	TINDAK LANJUT
1.	melakukan upaya perbaikan manajemen kinerja dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan akuntabilitas kinerja OPD dengan penekanan perbaikan pada Komponen Evaluasi Internal	1. Mengintensifkan monev berkala (capaian kinerja program/ kegiatan) realisasi fisik maupun keuangan) berdasarkan prinsip efisiensi dan efektifitas. 2. Peningkatan kualitas perencanaan, pengukuran, evaluasi internal dan data capaian kinerja.

BAB 2

Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

Bab 2 Berisi :

1. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD
2. Strategi dan Arah Kebijakan
3. Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2022
4. Perjanjian Kinerja Tahun 2022
5. Instrumen Pendukung Capaian Kinerja OPD

Perencanaan dan penganggaran pada tahun 2022 diwarnai agenda *refocusing* dan realokasi anggaran untuk penanganan darurat serta dampak *pandemic* COVID-19. Hal ini membawa dampak pada perumusan Perjanjian Kinerja perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah DIY melalui reviu/perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2022.

Refocusing dan realokasi anggaran dilakukan sebagai bentuk konsolidasi fiskal menjamin ketersediaan dukungan bidang kesehatan, bantuan sosial dan upaya pemulihan ekonomi dari dampak *pandemic* COVID-19. Meskipun demikian, sebagai jajaran Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah DIY, *Paniradya Kaistimewan* tetap mengupayakan optimalisasi capaian target kinerja sebagaimana tertuang dalam RPJMD DIY Tahun 2017-2022.

Renstra *Paniradya Kaistimewaan* DIY yang merupakan penjabaran operasional RPJMD 2017 - 2022 telah mengakomodasi dinamika program/kegiatan selama kurun waktu 2017 – 2022. Renstra ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 20 Tahun 2018 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017–2022 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 42 Tahun 2022 tentang Perubahan kelima atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 20 Tahun 2018 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017–2022.

2.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD

Sesuai *cascade* kinerja, *Paniradya Kaistimewan* mendukung pencapaian sasaran Pemerintah Daerah meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan yang didukung oleh program sinergitas tata kelola pemerintahan. Terkait hal tersebut tujuan jangka menengah *Paniradya Kaistimewan* selama lima tahun adalah:

“Menjadi Institusi Pendorong Terwujudnya Tujuan Keistimewaan DIY”

Adapun sasaran *Paniradya Kaistimewan* dalam waktu lima tahun sebagai berikut:

Tabel II.1 Sasaran Strategis Paniradya Kaistimewan DIY, 2017-2022

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Baseline 2017	TARGET TAHUNAN					Target Akhir Renstra
					2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Terfasilitasinya Kinerja Parampara Praja	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Sekretariat Kepada Parampara Praja	%	N/A	70	72	74	76	78	78
2.	Meningkatnya Kualitas Implementasi Urusan Keistimewaan	Rerata presentase capaian kinerja fisik dan keuangan program-program urusan keistimewaan	%	97,7	97,8	97,9	98	98,1	98,2	98,2
3.	Terwujudnya kelembagaan perangkat daerah yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah	Persentase kelembagaan yang efektif dan efisien	%	78	79	79.7	80.5	81.5	83	83

2.2 Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah, diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel II.2 Strategi dan Arah Kebijakan

NO.	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1.	Terfasilitasinya kinerja Parampara Praja	Peningkatan Pelayanan Parampara Praja	Peningkatan Pelayanan Parampara Praja
2.	Meningkatnya kualitas implementasi urusan istimewa	Peningkatan kualitas program keistimewaan	Penyusunan kebijakan umum urusan keistimewaan; Pengoordinasian perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan
3.	Terwujudnya kelembagaan perangkat daerah yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah	Peningkatan kinerja kelembagaan perangkat daerah pengampu keistimewaan	Peningkatan hubungan dengan semua pemangku kepentingan

2.3 Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2022

Struktur program dan kegiatan yang berkaitan langsung dengan tercapainya sasaran Paniradya Kaistimewaan DIY tahun 2022 maupun program dan kegiatan pendukung sebagaimana tabel berikut:

Tabel II.3.1. Struktur Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan terkait Langsung Pencapaian Sasaran Tahun 2022

Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
1. Terfasilitasinya Kinerja Parampara Praja	1.1	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan			
	1.1.1	Peningkatan Pelayanan Parampara Praja	1.422.000.000	711.936.000	(710.064.000)
	1.1.1.1	Penyusunan Rekomendasi Urusan Keistimewaan	1.422.000.000	711.936.000	(710.064.000)
	Total Nilai Anggaran yang mendukung Sasaran 1		1.422.000.000	711.936.000	(710.064.000)
2.	2.1	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan			

Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
Meningkatnya kualitas implementasi urusan keistimewaan	2.1.1	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	4.178.293.000	4.705.713.322	527.420.322
	2.1.1.1	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	2.044.549.000	2.571.969.322	527.420.322
	2.1.1.2	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan	2.133.744.000	2.133.744.000	0
	2.1.2	Perencanaan Dan Pengendalian Keistimewaan Urusan Kelembagaan Dan Tata Cara	882.539.700	1.117.320.500	234.780.800
	2.1.2.1	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Tata Cara	480.313.000	729.185.000	248.872.000
	2.1.2.2	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Tata Cara	402.226.700	388.135.500	(14.091.200)
	2.1.3	Perencanaan Dan Pengendalian Keistimewaan Urusan Kebudayaan	820.628.000	1.182.807.880	362.179.880
	2.1.3.1	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Kebudayaan	438.584.000	802.550.000	363.966.000
	2.1.3.2	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	382.044.000	380.257.880	(1.786.120)
	2.1.4	Perencanaan Dan Pengendalian Keistimewaan Urusan Pertanahan Dan Tata Ruang	1.921.913.000	1.728.361.000	(193.552.000)
	2.1.4.1	Koordinasi Penyusunan	1.047.167.000	994.452.000	(52.715.000)

Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
		Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Pertanahan dan Tata Ruang			
	2.1.4.2	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Pertanahan dan Tata Ruang	874.746.000	733.909.000	(140.837.000)
	2.1.5	Sarana dan Prasarana Keistimewaan Urusan Kelembagaan	2.400.000.000	3.087.892.772	(3.529.100)
	2.1.5.1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Lembaga Pelaksana Urusan Keistimewaan	2.400.000.000	2.241.972.400	(3.529.100)
	Total Nilai Anggaran yang mendukung Sasaran 2		10.203.373.700	11.822.095.474	906.785.774
3. Terwujudnya kelembagaan perangkat daerah yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah	3.1	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan			
	3.1.1	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Keistimewaan	6.950.000.000	7.930.000.000	980.000.000
	3.1.1.1	Pembinaan Kelembagaan Pelaksana Keistimewaan	6.950.000.000	7.930.000.000	980.000.000
	Total Nilai Anggaran yang mendukung Sasaran 3		6.950.000.000	7.930.000.000	980.000.000

Sumber: Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Paniradya Kaistimewan DIY Tahun 2022

Tabel II.3.2. Struktur Program dan Kegiatan Pendukung Pencapaian Sasaran Tahun 2022

No.	Program/Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
1	2	3	4	5
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	7.354.568.0726	6.956.530.806	-398.037.266
	1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16.670.000	16.670.000	0

No.	Program/Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
	1.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.302.500	7.302.5000	0
	1.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	6.337.500	6.337.500	
	1.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.030.000	3.030.000	0
	2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.913.112.022	6.515.074.756	-398.037.266
	2.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.871.427.022	6.473.389.756	-398.037.266
	2.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	36.420.000	36.420.000	0
	2.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.300.000	1.300.000	0
	2.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3.965.000	3.965.000	0
	3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	9.600.000	9.600.000	0
	3.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	9.600.000	9.600.000	0
	6. Administrasi Umum Perangkat Daerah	179.717.25	179.717.25	0
	6.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.374.000	3.374.0000	0
	6.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	13.288.0000	13.288.000	0
	6.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	6.170.000	6.170.000	0
	6.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	17.111.250	17.111.250	0
	6.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	9.420.000	9.420.000	0
	6.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	130.354.0000	130.354.000	0
	8. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	10.000.000	10.000.000	0

No.	Program/Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
	8.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	10.000.000	10.000.000	0
	9. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	225.468.800	225.468.8000	0
	9.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	34.800.500	34.800.500	0
	9.02 Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	177.368.300	177.368.300	0
	9.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	13.300.000	13.300.000	

Sumber: Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Paniradya Kaistimewan DIY Tahun 2022

2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kerjanya. Adapun Perjanjian Kinerja Kepala Paniradya Kaistimewan DIY yang merepresentasikan kinerja instansi dengan Bapak Gubernur DIY sebagai berikut:

Tabel II.4 Perjanjian Kinerja Kepala Paniradya Kaistimewan DIY Tahun 2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
1.	Terfasilitasinya Kinerja Paramparapelayanan sekretariat Praja kepada Parampara Praja	meningkatkan kualitas pelayanan sekretariat kepada Parampara Praja	%	78	Triwulan I	78
					Triwulan II	78
					Triwulan III	78
					Triwulan IV	78*)
2.	Meningkatnya kualitas implementasi urusan keistimewaan	rerata persentase capaian kinerja fisik dan keuangan program-program urusan keistimewaan	%	98.2	Triwulan I	98.2
					Triwulan II	98.2
					Triwulan III	98.2
					Triwulan IV	98.2*)
3.	Terwujudnya	persentase kelembagaan	%	83	Triwulan I	83

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
	kelembagaan perangkat daerah yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah	yang efektif dan efisien			Triwulan II	83
					Triwulan III	83
					Triwulan IV	83*)

Untuk mencapai Sasaran Strategis sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:

No	Program RPJMD	Penyandingan Program Permendagri 90 Tahun 2019 dan Pemutakhirannya	Anggaran
1	Program Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan (DAIS)	Rp. 18.575.373.700,-
2	Program Peningkatan Pelayanan Parampara Praja		
3	Program Sarana dan prasarana Keistimewaan Urusan Kelembagaan		
4	Program Perencanaan dan Pengendalian Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Tata Cara;		
5	Program Perencanaan dan Pengendalian Keistimewaan Urusan Kebudayaan;		
6	Program Perencanaan dan Pengendalian Keistimewaan Urusan Pertanahan dan Tata Ruang		
7	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Keistimewaan.		
9	Program Administrasi Perkantoran	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (APBD)	Rp 7.354.568.072,-
10	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		
11	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Pelaporan Keuangan		
	Jumlah Anggaran		Rp 25.929.941.772,-

*) Data capaian kinerja tersedia pada Triwulan IV karena bersifat *outcome*.

Pada tahun 2022, *Paniradya Kaistimewan* melaksanakan *reviu* Perjanjian Kinerja Tahun 2022. *Reviu* dilakukan karena adanya *refocusing* kegiatan dan realokasi anggaran untuk penanganan pandemi COVID-19 serta telah ditetapkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Tahun 2022. Perjanjian Kinerja *Reviu* Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel II.5 Perjanjian Kinerja Perubahan Kepala Paniradya Kaistimewan DIY Tahun 2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
1.	Terfasilitasinya Kinerja Parampara Praja	meningkatnya kualitas pelayanan sekretariat kepada Parampara Praja	%	78	Triwulan I	78
					Triwulan II	78
					Triwulan III	78
					Triwulan IV	78*)
2.	Meningkatnya kualitas implementasi urusan keistimewaan	rerata persentase capaian kinerja fisik dan keuangan program-program urusan keistimewaan	%	98.2	Triwulan I	98.2
					Triwulan II	98.2
					Triwulan III	98.2
					Triwulan IV	98.2*)
3.	Terwujudnya kelembagaan perangkat daerah yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah	persentase kelembagaan yang efektif dan efisien	%	83	Triwulan I	83
					Triwulan II	83
					Triwulan III	83
					Triwulan IV	83*)

Untuk mencapai Sasaran Strategis sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:

No	Program RPJMD	Penyandingan Program Permendagri 90 Tahun 2019 dan Pemutakhirannya	Anggaran
1	Program Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan (DAIS)	Rp. 20.464.031.474,-
2	Program Peningkatan Pelayanan Parampara Praja		
3	Program Sarana dan prasarana Keistimewaan Urusan Kelembagaan		
4	Program Perencanaan dan Pengendalian Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Tata Cara;		
5	Program Perencanaan dan Pengendalian Keistimewaan Urusan Kebudayaan;		
6	Program Perencanaan dan Pengendalian		

	Keistimewaan Urusan Pertanahan dan Tata Ruang		
7	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Keistimewaan.		
9	Program Administrasi Perkantoran	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (APBD)	Rp 6.956.530.806,-
10	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		
11	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Pelaporan Keuangan		
	Jumlah Anggaran		Rp 27.420.562.280,-

*) Data capaian kinerja tersedia pada Triwulan IV karena bersifat *outcome*.

Keterangan Tambahan:

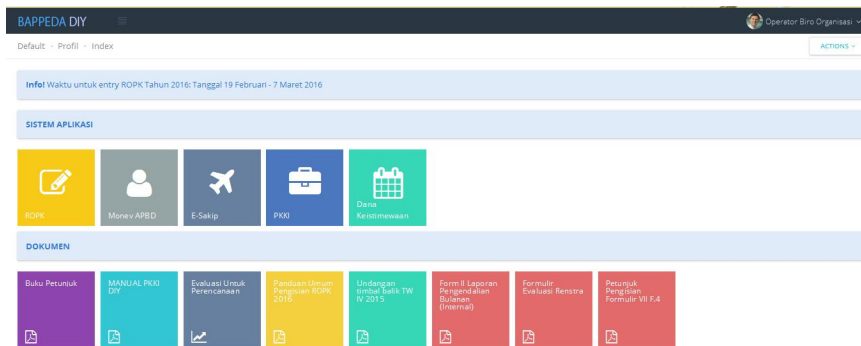
1. Indikator kinerja dan target kinerja tidak berubah, tetapi volume anggaran mengalami kenaikan 1. 5,75% untuk mengakomodir kebutuhan belanja barang/jasa yang semula belum masuk anggaran atau mengalami kenaikan harga pasar.
2. Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV.
3. Tidak mengelola anggaran Belanja Tidak Terduga.
4. Tidak mengelola anggaran dekonsentrasi.

2.5 Instrumen Pendukung Capaian Kinerja

1. SENGGUH

Instrumen pendukung penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Pemerintah Daerah DIY adalah aplikasi sungguh.jogjapro.go.id yang mengintegrasikan perencanaan termasuk Rencana Operasional Pelaksanaan Kegiatan (ROPK), anggaran kas, monitoring dan evaluasi capaian kinerja bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan OPD.

Gambar II.1. Sistem Integrasi ROPK, Monitoring dan Evaluasi, E-SAKIP



Sumber: <http://sungguh.jogjaprov.go.id/>

2. KENES

Kenes adalah Sistem Informasi Pengendalian Kegiatan Keistimewaan guna memudahkan pengendalian pelaksanaan program kegiatan di seluruh Perangkat Daerah di DIY yang bersumber dari Dana Keistimewaan.

Gambar II.25 KENES



Sumber: <https://kenes.jogjaprov.go.id/kenes/>

BAB 3

Akuntabilitas Kinerja

Bab 3 Berisi :

1. *Capaian Kinerja Tahun 2022*
2. *Realisasi Anggaran*
3. *Inovasi*
4. *Lintas Sektor*

3.1 Capaian Kinerja Tahun 2022

Paniradya Kaistimewan DIY telah melaksanakan pengukuran kinerja atas kinerja yang diperjanjikan Kepala Paniradya Kaistimewan DIY dengan Bapak Gubernur DIY tahun 2022. Pengukuran mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencana-an, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan skala nilai peringkat kinerja sebagaimana tabel berikut:

Tabel III.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1.	$91 \leq 100$	Sangat Baik	Hijau Tua
2.	$76 \leq 90$	Tinggi	Hijau Muda
3.	$66 \leq 75$	Sedang	Kuning Tua
4.	$51 \leq 65$	Rendah	Kuning Muda
5.	≤ 50	Sangat Rendah	Merah

❖ Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Tabel III.2 Capaian Kinerja Tahun 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR/META INDIKATOR	SATUAN	Base line 2017	Capaian 2021	TAHUN 2022				TARGET AKHIR RPJMD
						TARGET	REALISASI	PERSENTASE	KRITERIA/KODE	
1	2	3	4			5	6	7	8	
1	Terfasilitasinya Kinerja Parampara Praja	Indikator: meningkatnya kualitas pelayanan sekretariat kepada Parampara Praja Meta Indikator: Persen skor indeks pelayanan dengan	%	N/A	87	78	87.67	112,40	Sangat Baik	78

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR/META INDIKATOR	SATUAN	Base line 2011	Capaian 2021	TAHUN 2022				TARGET AKHIR RPJMD
						TARGET	REALI SASI	PERSEN TASE	KRITERIA/ KODE	
1	2	3	4			5	6	7	8	
		beberapa indikator (Bahan rekomendasi, fasilitas sarpras, fasilitas kegiatan)								
2	Meningkatnya kualitas implementasi urusan keistimewaan	Indikator: rerata persentase capaian kinerja fisik dan keuangan program-program urusan keistimewaan Meta Indikator: rerata jumlah capaian kinerja fisik + jumlah capaian keuangan program-program urusan keistimewaan bagi 2 dikali 100%	%	97,7	98,1	98,2	98,11	99,91	Sangat Baik	98,2
3.	Terwujudnya kelembagaan perangkat daerah yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah	Indikator: persentase kelembagaan yang efektif dan efisien Meta Indikator: Jumlah kelembagaan yang efektif dibagi Jumlah kelembagaan dikali 100%	%	78	94,8	83	94,30	113,6%	Sangat Baik	83

Adapun analisis capaian kinerja per sasaran strategis diuraikan sebagai berikut:

3.1.1. Sasaran 1: Terfasilitasinya Kinerja Parampara Praja

Kinerja sasaran terfasilitasinya kinerja parampara praja diukur dengan indikator Meningkatnya kualitas pelayanan sekretariat kepada Parampara Praja. Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan meta indikator adalah sebagai berikut:

Tabel III.3 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

NO	Sasaran	Indikator	Meta Indikator
1	2	3	4
1	Terfasilitasinya Kinerja	Meningkatnya kualitas pelayanan sekretariat kepada	Persen skor indeks pelayanan dengan beberapa

NO	Sasaran	Indikator	Meta Indikator
1	2	3	4
	Parampara Praja	Parampara Praja	indikator (Bahan rekomendasi, fasilitas sarpras, fasilitas kegiatan)

Sumber data diolah dari hasil capaian pelayanan *Paniradya Kaistimewan* DIY kepada para anggota Parampara Praja. Sub-indikator yang digunakan untuk menghitung persen kepuasan adalah sebagai berikut:

1. Kepuasan dukungan asisten tenaga ahli Parampara Praja, yaitu penyediaan data-data pendukung dan analisa yang nantinya digunakan sebagai masukan bagi anggota Parampara Praja dalam menyusun rekomendasi kepada Gubernur;
2. Kepuasan dukungan sekretariat, yaitu dukungan *Paniradya Kaistimewan* DIY kepada anggota Parampara Praja dalam hal penjadwalan kegiatan, hubungan dengan para pemangku kepentingan, hingga penyediaan materi-materi referensi;
3. Kepuasan sarana prasarana, yaitu dukungan *Paniradya Kaistimewan* DIY dalam fasilitasi sarana prasarana seperti komputer dan kendaraan;
4. Kepercayaan terhadap pelayanan, yaitu persepsi anggota Parampara Praja terhadap pelayanan yang diberikan *Paniradya Kaistimewan* DIY.

Hasil penghitungan sub-indikator tersebut di atas diperoleh capaian sebagai berikut:

Tabel III.414 Pengukuran Capaian Sasaran 1

Sub-Indikator	Hasil Sub Indikator	Rata-Rata Nilai
Kepuasan dukungan asisten tenaga ahli Parampara Praja	87.00 %	87,67%
Kepuasan dukungan sekretariat	91.66 %	
Kepuasan sarana prasarana	84.00 %	
Kepercayaan terhadap pelayanan	88.00 %	

Kinerja sasaran Terasilitasinya Kinerja Parampara Praja dengan indikator meningkatnya kualitas pelayanan sekretariat kepada Parampara Praja pada tahun 2022 dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel III.515 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

No	Indikator Sasaran	Capaian 2021	2022			Target Akhir Renstra (2022)	Capaian s/d 2022 terhadap target 2022 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi*		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya kualitas pelayanan sekretariat kepada Parampara Praja	87	78	87,67	112,40 (87,67/78 x 100%)	78	112,40

Secara keseluruhan pelayanan Paniradya Kaistimewan DIY cq. Subbag Pelayanan Parampara Praja DIY dan Asisten Parampara Praja kepada Parampara Praja diperoleh nilai 87,67%, meningkat 0,67% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya (Tahun 2021), sebesar 87%.

Gambar III.16 FGD Parampara Praja dan Perguruan Tinggi tema Kemiskinan tanggal 27 Juli 2022



Gambar III.27FGD Parampara Praja dengan tema Reformasi Birokrasi tgl. 27 Juli 2022



Faktor Pendukung keberhasilan

1. koordinasi dan kerjasama yang intensif antar stakeholder
2. dukungan sarana prasarana IT yang memadai
3. meningkatnya kapasitas dan kompetensi SDM aparatur pelaksana.

3.1.2. Sasaran 2: Meningkatnya kualitas implementasi urusan keistimewaan

Kinerja sasaran Meningkatnya kualitas implementasi urusan keistimewaan dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel III.616 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan Sasaran 2

NO	Sasaran	Indikator	Meta Indikator
1	2	3	4
1	Meningkatnya kualitas implementasi urusan keistimewaan	rerata persentase capaian kinerja fisik dan keuangan program-program urusan keistimewaan	rerata jumlah capaian kinerja fisik + jumlah capaian keuangan program-program urusan keistimewaan bagi 2 dikali 100%

Sumber data diolah dari capaian kinerja fisik dan capaian keuangan program-program urusan keistimewaan yang dilaksanakan oleh PA/KPA danais. Hasil penghitungan total capaian kinerja diperoleh data sebagai berikut:

Tabel III.717 Pengukuran Capaian Sasaran 2

No	Urusan	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Keuangan (%)	Fisik (%)
1	2	3	4	5	6
1	URUSAN KELEMBAGAAN	41.581.229.524	39.685.153.084	95,44	100,00
2	URUSAN KEBUDAYAAN	946.505.643.864	916.396.285.254,58	96,82	99,96
3	URUSAN PERTANAHAN	27.023.359.881	24.448.850.806	90,47	96,98
4	URUSAN TATA RUANG	297.750.732.531	285.946.555.008	96,04	99,46
5	URUSAN TATA CARA	7.139.034.200	6.247.465.071	87,51	99,32
	TOTAL	1.320.000.000.000	1.272.724.309.223,58	96,42	99,79

Kinerja sasaran Meningkatnya kualitas implementasi urusan keistimewaan dengan indikator rerata persentase capaian kinerja fisik dan keuangan program-program urusan keistimewaan pada tahun 2022 dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel III.818 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021

No	Indikator Sasaran	Capaian 2021	2021			Target Akhir Renstra (2022)	Capaian s/d 2022 terhadap target 2022 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Rerata persentase capaian kinerja fisik dan keuangan program-program urusan keistimewaan	97,23	98,2	98,11	99,91 =98,11/98,20 x 100%	98,2	99,91

Data Dukung Hasil Penghitungan Kinerja

Evaluasi dilaksanakan oleh *Paniradya Kaistimewaan* DIY bersama dengan K/L yaitu Kemenkeu, Kemendikbud, dan Kementrian ART/BPN untuk masing-masing tahapan. Evaluasi dilaksanakan sebelum pencairan dana keistimewaan tahap berikutnya. Hasil evaluasi berupa BA evaluasi.

Gambar III.38 Rapat kerja Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Tata Cara TA 2022



Gambar III.49 SPPD Monitoring dan Evaluasi dais urusan kebudayaan di Tanjungsari Gunungkidul



I

Gambar III.510Live Talkshow "Pengembangan Kawasan Budidaya Secara Terintegrasi Antar Satuan Ruang Strategis Keistimewaan" di Jogja TV



Gambar III.611Perjalanan Dinas Dalam Daerah ke Kabupaten/Kota dalam Rangka Monev Urusan Pertanahan (Paner Perdana Bawang Merah di Kalurahan Sidoharjo, Kabupaten Gunungkidul)



Gambar III.712 Verifikasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan dengan Pemerintah Pusat



Gambar III.813 Bimtek KENES



Faktor Penghambat keberhasilan

Rentang kendali perencanaan keistimewaan semakin panjang karena semakin bertambahnya pemangku kepentingan urusan keistimewaan hingga level desa/kalurahan

Secara umum, realisasi fisik pada masing-masing urusan mencapai lebih dari 95%. Realisasi fisik Urusan Kelembagaan merupakan realisasi tertinggi yaitu mencapai 100%, sedangkan realisasi fisik terendah berasal dari Urusan Pertanahan yaitu sebesar 96,98%. Realisasi fisik Urusan Pertanahan menjadi yang terendah karena terdapat bidang-bidang pada wilayah Kabupaten Bantul yang tidak lolos validasi di Kantor Pertanahan sehingga diperlukan pengukuran ulang atau pencarian alternatif bidang untuk pendaftaran pencatatan perubahan sertifikat tanah desa. Selain itu, terdapat berkas pendaftaran tanah Kasultanan yang siap, namun tidak dapat terfasilitasi pada pendaftaran di loket karena telah mendekati akhir tahun. Hal ini menyebabkan tidak tercapainya target pada pelaksanaan pendaftaran pencatatan perubahan sertifikat tanah desa, pendaftaran tanah desa, pendaftaran tanah kasultanan dan kadipaten, dan pengukuran tanah desa pada wilayah Kabupaten Bantul. Tidak optimalnya pelaksanaan kegiatan fisik ini tentunya berdampak pada pencapaian realisasi keuangan yang tidak maksimal dan Sisa Lebih Pagu Anggaran (SiLPA) yang relatif besar.

Sedangkan deviasi keuangan pada Urusan Tata Cara tergolong besar disebabkan karena pelaksanaan koordinasi dan konsultasi dengan Pemerintah Pusat terkait pemberhentian, penetapan dan pengesahan serta pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY tidak banyak dilaksanakan secara luring karena pelaksanaan kegiatan berjalan baik dan lancar sehingga terdapat efisiensi anggaran yang cukup besar pada anggaran bersangkutan.

3.1.3. Sasaran 3: Terwujudnya kapasitas kelembagaan perangkat daerah yang sesuai kebutuhan dan kemampuan daerah

Kinerja sasaran terwujudnya kapasitas kelembagaan perangkat daerah yang sesuai kebutuhan dan kemampuan daerah diukur dengan indikator persentase kelembagaan yang efektif dan efisien. Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan meta indikator adalah sebagai berikut:

Tabel III.3 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

No	Sasaran	Indikator	Meta Indikator
1	2	3	4
1	Terwujudnya kapasitas kelembagaan perangkat daerah yang sesuai kebutuhan dan kemampuan daerah	Persentase kelembagaan yang efektif dan efisien	Jumlah kelembagaan yang efektif dibagi Jumlah kelembagaan dikali 100%

Sumber data diolah dari hasil evaluasi kelembagaan perangkat daerah yang merupakan penghitungan komposit dari 3 (tiga) sub indikator sebagai berikut:

1. Hasil evaluasi kelembagaan perangkat daerah yang dilihat dari 2 (dua) aspek:
 - 3.1.2. Evaluasi struktur dan tugas fungsi dilaksanakan untuk mengidentifikasi permasalahan berkaitan kesesuaian struktur organisasi dengan perkembangan regulasi, kewenangan dan beban kerja; potensi duplikasi tugas fungsi; tugas fungsi yang tidak jelas/multitafsir; tugas fungsi yang belum terakomodasi; serta tugas fungsi yang belum sesuai dengan pohon kinerja (*cascading*) pada 37 (tiga puluh tujuh) OPD. Hasil identifikasi ditindaklanjuti dengan reviu terhadap Peraturan Gubernur tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja OPD. Hasil reviu diajukan menjadi usulan draft Perubahan Peraturan Gubernur kepada Biro Hukum Setda DIY.
 - 3.1.3. Evaluasi analisis jabatan dilaksanakan untuk mengidentifikasi kelengkapan dokumen analisis jabatan, dokumen analisis beban kerja, dokumen evaluasi jabatan (kelas jabatan) pada 37 (tiga puluh tujuh) OPD. Hasil evaluasi menjadi dokumen analisis jabatan, dokumen analisis beban kerja dan dokumen usulan penetapan kelas jabatan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
2. Hasil evaluasi pelaksanaan Budaya Pemerintahan Satriya pada 37 (tiga puluh tujuh) OPD secara keseluruhan dilaksanakan untuk mengetahui:
 - a. Intensitas (tingkat) penerapan Budaya Pemerintahan Satriya dilihat dari: tingkat pemahaman pegawai tentang Budaya Pemerintahan Satriya, tingkat pemahaman pegawai tentang rencana aksi, intensitas peran agen perubahan, intensitas peran Kelompok Budaya Pemerintahan, intensitas sosialisasi/ internalisasi/pembinaan oleh pimpinan, serta tingkat partisipasi pegawai dalam pelaksanaan rencana aksi. Hasil evaluasi

diklasifikasikan menjadi 5 (lima) kategori, yakni sangat baik, baik, cukup, kurang, dan buruk.

- b. Dampak penerapan Budaya Pemerintahan Satriya terhadap lingkungan fisik instansi, seperti: kebersihan, kerapian, keindahan, kenyamanan, dan kesehatan lingkungan kerja.
- c. Dampak penerapan Budaya Pemerintahan Satriya terhadap lingkungan sosial, seperti: kekompakan, kepedulian, dan kerjasama.
- d. Dampak penerapan Budaya Pemerintahan Satriya terhadap akuntabilitas, seperti: kedisiplinan (jam kerja, hari kerja, pakaian dinas, ketentuan kedinasan lainnya), efisiensi anggaran, efisiensi cara kerja.
- e. Dampak penerapan Budaya Pemerintahan Satriya terhadap pelayanan publik, seperti: inovasi, Indeks Kepuasan Masyarakat.

Catatan: capaian sub indikator hasil evaluasi pelaksanaan Budaya Pemerintahan Satriya hanya dilihat dari intensitas (tingkat) penerapan Budaya Satriya.

3. Evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi pada 37 (tiga puluh tujuh) OPD dilaksanakan untuk menilai intensitas pelaksanaan 8 (delapan) area perubahan. Instrumen yang digunakan mengacu pada Lembar Kerja Evaluasi Reformasi Birokrasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Hasil evaluasi dipetakan dalam 7 (tujuh) kategori, sebagai berikut:

No.	Kategori	Nilai/Angka	Predikat	Interpretasi
1.	AA	>90 – 100	Istimewa	Memenuhi kriteria sebagai organisasi berbasis kinerja yang mampu mewujudkan seluruh sasaran Reformasi Birokrasi
2.	A	>80 – 90	Sangat Baik	Memenuhi karakteristik organisasi berbasis kinerja namun belum mampu mewujudkan keseluruhan sasaran Reformasi Birokrasi baik secara instansional maupun di tingkat unit kerja.
3.	BB	>70 – 80	Baik	Secara instansional mampu mewujudkan Sebagian besar sasaran Reformasi Birokrasi, namun pencapaian sasaran pada tingkat unit kerja hanya sebagian kecil saja.
4.	B	>60 – 70	Cukup Baik	Penerapan Reformasi Birokrasi bersifat formal dan secara substansi belum mampu mendorong perbaikan kinerja organisasi.
5.	CC	>50 – 60	Cukup	Penerapan Reformasi Birokrasi secara formal terbatas di tingkat instansi dan belum berjalan secara merata di seluruh unit kerja.
6.	C	>30 – 50	Buruk	Penerapan Reformasi Birokrasi secara formal terbatas di tingkat instansi dan hanya mencakup sebagian kecil unit kerja.
7.	D	0 – 30	Sangat Buruk	Memiliki inisiatif awal, menerapkan Reformasi Birokrasi dan perbaikan kerja instansi belum terwujud.

Hasil penghitungan komposit dari 3 (tiga) sub indikator tersebut di atas diperoleh capaian sebagai berikut:

Tabel III.4 Pengukuran Capaian Sasaran 3

Sub-Indikator	Hasil Sub Indikator	Rata-Rata Nilai
a. Evaluasi kelembagaan perangkat daerah Meta Indikator: Jumlah OPD yang proporsional dibagi jumlah OPD dikali 100%	100	94,3
b. Valuasi pelaksanaan Budaya Pemerintahan Satriya Meta Indikator: Nilai hasil survey Perhitungan Tingkat Penerapan Budaya Pemerintahan Satriya Catatan : tingkat nilai: <1,5 = buruk; 1,5-2,49 = kurang; 2,50-3,49 = cukup; 3,50-4,49 = baik; 4,50-5 = sangat baik	82,9	
c. Evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi Meta Indikator: Jumlah OPD yang telah melaksanakan reformasi birokrasi dengan baik dibagi total OPD dikali 100% Indikator baik adalah minimal melaksanakan 5 area perubahan reformasi birokrasi	100	

Kinerja sasaran terwujudnya kapasitas kelembagaan perangkat daerah yang sesuai kebutuhan dan kemampuan daerah pada tahun 2022 dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel III.5 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

No	Indikator Sasaran	Capaian 2021	2022			Target Akhir Renstra (2022)	Capaian s/d 2021 terhadap target 2022 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi*		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	terwujudnya kapasitas kelembagaan perangkat daerah yang sesuai kebutuhan dan kemampuan daerah	84,8	83	94,3	113,6 ((94,3/83) *100%)	83%	113,6

Keterangan kolom (6) adalah: Angka realisasi 2022 dilengkapi dengan cara menghitung untuk mendapatkan hasil capaian kinerja

Analisis Ketercapaian Sasaran 1: terwujudnya kapasitas kelembagaan perangkat daerah yang sesuai kebutuhan dan kemampuan daerah adalah sebagai berikut:

- a. Tercapai 94,3 %, dengan demikian prosentase realisasi terhadap target sebesar 113,6% (terlampau).
- b. Dibandingkan realisasi tahun lalu sebesar 84,8%, terdapat peningkatan sebesar 9,5%.
- c. Capaian target indikator pada tahun 2022 mencerminkan capaian Tahun akhir Perencanaan periode 2017-2022

Keberhasilan capaian Indikator Prosentase peningkatan capaian tersebut didukung dari:

- a. Capaian Evaluasi kelembagaan perangkat daerah
 1. Pada Tahun 2022 dilakukan pelaksanaan penyusunan Perubahan Perdaais Kelembagaan Pemda DIY langkah yang dilakukan sebagai berikut:
 - a. Penyusunan Kajian Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah;
 - b. Penyusunan draf Perubahan Perdaais Kelembagaan Pemerintah Daerah DIY;
 - c. Harmonisasi Perundangan draf Perubahan Pedais Kelembagaan Pemda DIY;
 - d. Pembahasan Bapemperda dan Pansus DPRD DIY;
 - e. Fasilitasi dan konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri RI;
 - f. Pembahasan final dengan DPRD DIY;
 - g. Penetapan Peraturan Daerah Istimewa Nomor 1 Tahun 2022.
 2. Dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi, maka perlu dilakukan Evaluasi Kelembagaan dengan merubah struktur organisasi Perangkat Daerah menyesuaikan kebijakan penyederhanaan birokrasi serta sinkronisasi dengan perkembangan peraturan perundang-undangan terbaru. Pada Tahun 2022 dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Gubernur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah sebagai berikut:

1. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Nomor 90 Tahun 2022)
2. Inspektorat (Nomor 91 Tahun 2022)
3. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Nomor 92 Tahun 2022)
4. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Nomor 93 Tahun 2022)
5. Dinas Kelautan dan Perikanan (Nomor 94 Tahun 2022)
6. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (Nomor 95 Tahun 2022)
7. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Nomor 96 Tahun 2022)
8. Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah (Nomor 97 Tahun 2022)
9. Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral (Nomor 98 Tahun 2022)
10. Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Nomor 99 Tahun 2022)
11. Satuan Polisi Pamong Praja (Nomor 100 Tahun 2022)
12. Badan Kepegawaian Daerah (Nomor 101 Tahun 2022)
13. Badan Pendidikan dan Pelatihan (Nomor 102 Tahun 2022)
14. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Nomor 103 Tahun 2022)
15. Badan Penghubung Daerah (Nomor 104 Tahun 2022)
16. Sekretariat Daerah DIY; (Nomor 105 Tahun 2022)
17. Dinas Sosial; (Nomor 106 Tahun 2022)
18. Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan); (Nomor 107 Tahun 2022)
19. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Nomor 10 Tahun 2022)
20. Dinas Kesehatan (Nomor 109 Tahun 2022)
21. UPT Dinas Kesehatan (Nomor 110 Tahun 2022)
22. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan; (Nomor 111 Tahun 2022)
23. Dinas Pariwisata; (Nomor 112 Tahun 2022)
24. Dinas Komunikasi dan Informatika; (Nomor 113 Tahun 2022)
25. Dinas Pertanahan dan Tata Ruang; (Nomor 114 Tahun 2022)
26. Dinas Perhubungan; (Nomor 115 Tahun 2022)
27. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; (Nomor 116 Tahun 2022)
28. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Nomor 117 Tahun 2022)
29. UPT Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. (Nomor 118 Tahun 2022)
30. UPT Balai Perlindungan Perempuan dan Anak (Nomor 11 Tahun 2022)

Beberapa perubahan yang diatur dalam Peraturan Gubernur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah antara lain:

- a. Penambahan fungsi terkait pembinaan reformasi birokrasi, penyiapan proses bisnis, dan pengembangan teknologi dan informasi yang terintegrasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
- b. Penambahan fungsi sebagai Unit Pembina Jabatan Fungsional sesuai bidangnya.
- c. Sinkronisasi tugas dan fungsi sesuai substansi pada masing-masing unit kerja.
- d. Penyesuaian Tata Kerja pasca penyederhanaan birokrasi.

3 Proses Bisnis Kelembagaan Pemerintah Daerah DIY

Penyusunan peta proses bisnis diharapkan dapat mudah melihat potensi masalah yang ada di dalam pelaksanaan suatu proses sehingga solusi penyempurnaan proses lebih terarah dan memiliki standar pelaksanaan pekerjaan sehingga memudahkan dalam mengendalikan dan mempertahankan kualitas pelaksanaan pekerjaan. Penyusunan peta proses bisnis ini dilakukan dengan pertimbangan sebagai berikut;

1. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 292 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601);
2. Peraturan Presiden tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis;

Pada tahun 2022 Penyusunan dokumen Proses Bisnis Kelembagaan Pemerintah Daerah DIY dilakukan melalui jasa konsultasi yang diharapkan mampu menggambarkan proses bisnis yang dilakukan oleh organisasi dalam mencapai visi, misi, dan tujuan organisasi.

Penyusunan peta bisnis proses dilakukan agar setiap instansi pemerintah:

- a. Mampu melaksanakan tugas dan fungsi secara efektif dan efisien;

- b. Mudah mengomunikasikan baik kepada pihak internal maupun eksternal mengenai proses bisnis yang dilakukan untuk mencapai visi, misi, dan tujuan; dan
- c. Memiliki aset pengetahuan yang mengintegrasikan dan mendokumentasikan secara rinci mengenai proses bisnis yang dilakukan untuk mencapai visi, misi, dan tujuan.

Beberapa hal yang perlu menjadi catatan dalam dokumen proses bisnis yang disusun adalah:

1. Peta proses bisnis Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta disusun berdasarkan dokumen Rencana Pemerintah Daerah (Dokumen RPD DIY tahun 2023-2026) yang merupakan dokumen perencanaan transisi. Oleh karena itu perlu dilakukan penyesuaian-penyesuaian nantinya ketika dokumen RPJMD yang baru telah diterbitkan
 2. Peta proses bisnis Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta adalah peta besar penyelenggaraan urusan pemerintah level provinsi sesuai dengan dokumen perencanaan. Sehingga perlu operasionalisasinya pada level perangkat daerah.
 3. Perangkat daerah pengampu urusan ketatalaksanaan dan perangkat daerah pemangku urusan perencanaan memiliki peran penting dalam membina dan mengendalikan pengembangan peta proses bisnis ini.
4. Evaluasi Lembaga Non Struktural
1. Lembaga Non Struktural merupakan lembaga independen yang dibentuk dengan kriteria memiliki urgensi terhadap suatu tugas tertentu, memiliki kekhususan tertentu, serta mendukung visi, misi, dan program kerja pembangunan daerah. Munculnya lembaga-lembaga tersebut yang cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, maka perlu dilakukan evaluasi mengenai keberadaannya. Hal tersebut dilakukan dengan pertimbangan bahwa agar tidak terjadi tumpang tindih dalam norma, tugas fungsi, serta praktik kerja di lapangan baik antar sesama LNS maupun dengan Perangkat Daerah. Sehubungan dengan hal tersebut juga karena lembaga non struktural mengandalkan pendanaan dari APBD DIY, meskipun ada juga yang didukung dengan pendanaan dari APBN serta swadaya, namun hal tersebut tetap menjadi pertimbangan dalam melakukan evaluasi terhadap keberadaannya,

sehingga ke depan diharapkan penggunaan APBD DIY terhadap operasionalisasi LNS dapat lebih efektif dan efisien.

2. Sebagaimana amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 bahwa kajian LNS diperlukan untuk menelaah keberadaannya agar tidak terjadi tumpang tindih dalam norma, tugas fungsi, serta praktik kerja di lapangan baik antar sesama LNS maupun dengan Perangkat Daerah Penyusunan kajian LNS pada tahun 2022 dilaksanakan melalui jasa konsultasi yang diharapkan dapat melihat potensi masalah yang ada serta dapat dilakukan penyusunan kajian secara komprehensif.
3. Berdasarkan keseluruhan hasil analisis yang telah dilakukan dengan serangkaian metodologi akademis maupun normatif-yuridis maka dapat diidentifikasi eksistensi LNS di lingkup Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Setidaknya ada 21 (dua puluh satu) LNS yang berhasil dipetakan selama proses kajian. LNS tersebut tersebar pada 3 (tiga) level pemerintahan yakni: (1) Sekretariat Daerah; (2) Paniradya Kaistimewan; dan (3) Dinas. Berdasarkan hasil evaluasi secara komprehensif maka dirumuskan rekomendasi: (1) 20 (dua puluh) LNS dengan status quo dengan peningkatan dan penguatan tugas dan fungsi; dan (2) 1 (satu) LNS dilikuidasi (integrasi) dan fungsi-fungsinya dilaksanakan oleh Perangkat Daerah induk

Gambar III.1
Penyusunan Perubahan Perdais Kelembagaan Pemda DIY



Gambar III.2
Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah
dengan Seluruh Perangkat Daerah



Gambar III. 3
Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2022



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 11 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI,
DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
DAN PENGENDALIAN PENDUDUK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin pemenuhan hak dan peningkatan kualitas perlindungan terhadap perempuan dan anak diperlukan lembaga khusus untuk melakukan pengoordinasian, pengendalian, dan fasilitasi penyelenggaraan layanan perlindungan bagi perempuan dan anak;
- b. bahwa Pasal 7 Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak mengamatkan pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
- c. bahwa dengan terbentuknya Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu untuk menjalin kemitraan dengan Pusat Pelayanan Terpadu di Daerah Istimewa Yogyakarta yang dibentuk sebagai amanat Pasal 14 ayat (1) huruf a Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;



Gambar III. 4
Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN DAERAH ISTIMEWA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH ISTIMEWA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 1 TAHUN 2018
TENTANG KELEMBAGAAN PEMERINTAH DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
- b. bahwa dalam rangka mendukung kebijakan penyederhanaan birokrasi, meningkatkan efektivitas kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan melaksanakan ketentuan regulasi mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016

Gambar III. 5
Peraturan Gubernur Nomor 105 Tahun 2022



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 105 TAHUN 2022

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA
SEKRETARIAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan penyederhanaan birokrasi di lingkungan instansi Pemerintah Daerah DIY, maka Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah perlu disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

h. Capaian Hasil Evaluasi Pelaksanaan Budaya Pemerintahan Satriya

Budaya Pemerintahan Satriya merupakan perwujudan dari nilai luhur Trilogi Filosofi Keistimewaan, yakni: (1) Hamemayu Hayuning Bawana; (2) Sangkan Paraning Dumadi; dan (3) Manunggaling Kawula Gusti. Nilai luhur tersebut menjadi pondasi keutamaan bagi sifat “ksatria” yang ditanamkan, seperti ajaran moral sawiji, greget, sengguh, ora mingkuh, serta semangat golong-gilig. Negara mengakui nilai luhur ini berdasarkan UUD Tahun 1945, Pasal 18B ayat (1) dan Pasal 18B ayat (2). SATRIYA dipersepsikan menjadi 2 (dua) makna; sebagai etimologi memiliki arti watak “Ksatria” (sawiji, greget, sengguh, ora mingkuh, serta semangat golong-gilig) dan sebagai akronim nilai dari Selaras; Akal budi luhur-jatidiri; Teladan-keteladanan; Rela melayani; Inovatif; Yakin dan percaya diri; dan Ahli-profesional.

Budaya Pemerintahan SATRIYA merupakan bentuk komitmen Pemerintah Daerah DIY dalam mencapai keberhasilan transformasi birokrasi yang berbasis pada nilai-nilai kearifan lokal DIY yaitu hamemayu hayuning bawana dan ajaran moral sawiji, greget, sengguh ora mingkuh dan dengan semangat golong gilig. Berdasarkan nilai-nilai tersebut, setiap tahunnya dilakukan monev baik di Pemerintah Daerah DIY maupun Kabupaten/Kota untuk mengetahui intensitas penerapan budaya SATRIYA yang dibagi ke dalam tujuh indikator, yaitu :

1. Tingkat pemahaman pegawai tentang Budaya pemerintahan SATRIYA;
2. Tingkat pemahaman pegawai tentang rencana aksi;
3. Intensitas peran agen perubahan;
4. Intensitas peran kelompok Budaya Pemerintahan;
5. Intensitas sosialisasi/internalisasi/pembinaan oleh pimpinan;
6. Tingkat partisipasi pegawai dalam pelaksanaan rencana aksi;
7. Intensitas upaya monitoring dan evaluasi implementasi.

Nilai-nilai ini tentu tidak bisa terlepas dari semangat kerja ASN di lingkungan Pemda DIY karena telah digagas sejak hampir dua dekade lamanya. Sehingga nilai-nilai ini harus terus dilestarikan dan dikembangkan agar nilai luhur kebudayaan tidak luntur di era yang serba disruptif ini. Kegiatan evaluasi ini diperlukan dan penting bagi perkembangan reformasi

birokrasi di Pemerintah Daerah DIY tetapi selain itu juga sebagai ajang melestarikan budaya dan nilai yang secara historis dan filosofis telah ada sejak era-era sebelumnya. Oleh karena itu, Kristalisasi tujuan Budaya Pemerintahan Satriya dimaksudkan agar terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, professional, dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dengan mengedepankan pada integritas baik pada level individu maupun institusi. Oleh karena itu, Budaya Pemerintahan Satriya harus selalu dievaluasi setiap tahunnya karena mandat dari Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 72 Tahun 2008 tentang Budaya Pemerintahan di Daerah Istimewa Yogyakarta, Pasal 8 yang menyebutkan “Dalam rangka efektivitas implementasi nilai Budaya Pemerintahan diperlukan monitoring dan evaluasi.”

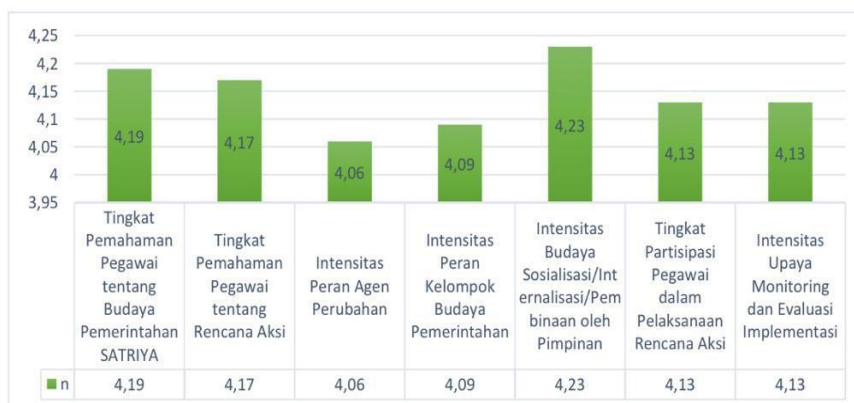
Evaluasi dilaksanakan pada 37 (tiga puluh tujuh) OPD bekerja sama dengan Pihak Ketiga (PT. Sinergi Visi Utama) pada bulan November - Desember 2022. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik survey. Survei dilakukan secara sistematis (via online yang difasilitasi oleh *agent of change* di setiap OPD dan didampingi oleh tenaga ahli). Pengumpulan data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua kelompok yaitu data primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian ini bersumber dari hasil survei dan pengamatan di lapangan.

Hasil dari penelitian terkait evaluasi Budaya Pemerintahan Satriya merupakan langkah strategis untuk melakukan otokritik terhadap kinerja dan komitmen Perangkat Daerah dalam memenuhi indikator-indikator secara komprehensif. Dengan demikian kesadaran tentang pentingnya budaya pemerintahan sebagai budaya kerja telah terbentuk dilihat dari aspek regulatif. Dengan adanya UU No. 13 tahun 2012 mengenai keistimewaan, semakin memperkuat pentingnya implementasi budaya pemerintahan. Kesadaran ini semakin kuat dengan adanya Pergub No. 53 tahun 2014 berupa Pedoman Pelaksanaan Budaya Pemerintahan. Hasil Evaluasi Budaya Pemerintahan Satriya tahun 2022 secara garis besar dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Budaya Pemerintahan Satriya merupakan bentuk komitmen Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam mencapai keberhasilan transformasi birokrasi yang berbasis pada nilai-nilai kearifan lokal DIY

yaitu hamemayu hayuning bawana dan ajaran moral sawiji, greget, sungguh ora mingkuh dan semangat golong gilig. Berdasarkan pengolahan data statistik, dihasilkan nilai akhir untuk Intensitas Penerapan Budaya Pemerintahan Satriya tahun 2022 adalah 4,14 atau 82,9% yang termasuk Baik;

Gambar III.6
Nilai Rata-Rata Indikator Intensitas Penerapan Budaya Pemerintahan
Satriya di 37 Perangkat Daerah

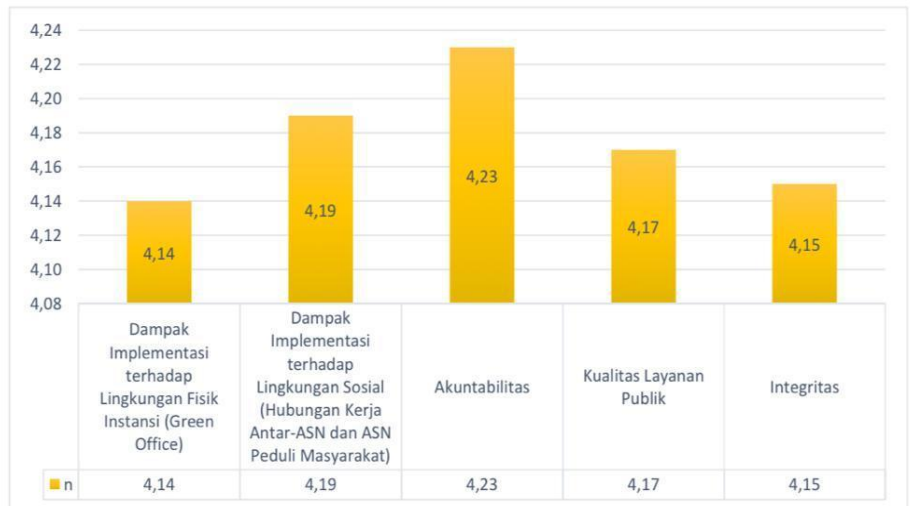


2. Dampak Implementasi Budaya Pemerintahan Satriya merupakan instrumen yang dibangun atas dasar deliberasi semua pemangku kepentingan untuk mengetahui hasil dari intensitas penerapan Budaya Pemerintahan Satriya yang selama ini telah diimplementasikan. Hasil akumulasi yang didapatkan adalah 4,18 atau 83,6% yang termasuk dalam kategori Baik. Secara lebih rinci, data dapat ditampilkan hasil sebagai berikut:
 - a. Dampak implementasi terhadap lingkungan fisik instansi (Green Office) memiliki nilai sebesar 4,14 yang termasuk dalam kategori Baik.
 - b. Dampak implementasi terhadap lingkungan sosial (ASN Peduli Masyarakat) memiliki nilai sebesar 4,19 yang termasuk dalam kategori Baik.
 - c. Dampak implementasi terhadap perbaikan tata kelola pemerintahan terkait Akuntabilitas memiliki nilai sebesar 4,23 yang termasuk dalam kategori Baik.

- d. Dampak implementasi terhadap perbaikan tata kelola pemerintahan terkait Kualitas Pelayanan Publik memiliki nilai rata-rata sebesar 4,17 yang termasuk dalam kategori Baik.
- e. Dampak implementasi terhadap perbaikan tata kelola pemerintahan terkait Integritas memiliki nilai rata-rata sebesar 4,15 yang termasuk dalam kategori Baik.

Gambar III.7

Nilai Rata-Rata Dampak Implementasi Budaya Pemerintahan Satriya di 37 Perangkat Daerah



3. Diakumulasi dari rata-rata Intensitas Penerapan Budaya Pemerintahan Satriya (Independent Variable) dan Dampak Implementasi Budaya Pemerintahan Satriya (Dependent Variabel), maka akan didapatkan hasil sebesar 4,16 atau 83.2% yang termasuk dalam kategori Baik. Adapun Perangkat Daerah yang mendapatkan kategori Sangat Baik hanya ada 3, yakni:

1. Biro Tata Pemerintahan,
2. Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam, serta
3. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk. Sementara 34 Perangkat daerah lainnya mendapatkan kategori Baik.

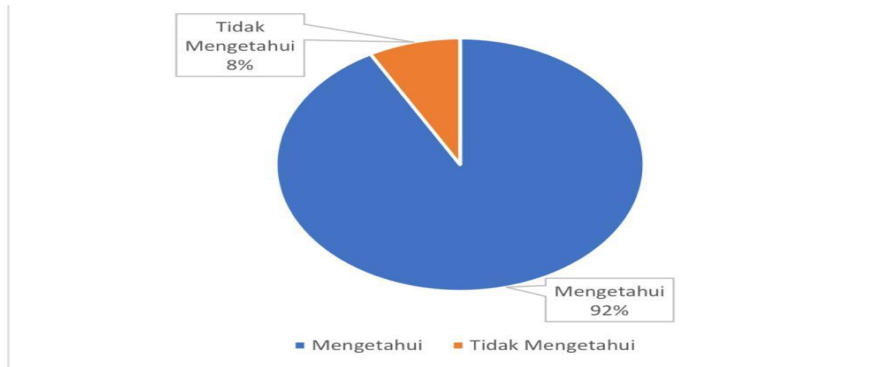
Tabel III. 6
Rata-Rata Intensitas Penerapan Budaya Pemerintahan Satriya

No	Perangkat Daerah	Rata-rata Penerapan Budaya Pemerintahan SATRIYA		
		Nilai rata-rata	%	Kriteria
1	Sekretariat Daerah			
a	Biro Tata Pemerintahan	4,86	97,0%	Sangat Baik
b	Biro Hukum	3,93	78,6%	Baik
c	Biro Organisasi	3,93	78,7%	Baik
d	Biro Umum, Hubungan Masyarakat, dan Protokol	3,94	79,0%	Baik
e	Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam	4,67	93,0%	Sangat Baik
f	Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan	4,06	81,3%	Baik
g	Biro Bina Mental Spiritual	4,11	82,2%	Baik
h	Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat	3,91	78,5%	Baik
2	Paniradya Kaistimewan	4,31	86,2%	Baik
3	Sekretariat DPRD	4,20	84,1%	Baik
4	Inspektorat	4,16	83,0%	Baik
5	Dinas Pariwisata	3,72	74,4%	Baik
6	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	4,24	85,2%	Baik
7	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	4,19	83,9%	Baik
8	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	4,18	83,5%	Baik
9	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	4,07	81,4%	Baik
10	Dinas Kelautan dan Perikanan	4,24	84,9%	Baik
11	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	4,28	85,4%	Baik
12	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	4,33	86,8%	Baik
13	Dinas Perhubungan	4,32	86,4%	Baik
14	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	4,13	82,2%	Baik

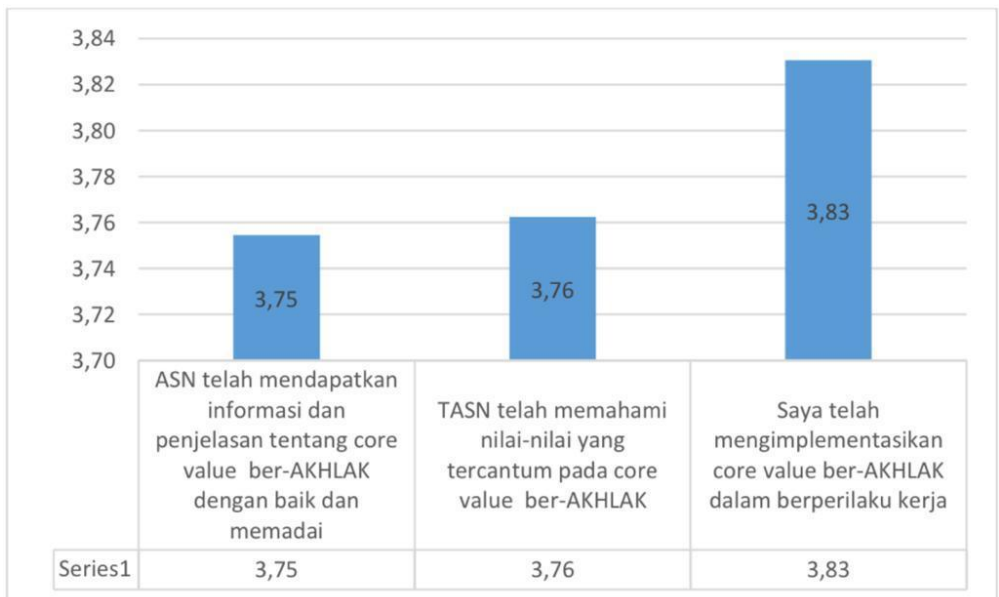
15	Dinas Komunikasi dan Informatika	4,06	81,2%	Baik
16	Dinas Perizinan dan Penanaman Modal	3,98	79,2%	Baik
17	Dinas Kesehatan	4,18	83,3%	Baik
18	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	3,99	79,9%	Baik
19	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	3,94	78,6%	Baik
20	Dinas Sosial	4,21	84,2%	Baik
21	Dinas Kebudayaan	4,00	80,1%	Baik
22	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk	4,60	92,0%	Sangat Baik
23	Satuan Polisi Pamong Praja	4,03	80,7%	Baik
24	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	4,36	87,1%	Baik
25	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	4,07	81,3%	Baik
26	Badan Kepegawaian Daerah	4,23	84,7%	Baik
27	Badan Pendidikan dan Pelatihan	4,09	81,6%	Baik
28	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3,78	75,7%	Baik
29	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	4,28	86,1%	Baik
30	Badan Penghubung Daerah	4,28	85,5%	Baik
Rata-rata Seluruh OPD		4,16	83,2%	Baik
KRITERIA		Baik		

4. Core value ASN Ber-AKHLAK telah diketahui oleh 92% ASN di lingkungan Pemda DIY. Kemudian untuk intensitas sosialisasi internal melalui Biro Organisasi dinilai belum memadai dengan rata-rata satu kali sosialisasi saja dengan kualitas yang relatif baik (3,88/5). Walaupun 168 demikian, tingkat pemahaman maupun implementasi nilai-nilai core value ASN Ber-AKHLAK sedikit banyak telah turut mempengaruhi budaya kerja di lingkungan Pemda DIY karena sebanyak 77% ASN Pemda DIY mengaku telah menerapkan core value ASN BerAKHLAK dalam perilaku kerja sehari-hari sehingga kedepan perlu untuk dikelola secara lebih baik.

Gambar III.8
Tingkat Pengetahuan ASN DIY Terhadap Core Value Ber-Akhlak



Gambar III.9
Tingkat Pemahaman ASN terhadap Core Value ASN Ber-AKHLAK

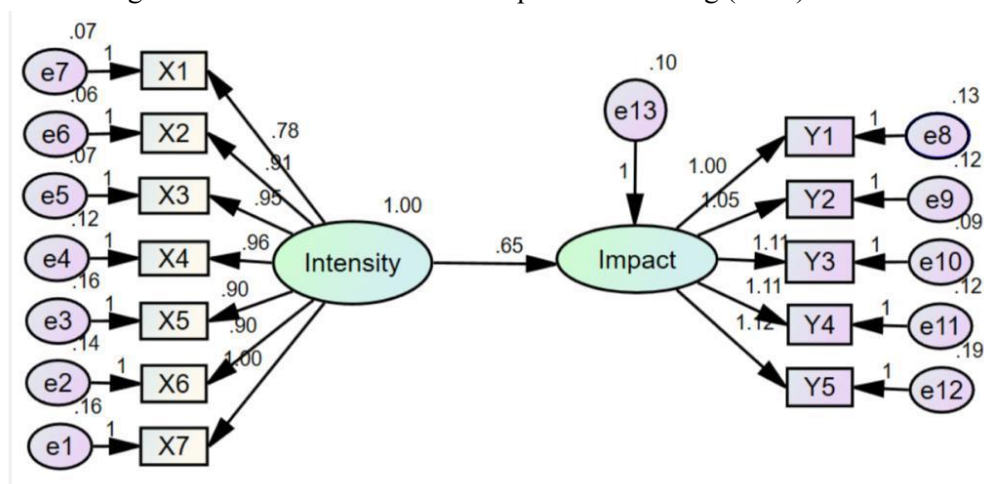


- Uji pengaruh yang dilakukan untuk melihat hubungan antara Variabel dependen (Dampak Penerapan Budaya Pemerintahan Satriya) yang dipengaruhi oleh variabel Independen (Intensitas Penerapan Budaya Pemerintahan Satriya) yaitu sebesar Nilai loading factor adalah sebesar 0,65. Dapat disimpulkan bahwa, variabel bebas mampu mempengaruhi dengan kuat variabel terikat yang ada secara keseluruhan sebesar 65%,

sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain diluar dari model regresi ini. Intensitas peran kelompok budaya pemerintahan, selanjutnya intensitas peran agen perubahan, dan tingkat pemahaman pegawai tentang rencana aksi paling berpengaruh pada tingkat intensitas penerapan budaya SATRIYA. Kemudian, dampak implementasi terhadap perbaikan tata kelola pemerintahan khususnya integritas memiliki dampak paling besar pada perbaikan tata kelola pemerintahan di Pemda DIY.

Gambar III.10

Diagram Hasil Analisis Structural Equation Modeling (SEM)



Keterangan:

X1 : Tingkat Pemahaman Pegawai tentang Budaya Pemerintahan Satriya

X2 : Tingkat Pemahaman Pegawai tentang Rencana Aksi

X3 : Intensitas Peran Agen Perubahan

X4 : Intensitas Peran Kelompok Budaya Pemerintahan

- X5 : Intensitas Sosialisasi/ Internalisasi/ Pembinaan oleh Pimpinan
- X6 : Tingkat Partisipasi Pegawai dalam Pelaksanaan Rencana Aksi
- X7 : Intensitas Upaya Monitoring dan Evaluasi Implementasi
- Y1 : Dampak Implementasi Terhadap Lingkungan Fisik Instansi (*Green Office*)
- Y2 : Dampak Implementasi Terhadap Lingkungan Sosial (ASN Peduli Masyarakat)
- Y3 : Dampak Implementasi Terhadap Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan (Akuntabilitas)
- Y4 : Dampak Implementasi Terhadap Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan (Kualitas Pelayanan Publik)
- Y5 : Dampak Implementasi Terhadap Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan (Integritas)

i. Capaian Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Evaluasi terhadap capaian pelaksanaan reformasi birokrasi dilaksanakan setiap Tahun diperlukan sebagai dasar merumuskan arah, strategi dan penjabaran operasional pelaksanaan reformasi birokrasi tahap selanjutnya. Capaian hasil pelaksanaan reformasi birokrasi sampai dengan tahun 2022 antara lain sebagaimana tersaji dalam Tabel berikut:

Tabel III.7 Capaian Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

NO.	AREA PERUBAHAN	CAPAIAN HASIL
1	2	3
1.	Manajemen Perubahan	1) Harmonisasi nilai Satriya dengan core values ASN BerAKHLAK 2) Monev RB melalui coreformspace 3) Forum Agen Perubahan 4) Pengukuran Dampak Budaya Satriya terhadap Tata Kelola 5) Integrasi Agen Perubahan Budaya Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi
2.	Deregulasi Kebijakan	1) Penataan Peraturan Perundangan 2) Rebuild “biro hukum” to be advocacy body 3) Harmonisasi Peraturan 4) Sistem Informasi Produk Hukum 5) Tindak Lancut UU Citpa Kerja
3.	Penataan dan Pe-nguatan Organi-sasi	1) Penerapan organisasi berbasis kinerja (<i>Performance Based Organization</i>); 2) Penyederhanaan birokrasi pada 246 jabatan, 13 Eselon III dan 233 Eselon

NO.	AREA PERUBAHAN	CAPAIAN HASIL
1	2	3
		IV. 3) Analisa Beban Kerja semua Perangkat Daerah dan Analisa Kompetensi Jabatan. 4) Sistem Kerja Pasca Penyederhanaan Struktur Organisasi dan Penyetaraan Jabatan
4.	Penataan Tata Laksana	1) Digitalisasi dan integrasi tata kelola pemerintahan. (integrasi sistem Perencanaan, Penganggaran, Monitoring dan Pelaporan), (JogjaPlan, Sengguh, Si-informan, Simpeg/ASN memayu, Eprima, Jogja Centre) 2) Digitalisasi pelayanan publik Eposti, Jogja Library For All (jolifa), Jogja Belajar Class, siBAKUL jogja, e-LAPOR, IDMC) 3) ASB berbasis program/Proses Bisnis 4) Jogja Smart Province, Tanda Tangna Elektronik 5) SOP internal Perangkat Daerah 6) PBJ berbasis e-procurement
5.	Penguatan SDM Aparatur	1) Optimalisasi Assessment Center 2) Penilaian ASN melalui talentpool (misal:diklat kader) 3) BKN Awards Tahun 2017,2019 s.d. 2022 4) KASN Award Tahun 2018,2021 5) Coorprate University 6) Apresiasi ketepatan waktu input anjab abk aplikasi SIMONA (Kemendagri) 7) Penilaian Penerapan Merit System 2018 (Baik), 2020 (sangat baik), 2022 (sangat baik) 8) Penilaian kinerja diturunkan sampai dengan individu (Pergub 112 Tahun 2021) 9) Fasilitasi untuk tugas belajar, ijin belajar, diklat, dll 10) ASN MEMAYU 11) Si-Informan (penyesuaian Permenpan Nomor 6 Tahun 2022) 12) SIMASTER (Sistem Manajemen Assessment Center)
6.	Penguatan Akun tabilitas	1) Penyusunan Cascading sebagai dasar penyusunan kelembagaan (PBO) 2) Membuka akses sitem perencanaan dan pengendalian pembangunan untuk publik 3) Mengimplementasikan BSC untuk penilaian kinerja Perangkat Daerah 4) Publikasi capaian kinerja dalam forum Rakordal yang disiarkan secara live dan melalui media masa. 5) Penilaian kinerja dari lintas SEKTOR dan inovasi

NO.	AREA PERUBAHAN	CAPAIAN HASIL
1	2	3
		6) Refocusing Program kegiatan 7) Perencanaan berbasis kinerja 8) E-budgeting 9) Penganggaran berbasis kinerja (Jogjaplan, Jogjakendali)
7.	Penguatan Pengawasan	1) Kapabilitas APIP Berada Pada Level 3 Telah Memenuhi Target RPJMN 2) Maturitas SPIP Pemda DIY Mencapai Nilai 3,510 3) Mengembangkan EWASDA Untuk Pemeriksaan Dan Audit Kinerja 4) 100 % Tingkat Kepatuhan Wajib Lapor LHKPN 5) Mengeser Peran Inspektorat Dari Watchdog Menjadi Quality Assurance 6) Peringkat 1 Level Pemda Indeks Nilai Dasar Kode Etik Dan Kode Perilaku Dari KASN 7) Penghargaan Peringkat I Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaaan Kemendagri 8) Penghargaan Peringkat I Pemeriksaan Akhir Masa Jabatan Gubernur DIY dari Itjen Kemendagri
8.	Peningkatan Kua-litas Pelayanan Publik	1) Memasukkan inovasi menjadi bagian penilaian kinerja untuk mendorong pelayanan publik yang semakin baik. (apresiasi yang diterima: TOP 99 dan TOP 45 Kompetisi Pelayanan Publik 2022) 2) Evaluasi pelayanan publik 2021 DPPM (A), KPPD Sleman (A) 3) Kepatuhan UU 25/2009, 2021 Zona Hijau 4) Pelembagaan Survey Kepuasan Masyarakat untuk perbaikan kinerja pelayanan 5) Melembagakan Forum Konsultasi Pelayanan Publik untuk mendapatkan masukan dari stakeholder.

Upaya percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi oleh Pemerintah Daerah DIY direspon positif oleh Pemerintah Pusat, hal ini bisa dilihat dari telah dilaksanakannya evaluasi terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi di Pemerintah Daerah DIY oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Tujuan evaluasi tersebut adalah untuk menilai kemajuan pelaksanaan program reformasi birokrasi dalam rangka mencapai sasaran yaitu mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan efisien, serta birokrasi yang mampu memberikan pelayanan publik yang semakin membaik.

Prestasi Indeks RB Pemerintah Daerah DIY pada Tahun 2022 mendapatkan Indeks Reformasi Birokrasi dengan kategori A. Namun sampai dengan Laporan ini disusun, belum terbit Laporan Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi tahun 2022 dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI sehingga nilai Indeks RB Tahun 2022 tidak dapat dilampirkan.

Pelaksanaan Evaluasi Reformasi Birokrasi juga dilakukan pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah DIY pada Tahun 2022. Evaluasi Reformasi Birokrasi pada Perangkat Daerah menghasilkan 35 Perangkat Daerah dengan kategori nilai A dengan Predikat “Sangat Baik” dan 2 Perangkat Daerah dengan kategori nilai BB dengan Predikat “Baik”

Gambar III.11 Ringkasan Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah
Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022

No	Perangkat Daerah	Nilai Konversi Co Reform Space (20%)	Nilai Konversi Timbal Balik(80%)	Indeks RB 2022	Predikat	Kategori	Indeks RB 2021	Indeks RB 2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Inspektorat DIY	19,80	66,63	86,43	Sangat Baik	A	85,32	89,30
2	Badan Kepegawaian Daerah DIY	19,40	66,05	85,45	Sangat Baik	A	84,31	88,30
3	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DIY	19,40	65,40	84,80	Sangat Baik	A	84,23	88,20
4	Biro Tata Pemerintahan Setda DIY	19,40	65,36	84,76	Sangat Baik	A	83,97	85,40
5	Dinas Komunikasi dan Informatika DIY	19,40	65,26	84,66	Sangat Baik	A	82,18	87,90
6	Badan Pendidikan dan Pelatihan DIY	19,60	65,03	84,63	Sangat Baik	A	82,44	86,80
7	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY	19,40	64,95	84,35	Sangat Baik	A	81,94	85,40
8	Dinas Kesehatan DIY	19,20	65,06	84,26	Sangat Baik	A	83,17	88,60
9	Biro Organisasi Setda DIY	19,00	64,91	83,91	Sangat Baik	A	83,90	88,30
10	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY	18,80	65,10	83,90	Sangat Baik	A	82,09	76,80
11	Dinas Sosial DIY	19,20	64,65	83,85	Sangat Baik	A	81,59	85,40

No	Perangkat Daerah	Nilai Konversi CoReform Space (20%)	Nilai Konversi Timbal Balik(80%)	Indeks RB 2022	Predikat	Kategori	Indeks RB 2021	Indeks RB 2020
12	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah DIY	18,80	64,97	83,77	Sangat Baik	A	82,86	84,30
13	Dinas Perizinan dan Penanaman Modal DIY	19,20	64,45	83,65	Sangat Baik	A	81,81	77,90
14	Biro Hukum Setda DIY	18,80	64,75	83,55	Sangat Baik	A	81,75	70,80
15	Biro Umum Hubungan Masyarakat dan Protokol Setda DIY	18,40	65,03	83,43	Sangat Baik	A	82,01	77,70
16	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk DIY	18,80	64,63	83,43	Sangat Baik	A	82,60	87,70
17	Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan Setda DIY	19,00	64,38	83,38	Sangat Baik	A	77,87	72,20
18	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY	19,00	64,32	83,32	Sangat Baik	A	80,35	74,50
19	Dinas Kelautan dan Perikanan DIY	18,80	64,40	83,20	Sangat Baik	A	81,31	88,20
20	Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY	19,00	63,90	82,90	Sangat Baik	A	81,34	80,20
21	Paniradya Kaistimewan	18,80	64,04	82,84	Sangat Baik	A	79,26	73,80
22	Sekretariat DPRD DIY	19,20	63,55	82,75	Sangat Baik	A	77,75	82,30
23	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY	18,40	64,35	82,75	Sangat Baik	A	79,97	78,10
24	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah DIY	18,60	64,14	82,74	Sangat Baik	A	81,13	62,30
25	Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY	18,80	63,93	82,73	Sangat Baik	A	75,73	88,20
26	Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat Setda DIY	18,80	63,71	82,51	Sangat Baik	A	80,29	86,40
27	Biro Bina Mental Spiritual Setda DIY	18,60	63,79	82,39	Sangat Baik	A	81,59	86,10
28	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Energi Sumber Daya Mineral DIY	18,40	63,75	82,15	Sangat Baik	A	77,75	81,30
29	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) DIY	18,80	63,04	81,84	Sangat Baik	A	76,58	66,80
30	Badan Penghubung Daerah DIY	19,00	62,69	81,69	Sangat Baik	A	76,51	63,00

No	Perangkat Daerah	Nilai Konversi CoReform Space (20%)	Nilai Konversi Timbal Balik(80%)	Indeks RB 2022	Predikat	Kategori	Indeks RB 2021	Indeks RB 2020
31	Biro Administrasi Perekonomian dan SDA Setda DIY	19,00	62,68	81,68	Sangat Baik	A	71,80	77,10
32	Dinas Perhubungan DIY	18,20	63,36	81,56	Sangat Baik	A	78,30	72,80
33	Satuan Polisi Pamong Praja DIY	18,80	62,01	80,81	Sangat Baik	A	77,27	82,00
34	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandhala Sarta Tata Sasana) DIY	18,20	62,50	80,70	Sangat Baik	A	76,54	74,30
35	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY	18,80	61,74	80,54	Sangat Baik	A	74,66	70,50
36	Dinas Pariwisata DIY	16,20	62,53	78,73	Baik	BB	77,15	66,50
37	Badan Penanggulangan Bencana Daerah DIY	16,80	59,27	76,07	Baik	BB	71,24	72,70
28	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Energi Sumber Daya Mineral DIY	18,40	63,75	82,15	Sangat Baik	A	77,75	81,30

Keterangan:

No.	Kategori	Nilai/Angka	Predikat	Interpretasi
1.	AA	>90 – 100	Istimewa	Memenuhi kriteria sebagai organisasi berbasis kinerja yang mampu mewujudkan seluruh sasaran Reformasi Birokrasi
2.	A	>80 – 90	Sangat Baik	Memenuhi karakteristik organisasi berbasis kinerja namun belum mampu mewujudkan keseluruhan sasaran Reformasi Birokrasi baik secara instansional maupun di tingkat unit kerja.
3.	BB	>70 – 80	Baik	Secara instansional mampu mewujudkan Sebagian besar sasaran Reformasi Birokrasi, namun pencapaian sasaran pada tingkat unit kerja hanya sebagian kecil saja.
4.	B	>60 – 70	Cukup Baik	Penerapan Reformasi Birokrasi bersifat formal dan secara substansi belum mampu mendorong perbaikan kinerja organisasi.
5.	CC	>50 – 60	Cukup	Penerapan Reformasi Birokrasi secara formal terbatas di tingkat instansi dan belum berjalan secara merata di seluruh unit kerja.
6.	C	>30 – 50	Buruk	Penerapan Reformasi Birokrasi secara formal terbatas di tingkat instansi dan hanya mencakup sebagian kecil unit kerja.
7.	D	0 – 30	Sangat Buruk	Memiliki inisiatif awal, menerapkan Reformasi Birokrasi dan perbaikan kerja instansi belum terwujud.

Faktor Pendukung keberhasilan

- ✓ Ketersediaan dukungan regulasi dari Pemerintah Pusat yang memberikan cukup keleluasaan kepada Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk menata kelembagaan Perangkat Daerah sebagai salah satu kewenangan dalam urusan keistimewaan.
- ✓ Komitmen dan pemahaman yang semakin baik dari para stakeholder terkait implementasi Budaya Pemerintahan Satriya.
- ✓ Dukungan anggaran baik melalui APBD maupun Dana Keistimewaan, koordinasi dan kerjasama yang intensif dengan pemangku kepentingan, dan meningkatnya kapasitas dan kompetensi SDM aparatur pelaksana.

3.2 Efisiensi Anggaran

Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2022 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran disajikan pada tabel berikut:

Tabel III.8 Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung per Sasaran Tahun 2022

No	Sasaran	Indikator	Kinerja			Anggaran			Efisiensi
			Target (%)	Realisasi (%)	% Realisasi	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi	
1	Terfasilitasinya Kinerja Parampara Praja	meningkatnya kualitas pelayanan sekretariat kepada Parampara Praja	78	87,67	112,40	711.936.000	709.805.000	99,70	2.131.000
2	Meningkatnya kualitas implementasi urusan keistimewaan	rerata persentase capaian kinerja fisik dan keuangan program-program urusan keistimewaan	98,2	98,11	99,91	11.822.095.474	11.431.993.631	96,70	-
3	Terwujudnya kelembagaan perangkat daerah yang sesuai dengan kebutuhan dan	persentase kelembagaan yang efektif dan efisien	83	94,30	113,6	7.930.000.000	7.730.803.840	97,49	199.196.10

No	Sasaran	Indikator	Kinerja			Anggaran			Efisiensi
			Target (%)	Realisasi (%)	% Realisasi	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi	
	kemampuan daerah								
	Jumlah					16.134.803.400	14.964.632.525	92,75	445.471.550
	Program pendukung					6.956.530.806	6.891.365.334	99,06	
	Total Belanja Operasional					27.420.562.280	26.763.967.805	97,61	

Sumber: <http://sengguh.jogjaprovo.go.id/>, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Paniradya Kaistimewan DIY Th 2022, Laporan Keuangan Paniradya Kaistimewan DIY Th 2022

Berdasarkan tabel III.5 di atas capaian kinerja sasaran Paniradya Kaistimewan DIY masuk dalam kategori “**SANGAT BAIK**”, dimana sejumlah dua dari total tiga target terlampaui dengan realisasi anggaran capaian dari total belanja operasional program/kegiatan yang terkait langsung pencapaian sasaran sebesar Rp16.134.803.400,- , terealisasi Rp 14.964.632.525 atau 92,75% sehingga dapat dikatakan terdapat efisiensi Rp 445.471.550 atau 7,25 % yang bersumber dari:

- Sisa pengadaan barang dan jasa
- Efisiensi belanja perjalanan dinas
- Efisiensi honor narasumber

3.3 Inovasi

Tantangan global penyelenggaraan pemerintahan menuntut aparaturnya untuk bergerak dinamis dan kreatif. Permasalahan dan Keterbatasan sumber daya harus dipandang sebagai pemicu gagasan dan ide kreatif yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Maka inovasi yang telah dikembangkan dalam pencapaian sasaran kinerja antara lain:

Tabel III.9. Inovasi

No	Inovasi	Deskripsi
1	Data Bank Produk Hukum Urusan Kelembagaan	Didalamnya terdapat Data Base Produk produk hukum urusan kelembagaan
2	Sistem Informasi Perencanaan Kelembagaan (SINKEL)	Perencanaan Urusan Kelembagaan dan Urusan Tata Cara melalui link bit.ly (bit.ly/UrusanKelembagaanPerencanaan2022) dengan folder sesuai kebutuhan
3	bit.ly roadmap	Pengumpulan data penyusunan roadmap keistimewaan tahun 2022-2027(https://docs.google.com/spreadsheets/d/112rqcCu33C4E-W00CTyKWa1CKaHjwb7Y3wmVR-f3C2o/edit?usp=sharing)

4	Data Bank Perencanaan Urusan Tata Cara	di dalamnya terdapat dokumen perencanaan urusan tata cara tahun 2022 disertai dokumen pendukung/ RKA dan KAK. dapat di akses pada link berikut https://drive.google.com/drive/folders/1Qr8QS30YFOE9-CTeO-29UPh53G4E92VU
5	Sosialisasi Mekanisme Perencanaan Danais melalui Youtube	Sosialisasi mekanisme perencanaan danais sangat penting dilakukan untuk mempermudah OPD dalam merencanakan program dan kegiatan yang menggunakan dana keistimewaan
6	Pangripta Titis	Pangripta Titis merupakan panduan pengusulan dan penilaian program dan kegiatan keistimewaan yang terdiri dr regulasi, substantif dan teknis perencanaan, diharapkan dapat menjadi gambaran umum fokus pendanaan urusan keistimewaan dan pedoman bagi OPD baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota untuk menyusun program dan kegiatan urusan keistimewaan secara tepat, azas fungsi, waktu dan sasaran.
7	Film Ndilalah (Sosialisasi Aplikasi Pangripta)	Bagaimana cara mengusulkan kegiatan pembangunan melalui aplikasi Pangripta
8	MUSRENBANGDES-IS 2022	Musyawah Perencanaan Pembangunan Desa Urusan Keistimewaan (Musrenbangdes-Is) pada Desa Mandiri Budaya untuk menjaring usulan program dan kegiatan keistimewaan di kalurahan tahun 2024 dan pemantapan BKK Danais Tahun 2023.Â
9	FORUM ASPIRASI KEISTIMEWAAN 2022	Forum Aspirasi Keistimewaan 2022 sebagai wadah untuk menghimpun saran, masukan, arahan dan rekomendasi dari stakeholder terhadap langkah-langkah dan program kegiatan keistimewaan di DIY, sehingga Danais bisa berdampak untuk menyejahterakan masyarakat. Terutama terkait dengan pencapaian 1 Dasawarsa Kaistimewaan Yogyakarta.
10	Pembaharuan Perubahan Dana Keistimewaan TA 2022	Usulan Perubahan dilakukan untuk memperbarui program dan kegiatan yang ada pada anggaran murni, perubahan dapat berupa penambahan maupun pengurangan anggaran, maupun penambahan program kegiatan atau perubahan tollok ukur kinerjanya.
11	Papan Pustaka	Penyediaan bahan pustaka/dokumen/arsip yang disusun sesuai tema untuk mempermudah pencarian
12	Pembuatan Google Drive	Untuk menyampaikan bahan rekomendasi baik dari Asisten TA Parampara sehingga setiap anggota Parampara bisa melihat dan mencermati masing masing dokumen bahan kajian rekomendasi
13	Hybrid Meeting	Penggabungan pelaksanaan meeting secara luring dan daring
14	Parampara Praja Blusukan	Blusukan merupakan salah satu upaya Parampara Praja melihat kondisi riil di masyarakat
15	Aplikasi SASMITA	Aplikasi SASMITA (SArana Manajemén dokumenTasi Program Anggaran dan Pelaporan) adalah aplikasi sederhana yang diciptakan untuk menyimpan dokumen dan data Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan di lingkup lokal yaitu pada Sub Bagian Umum Paniradya Kaistimewan
16	Google Sheet	Pemanfaatan google sheet dalam mengumpulkan data dari bidang-bidang yang diperlukan terkait perencanaan
17	Bank data telegram	Memanfaatkan telegram dalam menyimpan data karena Telegram memiliki ruang penyimpanan yang besar, dapat mengirim file ukuran besar, dan file yang dilihat tidak otomatis masuk ke dalam ruang penyimpanan PC/Handphone sehingga menghemat ruang penyimpanan device

18	bitly arsip	Database Online untuk arsip SPJ
19	PANIRADYA MIDANGET	Paniradya Midanget merupakan salah satu inovasi program kegiatan dari Paniradya Kaistimewan. Konten ini dibuat untuk mendengarkan aspirasi masyarakat baik melalui media sosial maupun audiensi secara langsung. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh masyarakat akan dijawab langsung oleh Paniradya Pati Kaistimewan dan diunggah melalui media sosial Paniradya Kaistimewan (Instagram/ Youtube).
20	Penerjemah Bahasa Isyarat Podcast Rembag Kaistimewan	Dalam rangka kegiatan yang responsif gender dan untuk mengakomodir orang berkebutuhan khusus, Podcast Rembag Kaistimewan menghadirkan penerjemah tuna rungu dengan menggunakan terjemahan melalui bahasa isyarat, sehingga mempermudah komunikasi dan isi dari pembahasan Podcast Rembag Kaistimewan juga dapat dinikmati oleh teman-teman kaum difabel.
21	REGOL BREGADA TRENGGINAS	REGOL BREGADA TRENGGINAS (Rerasan Golek Solusi Berdayakan Warga Daerah Istimewa Yogyakarta Secara Terintegrasi dan Aspiratif dengan Dana Keistimewaan merupakan sebuah inovasi dari Paniradya Kaistimewan yang mempunyai tujuan guna penyebarluasan informasi keistimewaan bagi masyarakat. Apa yang sudah dilaksanakan dan kondisinya seperti apa dapat diketahui masyarakat, sehingga dapat dilakukan metode amati, tiru dan menyempurnakan apa yang sudah dilakukan dengan Dana Keistimewaan.
22	PAK BREGAS	Pak Bregas merupakan salah satu program kegiatan dari Paniradya Kaistimewan. Kepanjangan dari Pak Bregas itu sendiri adalah Paniradya Kaistimewan Bregas. Bregas sendiri diambil dari Bahasa Jawa yang berarti sehat atau lincah. Adapun tujuan dari program ini adalah agar seluruh elemen pegawai yang ada di Paniradya Kaistimewan bisa meningkatkan kebugaran tubuh, menjaga stamina, dan meningkatkan kekompakan dalam bekerja.
23	Google Sheet BKU	Pemanfaatan google sheet dalam mengumpulkan data BKU dari bidang-bidang untuk diinput ke dalam SIPD Penatausahaan
24	Lik Warti Urusan Tata Ruang (Tilik Warga Keistimewaan Urusan Tata Ruang)	Kegiatan monev dan tinjauan lapangan program/kegiatan dana keistimewaan urusan tata ruang Tahun Anggaran 2022
25	Pembuatan Integrated E-Database Monitoring dan Evaluasi Capaian Keistimewaan Urusan Pertanahan	Didalamnya terdapat basis data realisasi capaian kegiatan pengelolaan, pemanfaatan, dan pengadaan sarana prasarana urusan keistimewaan dari tahun 2013-2021. Basis data dapat diakses darimana saja dan kapan saja
26	Data Bank Laporan Pelaksanaan Kegiatan Urusan Tata Ruang	Sebuah media/tempat untuk mengupload berbagai laporan hasil pelaksanaan kegiatan beserta dokumentasi urusan tata ruang
27	Lik Warti Kegiatan BKK Kalurahan Urusan Pertanahan (BKK Kalurahan Pertanian Bawang Merah) - Kaluraha	BKK Kalurahan diperuntukan untuk kalurahan miskin yang ada di DIY agar dapat mengolah tanah kas desa dengan tanaman produktif sesuai dengan potensi yang dimiliki dan hasilnya dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan petani pengolahnya.
28	Data Bank Monev Urusan Kelembagaan	Didalamnya terdapat dokumen monev urusan tata cara tahun 2022 disertai dokumen pendukung/ laporan ringkas dan foto kegiatan. dapat dikses pada link

		berikut https://drive.google.com/drive/folders/1b8gtlll1P1GAzXG_I0F1Zbc9771PTVe5
29	LEKWARTI Urusan Kelembagaan	Monitoring dan Evaluasi Urusan Kelembagaan ke Kapanewon dan Kalurahan
30	Sistem Informasi Monev Kelembagaan Dais (SIMKIS)	Pengumpulan laporan dan dokumen pendukung Urusan Kelembagaan dan Urusan Tata Cara melalui link bit.ly (https://bit.ly/monevkelembagaan) dengan folder sesuai kebutuhan
31	Data Bank Urusan Kelembagaan	Didalamnya terdapat data base materi materi rapat urusan kelembagaan
32	Program Lik Warti (Tilik Warga Istimewa)	Lik Warti merupakan kegiatan pengendalian urusan kebudayaan melakukan peninjauan lapangan s.d Kalurahan penerima dais untuk mengetahui progress perkembangan kegiatan Keistimewaan
33	Video pendek kegiatan pelaksanaan Keistimewaan urusan kebudayaan tahun 2022	Video berupa dokumentasi pelaksanaan kegiatan yang didanai oleh dana Keistimewaan sebagai sarana publikasi ke masyarakat melalui link bit.ly/LaporanKegiatanVerifikasiTahapAkhir2022
34	Monitoring evaluasi BKK Dana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	Kegiatan ini merupakan program untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan yang didanai dengan Dais di setiap OPD baik di OPD DIY, Kabupaten/Kota, maupun kalurahan
35	Pemakaian link googledrive untuk mengunggah laporan kegiatan pelaksanaan dana Keistimewaan urusan ke	Link bit.ly/LaporanKegiatanVerifikasiTahapAkhir dibuat agar OPD pengampu dais dapat mengunggah setiap laporan kegiatan yang sudah terlaksana sehingga mempermudah pengecekan pada saat pelaksanaan verifikasi
36	Optimalisasi penggunaan media elektronik dalam Pengawasan Monev Dana Keistimewaan	Menggunakan Aplikasi Web-Based Microsoft OneDrive
37	Pembuatan Menu Verifikasi	Pembuatan menu verifikasi pada web Kenes untuk menunjang kinerja terutama pada saat verifikasi tahapan pelaksanaan dana keistimewaan DIY dengan kementerian
38	Pembuatan Dashboard	Pembuatan Dashboard pada aplikasi Kenes yang berfungsi sebagai bentuk infografis mengenai anggaran dan realisasi program dan kegiatan Dana Keistimewaan TA 2022
39	Pendampingan aplikasi kenes	Pendampingan aplikasi kenes untuk OPD baru pengampu dana keistimewaan dan kementren serta kapanewon
40	Data Bank Materi Rapat Kerja Urusan Tata Ruang	Sebuah media/tempat untuk mengupload berbagai materi paparan narasumber rapat kerja urusan tata ruang
41	Pak Radji Kegiatan BKK Kalurahan Urusan Pertanian (BKK Kalurahan Pertanian Surjan) Kab. Kulon Progo	Pertanian dengan model surjan mengacu pada morfologi dari lahan sawah yang jika dilihat dari atas seperti baju surjan yang biasa dipakai orang Jawa tempo dulu. Alur yang rendah atau yang bersifat akuatik ditanami padi, sedangkan di bagian alur tinggi atau guludan yang bersifat kering ditanami dengan palawija. Sistem pertanian surjan merupakan bentuk adaptasi masyarakat petani di Kulon Progo terhadap topografi rendah dan mudah tergenang air. Selain itu pertanian sistem surjan mengandung nilai-nilai kearifan lingkungan yang berusaha dijaga oleh masyarakat petani, seperti pengendalian populasi hama kepinding, terjaganya komponen hayati yang saling berinteraksi sehingga ekosistem lebih terjaga dan stabil.
42	Pengembangan Sistem Data dan Informasi	Pengembangan Sistem Data dan Informasi Urusan Tata Ruang berbasis WEBGIS ini didasarkan pada pengelolaan database terkait

	berbasis WEBGIS Urusan Tata Ruang	program dan kegiatan pemanfaatan dana keistimewaan urusan tata ruang. Data yang sistematis ini akan disajikan secara menarik dan terintegrasi. Melalui sistem berbasis WEBGIS ini, Pemerintah (OPD) maupun masyarakat akan mudah mendapatkan informasi atau insight terkait pemanfaatan dana keistimewaan khususnya dalam urusan tata ruang yang berupa realisasi, progress bahkan rencana program dan kegiatan secara lengkap dan up-to-date.
43	Penyiapan Database Izin Pemanfaatan Tanah Desa di Kabupaten/Kota	Database terkait izin pemanfaatan tanah desa yang ada di Kabupaten dan Kota. Data yang tersedia berupa izin pemanfaatan tanah desa yang telah dikeluarkan oleh Panitikismo, termasuk lokasi tanah, luasan, jenis persil tanah, lama pemberian izin pemanfaatan tanah, pengguna tanah desa dan tujuan pemanfaatan tanah desa.
44	Takon Pangripta	Kegiatan ini merupakan program untuk mengkaji lebih rinci usulan perencanaan setiap OPD baik di OPD DIY maupun Kabupaten/Kota
45	Buku Sosialisasi dan Edukasi Keistimewaan DIY	Buku sosialisasi dan edukasi Keistimewaan DIY berisikan apresiasi, dukungan, dan beberapa masukan ide program-program dari masyarakat dalam rangka mensosialisasikan dan mempublikasikan kepada masyarakat.
46	Pak Radji (Paniradya Kolaborasi Dadi Siji)	Pak Radji ini merupakan salah satu bentuk wadah kegiatan urusan kebudayaan lintas sektor antara Paniradya, OPD DIY s.d Kalurahan serta masyarakat dalam upaya sharing diskusi tentang Keistimewaan Yogyakarta.
47	Google Drive RKA Urusan Kebudayaan	Google Drive sebagai media untuk sharing dan penyimpanan RKA oleh stakeholders Paniradya Urusan Kebudayaan.
48	Google Sheet	Pemanfaatan google sheet dalam mengumpulkan data dari bidang-bidang yang diperlukan terkait penyusunan RKA, DPA

3.4 Lintas Sektor

Dalam rangka mendukung penyelenggaraan pembangunan di Daerah Istimewa Yogyakarta yang bersifat lintas sektoral agar berdaya dan berhasil guna untuk kesejahteraan masyarakat maka Paniradya Kaistimewan DIY sebagaimana cascading kinerja pada gambar 1.1 dan mandat kinerja sebagaimana tergambar pada gambar 1.2 melaksanakan optimalisasi lintas sektor. Silang Manajemen Kolaboratif Lintas Sektor tersebut dilaksanakan berlandaskan Instruksi Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 9/INSTR/2022 tentang Silang Manajemen Kolaboratif Lintas Sektor Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Optimalisasi kinerja Silang Manajemen Kolaboratif Lintas Sektor merupakan salah satu faktor pendukung Paniradya Kaistimewan DIY dalam mencapai target kinerja yang telah ditentukan ditengah kondisi *Refocusing* dan realokasi anggaran untuk pemulihan ekonomi dan kesehatan dari dampak *pandemic* COVID-19. Inventarisasi Lintas Sektor Paniradya Kaistimewan DIY adalah sebagai berikut:

Tabel III.10 Inventarisasi Lintas Sektor Paniradya Kaistimewan DIY

No	Kegiatan Lintas Sektor	KONTRIBUSI PARA PIHAK		OUTPUT DAN KELOMPOK SASARAN		MANFAAT BAGI OPD DAN MANFAAT BAGI KELOMPOK SASARAN
		PIHAK	KONTRIBUSI	KELUARAN	KELOMPOK SASARAN	
1	Perencanaan dan Pengendalian Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Tata Cara; Perencanaan dan Pengendalian Keistimewaan Urusan Kebudayaan; Perencanaan dan Pengendalian Keistimewaan Urusan Pertanahan dan Tata Ruang Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Keistimewaan; Sarana dan Prasarana Keistimewaan	Biro Perekonomian BIRO ORGANISASI KAB/KOTA Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY Biro Umum, Humas dan Protokol Dinas Sosial DIY Dinas Pendidikan dan Olahraga DIY DINPAR KAB/KOTA Kementerian Komunikasi dan Informatika Dinas Kelautan dan Perikanan DIY, Kab, Kota Biro Tata Pemerintahan Setda DIY Bank Indonesia Kanwil DIY Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kab Biro Organiasai Setda DIY Dinas Pariwisata DIY Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Badan Penanggulangan dan Bencana Daerah DIY Otonomi Khusus dan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri RI Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kementerian Keuangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY Taman Budaya Yogyakarta Sekertariat Bersama DIY Direktur Penataan Daerah	Perumusan Kebijakan : TRIWULAN I 1. Perubahan Pergub Penugasan Urusan Keistimewaan 2. Penyusunan Roadmap Kegiatan Keistimewaan Urusan Kelembagaan 2022-2027 3. Optimalisasi dan sinergisitas pemanfaatan penataan ruang 4. BKK ke Kalurahan Urusan Pertanian 5. Kerjasama lintas sektor dengan OPD dan TAPD DIY dalam rangka Penyusunan Usulan program dan kegiatan keistimewaan yang terbentuk dalam Tim Perencanaan keistimewaan 6. Kerjasama lintas sektor dengan Kementerian Pusat dalam dalam rangka penyusunan dan penilaian Usulan program dan kegiatan keistimewaan yang terbentuk dalam Tim Penilaian Kelayakan 7. Kerjasama lintas sektor dengan OPD DIY dalam rangka arahan pelaksanaan arahan program, kegiatan, sub-kegiatan Dana keistimewaan TA 2022 kepada Kalurahan 8. Kerjasama lintas sektor dengan OPD dan TAPD DIY dalam rangka monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan urusan kebudayaan dalam rangka persiapan verifikasi Tahap I tahun 2022 9. Kerjasama lintas sektor dengan Kementerian Pusat dalam dalam rangka monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan urusan kebudayaan dalam rangka persiapan verifikasi Tahap I tahun 2022 10. Kerjasama lintas sektor dalam memberikan informasi terkait keistimewaan/ penyebarluasan informasi keistimewaan 11. Kerjasama lintas sektor dalam menggali informasi atau inventarisasi permasalahan melalui audiensi dengan komunitas masyarakat 12. Rekomendasi kepada gubernur DIY 13. Kerjasama lintas sektor dengan OPD di Pemda DIY (Bappeda DIY, Dinas Lingkungan Hidup DIY). TRIWULAN II	Terlaksananya Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Tata Cara dan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Tata	41 Lembaga Yang terdiri dari: OPD Mitra Urusan Keistimewaan, baik Pusat, Daerah maupun Kabupaten Kota	Bagi OPD: 1. Mendukung pencapaian kinerja Tujuan RPJMD Terwujudkan Reformasi Tata Kelola Pemerintahan yang baik (good government) 2. Mendukung pencapaian kinerja Program Pembangunan Daerah Sinergitas Tata kelola Pemerintahan 3. Mendukung pencapaian kinerja sasaran Paniradya Kaistimewan

No	Kegiatan Lintas Sektor	KONTRIBUSI PARA PIHAK		OUTPUT DAN KELOMPOK SASARAN		MANFAAT BAGI OPD DAN MANFAAT BAGI KELOMPOK SASARAN
		Dinas Kebudayaan DIY Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY Biro Hukum Setda DIY Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk DIY Bappenas RI BPS DIY PU ESDM DIY Badan Penghubung Daerah DIY DISHUB DIY Museum Negeri Sonobudoyo Dinas Koperasi dan UKM DIY Bappeda DIY SATPOL PP DIY Dinas PU ESDM Ditjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri RI Akademisi BPKA DIY	1. Penyusunan Roadmap Kegiatan Keistimewaan Urusan Kelembagaan 2022-2027 (Penyusunan Rencana Aksi) 2. FGD Implementasi Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Untuk Mendukung Keistimewaan DIY 3. FGD Penilaian kelayakan usulan perubahan pertama program dan kegiatan keistimewaan TA 2022 4. Raker Verifikasi Pelaksanaan Program Kegiatan Dana Keistimewaan Tahap 1 2022 5. Raker Verifikasi Pelaksanaan Program Kegiatan Dana Keistimewaan Tahap 1 TA 2022 Kota Yogyakarta 6. Raker Verifikasi Pelaksanaan Program Kegiatan Dana Keistimewaan Tahap 1 TA 2022 Kabupaten Sleman 7. Raker Verifikasi Pelaksanaan Program Kegiatan Dana Keistimewaan Tahap 1 TA 2022 Kabupaten Bantul 8. Raker Verifikasi Pelaksanaan Program Kegiatan Dana Keistimewaan Tahap 1 TA 2022 Kabupaten Kulonprogo 9. Raker Verifikasi Pelaksanaan Program Kegiatan Dana Keistimewaan Tahap 1 TA 2022 Kabupaten Gunung Kidul 10. Kerjasama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika terkait penayangan konten-konten Paniradya Kaistimewan terutama di chanel Youtube Paniradya Kaistimewan 11. Audiensi dengan masyarakat mengenai isu terkini tentang keistimewaan DIY, baik melalui media sosial Paniradya Kaistimewan (Youtube, Instagram, Twitter, TikTok, dan website) maupun bersurat dan datang langsung 12. Kerjasama dengan Sekertariat Bersama DIY 13. FGD Parampara Praja terkait kemiskinan 14. FGD Optimalisasi Pemanfaatan Dana Keistimewaan untuk Mengatasi Isu Isu Kontemporer 15. FGD Penyusunan Bahan Perencanaan Keistimewaan DIY 16. Talkshow Optimalisasi Pemanfaatan Taman Budaya 17. Talkshow Padat Karya Penerapan Tata Nilai Semangat Keyogyakartaan TRIWULAN III 1. FGD Pra Pembahasan Usulan Program/Kegiatan Keistimewaan Urusan Tata Ruang Tahun 2022 2. Penyusunan Roadmap Kegiatan Keistimewaan Urusan Kelembagaan 2022-2027 3. BKK ke Kalurahan Urusan Pertanahan 4. MUSRENBANGKAL-IS DESA MANDIRI BUDAYA (8 Kalurahan) 5. FORUM ASPIRASI KEISTIMEWAAN TA 2022			

No	Kegiatan Lintas Sektor	KONTRIBUSI PARA PIHAK		OUTPUT DAN KELOMPOK SASARAN		MANFAAT BAGI OPD DAN MANFAAT BAGI KELOMPOK SASARAN
			6. FGD Penilaian kelayakan usulan perubahan kedua program dan kegiatan keistimewaan TA 2022 7. Raker Verifikasi Pelaksanaan Program Kegiatan Dana Keistimewaan Tahap 1 TA 2022 BKK Kalurahan 8. Pencermatan Usulan Perubahan Tahap II TA 2022 Urusan Kebudayaan 9. Talkshow TV Lokal dengan tema " Desa Mandiri Pangan sebagai Perwujudan Ketahanan Pangan 10. BKK ke Kalurahan Urusan Kebudayaan 11. Peringatan Satu Dasawarsa Keistimewaan DIY 12. Lanjutan FGD Kemiskinan 13. Kunjungan ke BPS dan Bank Indonesia Perwakilan DIY TRIWULAN IV 1. Koordinasi Penyusunan Rencana Usulan Kebutuhan Dana keistimewaan TA 2014 bersama Koordinator Urusan Keistimewaan, TAPD, Kementerian Keuangan, OPD Pelaksana Danais, DIY, Kab Kota, Kalurahan 2. Analisa Dampak Keistimewaan terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Isu Kemiskinan 3. Perencanaan Prgram dan Kegiatan 2022-2027 4. Anaiisa Ekonomi Pariwisata 5. Penanganan Kemiskinan dengan aspek keistimewaan 6. FGD Monitoring Kegiatan Keistimewaan Urusan Tata Ruang Sebagai Dasar Penilaian Penyesuaian Program/Kegiatan Keistimewaan Urusan Tata Ruang Tahun Anggaran 2023 7. Kajian Evaluasi Penataan Kelembagaan Asli 8. FGD Monitoring Kegiatan Keistimewaan Urusan Kelembagaan Sebagai Dasar Penyesuaian Program/Kegiatan Keistimewaan Urusan Kelembagaan Tahun Anggaran 2023 dan 2024 9. Penandatanganan Berita Acara BKK Program dan kegiatan Dana keistimewaan TA 2023 kepada Kalurahan 10. Raker Verifikasi Pelaksanaan Program Kegiatan Dana Keistimewaan Tahap 2 2022 11. Raker Verifikasi Pelaksanaan Program Kegiatan Dana Keistimewaan Tahap 3 2022 12. FGD Pembahasan Usulan Perencanaan Kegiatan Desa Mandiri Budaya Tahun 2023 13. FGD Arahan dan Kebijakan Perencanaan Keistimewaan Urusan Kebudayaan tahun 2024 14. FGD Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Urusan Kebudayaan dalam rangka persiaan laporan tahap 3 tahun 2022			

No	Kegiatan Lintas Sektor	KONTRIBUSI PARA PIHAK		OUTPUT DAN KELOMPOK SASARAN		MANFAAT BAGI OPD DAN MANFAAT BAGI KELOMPOK SASARAN
			15. Penguatan Branding dan menggaungkan nuansa Keistimewaan DIY melalui pembuatan Jingle/ Lagu/ Gendhing Keistimewaan DIY; 16. Peringatan Mangayubagya Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY; 17. Inovasi penyebarluasan informasi keistimewaan dalam kemasan baru yang lebih santai diiringi dengan dagelan yaitu Rerasan Golek Solusi (REGOL) yang tayang secara live streaming di Youtube Channel Paniradya Kaistimewan; 18. Inovasi Youtube Channel baru milik Paniradya Kaistimewan yaitu REGOL BREGADA TRENGGINAS, untuk menguatkan informasi dan berisi tentang testimoni kegiatan program/ kegiatan Dana Keistimewaan yang langsung disampaikan oleh penerima manfaat 19. FGD/Raker Reformasi Birokrasi 20. FGD/Raker Reformasi Kalurahan 21. FGD/Raker Pertanahan Pelaksanaan : TRIWULAN I Perubahan Pergub Penugasan Urusan Keistimewaan (tindak lanjut kegiatan tahun lalu) 1. -Paniradya Kaistimewan sebagai fasilitator pembahasan - Biro Hukum menindaklanjuti permohonan rekomendasi kepada Kemendagri - Biro Organisasi, Dinas Kebudayaan dan Dinas PTR memberikan masukan terhadap catatan Kemendagri 2. Anggaran: - 3. Keluaran yang dihasilkan : Pergub Perubahan Penugasan Urusan Keistimewaan Penyusunan Roadmap Kegiatan Keistimewaan Urusan Kelembagaan 2022-2027 1. -Paniradya Kaistimewaan sebagai perencana dan fasilitator pembahasan - Biro Organisasi dan Bappeda DIY sebagai pengarah dan pembahas - Bappeda Kab/kota dan Bagian Organisasi Kab sebagai pemberi masukan 2. Anggaran : Rp 60.000.000, SDM : 40 orang 3. Keluaran yang dihasilkan : Roadmap Kegiatan Keistimewaan Urusan Kelembagaan 2022-2027 Optimalisasi dan sinergisitas pemanfaatan penataan ruang			

No	Kegiatan Lintas Sektor	KONTRIBUSI PARA PIHAK	OUTPUT DAN KELOMPOK SASARAN	MANFAAT BAGI OPD DAN MANFAAT BAGI KELOMPOK SASARAN
		1. - Paniradya: sebagai perencana dan pengarah strategi kebijakan - DPTR DIY: sebagai koordinator pelaksana kegiatan urusan tata ruang - OPD pengampu urusan tata ruang: sebagai penerima manfaat dan pelaksana kegiatan 2. Anggaran: 348.210.129.000. SDM: 100 orang 3. Keluaran yang dihasilkan: pemanfaatan ruang yang sesuai dengan dokumen perencanaan yang telah disusun dan dapat bermanfaat untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat BKK ke Kalurahan Urusan Pertanahan 1. -Paniradya: sebagai fasilitator dan perencana - DPTR DIY: sebagai verifikator pendampingan dan Monitoring evaluasi - DPTR Kabupaten: sebagai pendamping dan monitoring evaluasi - Kalurahan: sebagai penerima manfaat dan pelaksana kegiatan 2. Anggaran: Rp 300.000.000. SDM: 40 orang 3. Keluaran yang dihasilkan: pemanfaatan tanah kas desa untuk peningkatan fungsi pertanian sebagai upaya membantu pengentasan kemiskinan Kerjasama lintas sektor dengan OPD dan TAPD DIY dalam rangka Penyusunan Usulan program dan kegiatan keistimewaan yang terbentuk dalam Tim Perencanaan keistimewaan Kerjasama lintas sektor dengan Kementerian Pusat dalam rangka penyusunan dan penilaian Usulan program dan kegiatan keistimewaan yang terbentuk dalam Tim Penilaian Kelayakan Kerjasama lintas sektor dengan OPD DIY dalam rangka arahan pelaksanaan arahan program, kegiatan, sub-kegiatan Dana keistimewaan TA 2022 kepada Kalurahan Peran : 1. OPD dan TAPD DIY : Pelaksana dalam penyusunan Usulan Program dan Kegiatan Dana Keistimewaan 2. Pemerintah Pusat : Memberikan Arahan dan penilaian dalam penyusunan usulan program dan kegiatan Dana Keistimewaan 3. OPD DIY : Memberikan arahan kepada kalurahan dalam pelaksanaan Program, kegiatan, Subkegiatan Dana Keistimewaan TA 2022 Anggaran : 1. Tim Perencanaan Keistimewaan Rp 202.500.000 Jumlah SDM : 52		

No	Kegiatan Lintas Sektor	KONTRIBUSI PARA PIHAK		OUTPUT DAN KELOMPOK SASARAN		MANFAAT BAGI OPD DAN MANFAAT BAGI KELOMPOK SASARAN
			2. Tim Penilaian Kelayakan Rp 56.500.000 Jumlah SDM : 17 3. Narasumber alam rangka Arahan Pelaksanaan Program, kegiatan, Subkegiatan Dana Keistimewaan TA 2022 kepada Kalurahan Rp 3.400.000 Jumlah SDM : 4 Keluaran : 1. Usulan Program dan kegiatan Dana Keistimewaan TA 2023 2. Usulan perubahan pertama Program dan kegiatan Dana Keistimewaan TA 2022 3. Usulan BKK Kalurahan TA 2022 Kerjasama lintas sektor dengan OPD dan TAPD DIY dalam rangka monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan urusan kebudayaan dalam rangka persiapan verifikasi Tahap I tahun 2022 Kerjasama lintas sektor dengan Kementerian Pusat dalam dalam rangka monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan urusan kebudayaan dalam rangka persiapan verifikasi Tahap I tahun 2022 Peran Paniradya : memberikan dukungan anggaran melalui alokasi dana Keistimewaan OPD : memberikan informasi mengenai alokasi penggunaan dana Keistimewaan tahun 2022 Kementrian Pusat : memberikan dukungan, memaparkan materi serta melaksanakan diskusi dan memberikan simpulan Anggaran 1. Narasumber Pusat Rp. 4.800.000 2. Narasumber lokal Rp.3.000.000 Jumlah SDM : 4 orang Keluaran : Laporan Pelaksanaan Kegiatan Dana Keistimewaan Urusan Kebudayaan Tahap I Tahun 2022 Kerjasama lintas sektor dalam memberikan informasi terkait keistimewaan/ penyebarluasan informasi keistimewaan Kerjasama lintas sektor dalam rangka menggali informasi atau inventarisasi permasalahan melalui audiensi dengan komunitas			

No	Kegiatan Lintas Sektor	KONTRIBUSI PARA PIHAK		OUTPUT DAN KELOMPOK SASARAN		MANFAAT BAGI OPD DAN MANFAAT BAGI KELOMPOK SASARAN
			masyarakat Paniradya: fasilitasi anggaran dan sarana prasarana OPD lain: Mendukung dalam memberikan informasi/sosialisasi terkait program kegiatan yang berada di OPD ybs yang didanai Dana Keistimewaan Penerima manfaat Dana Keistimewaan: Deskripsi manfaat dari realisasi Dana Keistimewaan yang dirasakan langsung oleh masyarakat Anggaran: Rp 1.554.600.000 Jumlah SDM: 11 orang Keluaran: Konten informasi keistimewaan DIY yang terpublikasi kepada masyarakat (5 media) Rekomendasi kepada gubernur DIY Kerjasama lintas sektor dengan OPD di Pemda DIY (Bappeda DIY, Dinas Lingkungan Hidup DIY). Peran Paniradya : memberikan fasilitasi anggaran melalui alokasi dana Keistimewaan OPD : memberikan input mengenai pelaksanaan keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Anggaran Anggaran yang digunakan sebesar : Rp. 129.000.000,00 Jumlah SDM : 11 orang Keluaran : Rekomendasi kepada gubenrur DIY TRIWULAN II Penyusunan Roadmap Kegiatan Keistimewaan Urusan Kelembagaan 2022-2027 1. -Paniradya Kaistimewaan sebagai perencana dan fasilitator pembahasan - Biro Organisasi dan Bappeda DIY sebagai pengarah dan pembahas - Bappeda Kab/kota dan Bagian Organisasi Kab sebagai pemberi masukan			

No	Kegiatan Lintas Sektor	KONTRIBUSI PARA PIHAK		OUTPUT DAN KELOMPOK SASARAN		MANFAAT BAGI OPD DAN MANFAAT BAGI KELOMPOK SASARAN
			2. Anggaran : Rp 100.000.000, SDM : 40 orang 3. Keluaran yang dihasilkan : Roadmap Kegiatan Keistimewaan Urusan Kelembagaan 2022-2027 FGD Implementasi Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Untuk Mendukung Keistimewaan DIY 1. -Paniradya Kaistimewaan sebagai fasilitator pembahasan -DPTR DIY sebagai fasilitator dan pendamping penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) untuk kabupaten -Kementerian ATR/BPN dan Kemendagri RI sebagai pengarah dan pemberi masukan 2. Anggaran: Rp 20.000.000, SDM: 40 orang 3. Keluaran yang dihasilkan: Saran dan masukan sebagai bahan penyusunan RDTR FGD Optimalisasi Pemanfaatan Dana Keistimewaan untuk Mengatasi Isu Isu Kontemporer 1. Paniradya selaku fasilitator, pengarah kebijakan 2. OPD DIY dan Kab/Kota serta 392 Kelurahan di DIY : mengikuti dan memberikan tanggapan dan usulan-usulan terkait Pemanfaatan Dana Keistimewaan untuk Mengatasi Isu-isu Kontemporer OPD DIY: Dinas Pertanahan Dan Tata Ruang Biro Tata Pemerintahan Setda Biro Hukum Setda Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Dinas Perhubungan Dinas Kelautan dan Perikanan Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Biro Umum Humas Protokol Balai Pengembangan Teknologi Tepat Guna (Dinas Perindustrian dan Pangan) Balai Latihan Pendidikan Teknik (Dikpora) Dinas Kebudayaan Taman Budaya Yogyakarta Museum Sonobudoyo Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Dinas Komunikasi dan Informatika			

No	Kegiatan Lintas Sektor	KONTRIBUSI PARA PIHAK		OUTPUT DAN KELOMPOK SASARAN		MANFAAT BAGI OPD DAN MANFAAT
			Dinas Perindustrian dan Pangan Badan Penghubung Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Dinas Pariwisata Dinas Kesehatan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Dinas Sosial Badan Penanggulangan Bencana Daerah Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Satuan Polisi Pamong Praja Biro Administrasi Perekonomian dan SDA Setda Sekretariat DPRD Bappeda Paniradya Kaistimewan Badan Kepegawaian Daerah Badan Pendidikan dan Pelatihan Biro Organisasi Setda OPD Kota: Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta UPT Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya Kota Yogyakarta Kemantren Gedong Tengen Kemantren Kotagede Kemantren Tegalrejo Bagian Organisasi Setda Kota Yogyakarta Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Yogyakarta OPD Kab Bantul: Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul Dinas Pengendalian penduduk, KB dan PMD Kabupaten Bantul Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,			BAGI KELOMPOK SASARAN

No	Kegiatan Lintas Sektor	KONTRIBUSI PARA PIHAK		OUTPUT DAN KELOMPOK SASARAN		MANFAAT BAGI OPD DAN MANFAAT BAGI KELOMPOK SASARAN
			Pengendalian penduduk Kabupaten Bantul Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan perdagangan Kabupaten Bantul Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Bantul Bagian Hukum Setda Kabupaten Bantul Bagian Organisasi Setda Kabupaten Bantul Bappeda Kabupaten Bantul Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Bantul Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Bantul Kapanewon Banguntapan Kapanewon Bantul Kapanewon Dlingo Kapanewon Imogiri Kapanewon Jetis Kapanewon Kasihan Kapanewon Pleret Kapanewon Sedayu Kapanewon Sewon Kapanewon Bambanglipuro Kapanewon Kretek Kapanewon Pajangan Kapanewon Pandak Kapanewon Piyungan Kapanewon Pundong Kapanewon Sanden Kapanewon Srandakan OPD Kab Kulon Progo: Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Kulon Progo Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Kulon Progo Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kulon Progo Dinas Kebudayaan Kabupaten Kulon Progo Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kulon Progo Dinas Pariwisata Kabupaten Kulon Progo Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kulon Progo Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo			

No	Kegiatan Lintas Sektor	KONTRIBUSI PARA PIHAK		OUTPUT DAN KELOMPOK SASARAN		MANFAAT BAGI OPD DAN MANFAAT BAGI KELOMPOK SASARAN
			Bappeda Kabupaten Kulon Progo Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kulon Progo Bagian Organisasi Setda Kabupaten Kulon Progo Inspektorat Daerah Kabupaten Kulon Progo Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kulon Progo Bagian Administrasi Pemerintahan Setda Kabupaten Kulon Progo OPD Kab Gunungkidul: Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Gunungkidul Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Kabupaten Gunungkidul Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gunungkidul Dinas Perhubungan Kabupaten Gunungkidul Bappeda Kabupaten Gunungkidul Dinas Kebudayaan Kabupaten Gunungkidul Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gunungkidul Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul Dinas Perdagangan Kabupaten Gunungkidul Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil d Kabupaten Gunungkidul Dinas Menengah dan Tenaga Kerja Dinas Sosial Kabupaten Gunungkidul Bagian Organisasi Setda Kabupaten Gunungkidul Bagian Hukum dan HAM Setda Kabupaten Gunungkidul DPMKP2KB (Semula P3KBPM) Kabupaten Gunungkidul BKPPD (UPT Badan Diklat Pegawai) Kabupaten Gunungkidul Kapanewon Wonosari Kapanewon Nglipar Kapanewon Playen Kapanewon Patuk Kapanewon Paliyan Kapanewon Panggang Kapanewon Tepus Kapanewon Semanu Kapanewon Karangmojo Kapanewon Ponjong Kapanewon Rongkop Kapanewon Semin Kapanewon Gedangsari Kapanewon Saptosari Kapanewon Giriuburo Kapanewon Tanjungsari			

No	Kegiatan Lintas Sektor	KONTRIBUSI PARA PIHAK		OUTPUT DAN KELOMPOK SASARAN		MANFAAT BAGI OPD DAN MANFAAT BAGI KELOMPOK SASARAN
			Kapanewon Purwosari OPD Kab Sleman: Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sleman Dinas Kebudayaan Kabupaten Sleman Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sleman Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman Bappeda Kabupaten Sleman Bagian Organisasi Setda Kabupaten Sleman BKPP Kabupaten Sleman Dinas PMK Kabupaten Sleman Kementerian keuangan RI: memberikan arahan dan materi terkait pemanfaatan danais dalam mengatasi isu2 kontemporer 2. Sejumlah Rp 4.350.000 (Makan+ minum dan honor narasumber) 3. Keluaran yang dihasilkan : Masukan Ide ide kreatif dan inovasi usulan menggali kebudayaan dalam isu isu kontemporer FGD Penilaian kelayakan usulan perubahan pertama program dan kegiatan keistimewaan TA 2022 Peran: 1. Paniradya: Memfasilitasi pelaksanaan FGD, mengkoordinir dan mengadministrasi usulan-usulan dari masing-masing OPD, menindaklanjuti Berita Acara FGD Penilaian kelayakan usulan perubahan pertama program dan kegiatan keistimewaan TA 2022 dari Pemerintah Pusat untuk dijadikan acuan dalam penyusunan Berita Acara Usulan perubahan pertama kepada kabupaten/kota 2. OPD DIY dan Kab/Kota: Memberikan usulan perubahan pertama program dan kegiatan OPD DIY: Dinas Pertanahan Dan Tata Ruang Biro Tata Pemerintahan Setda Biro Hukum Setda Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Dinas Perhubungan Dinas Kelautan dan Perikanan Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Biro Umum Humas Protokol			

No	Kegiatan Lintas Sektor	KONTRIBUSI PARA PIHAK		OUTPUT DAN KELOMPOK SASARAN		MANFAAT BAGI OPD DAN MANFAAT BAGI KELOMPOK SASARAN
			Balai Pengembangan Teknologi Tepat Guna (Dinas Perindustrian dan Pangan) Balai Latihan Pendidikan Teknik (Dikpora) Dinas Kebudayaan Taman Budaya Yogyakarta Museum Sonobudoyo Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Dinas Komunikasi dan Informatika Dinas Perindustrian dan Pangan Badan Penghubung Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Dinas Pariwisata Dinas Kesehatan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Dinas Sosial Badan Penanggulangan Bencana Daerah Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Satuan Polisi Pamong Praja Biro Administrasi Pemerintahan dan SDA Setda Sekretariat DPRD Bappeda Paniradya Kaistimewan Badan Kepegawaian Daerah Badan Pendidikan dan Pelatihan Biro Organisasi Setda OPD Kota: Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta UPT Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya Kota Yogyakarta Kemantren Gedong Tengen Kemantren Kotagede Kemantren Tegalrejo Bagian Organisasi Setda Kota Yogyakarta Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Yogyakarta			

No	Kegiatan Lintas Sektor	KONTRIBUSI PARA PIHAK		OUTPUT DAN KELOMPOK SASARAN		MANFAAT BAGI OPD DAN MANFAAT BAGI KELOMPOK SASARAN
			OPD Kab Bantul: Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul Dinas Pengendalian penduduk, KB dan PMD Kabupaten Bantul Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian penduduk Kabupaten Bantul Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan perdagangan Kabupaten Bantul Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Bantul Bagian Hukum Setda Kabupaten Bantul Bagian Organisasi Setda Kabupaten Bantul Bappeda Kabupaten Bantul Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Bantul Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Bantul Kapanewon Banguntapan Kapanewon Bantul Kapanewon Dlingo Kapanewon Imogiri Kapanewon Jetis Kapanewon Kasihan Kapanewon Pleret Kapanewon Sedayu Kapanewon Sewon Kapanewon Bambanglipuro Kapanewon Kretek Kapanewon Pajangan Kapanewon Pandak Kapanewon Piyungan Kapanewon Pundong Kapanewon Sanden Kapanewon Srandakan OPD Kab Kulon Progo: Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Kulon Progo Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pengendalian Penduduk dan KB			

No	Kegiatan Lintas Sektor	KONTRIBUSI PARA PIHAK		OUTPUT DAN KELOMPOK SASARAN		MANFAAT BAGI OPD DAN MANFAAT BAGI KELOMPOK SASARAN
			Kabupaten Kulon Progo Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kulon Progo Dinas Kebudayaan Kabupaten Kulon Progo Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kulon Progo Dinas Pariwisata Kabupaten Kulon Progo Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kulon Progo Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo Bappeda Kabupaten Kulon Progo Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kulon Progo Bagian Organisasi Setda Kabupaten Kulon Progo Inspektorat Daerah Kabupaten Kulon Progo Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kulon Progo Bagian Administrasi Pemerintahan Setda Kabupaten Kulon Progo OPD Kab Gunungkidul: Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Gunungkidul Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Kabupaten Gunungkidul Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gunungkidul Dinas Perhubungan Kabupaten Gunungkidul Bappeda Kabupaten Gunungkidul Dinas Kebudayaan Kabupaten Gunungkidul Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gunungkidul Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul Dinas Perdagangan Kabupaten Gunungkidul Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil d Kabupaten Gunungkidul Dinas Menengah dan Tenaga Kerja Dinas Sosial Kabupaten Gunungkidul Bagian Organisasi Setda Kabupaten Gunungkidul Bagian Hukum dan HAM Setda Kabupaten Gunungkidul DPMKP2KB (Semula P3KBPMMD) Kabupaten Gunungkidul BKPPD (UPT Badan Diklat Pegawai) Kabupaten Gunungkidul Kapanewon Wonosari Kapanewon Nglipar Kapanewon Playen Kapanewon Patuk Kapanewon Paliyan Kapanewon Panggang Kapanewon Tepus Kapanewon Semanu			

No	Kegiatan Lintas Sektor	KONTRIBUSI PARA PIHAK	OUTPUT DAN KELOMPOK SASARAN	MANFAAT BAGI OPD DAN MANFAAT
		Kapanewon Karangmojo Kapanewon Ponjong Kapanewon Rongkop Kapanewon Semin Kapanewon Gedangsari Kapanewon Saptosari Kapanewon Girisubo Kapanewon Tanjungsari Kapanewon Purwosari OPD Kab Sleman: Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sleman Dinas Kebudayaan Kabupaten Sleman Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sleman Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman Bappeda Kabupaten Sleman Bagian Organisasi Setda Kabupaten Sleman BKPP Kabupaten Sleman Dinas PMK Kabupaten Sleman 3. Kementerian Pusat (Kementerian Keuangan RI, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian BAPPENAS, Kementerian BPN/ATR) = memberikan arahan dan terlibat dalam penandatanganan Berita Acara Anggaran: 1. FGD Penilaian Kelayakan Perubahan Pertama sebesar Rp 2.550.000,00 Jumlah SDM: 50 orang Keluaran: 1. Berita Acara Penilaian kelayakan usulan perubahan pertama program dan kegiatan keistimewaan TA 2022 dari Pusat 2. BA Perubahan pertama program dan kegiatan keistimewaan TA 2022 Kab/Kota Raker Verifikasi Pelaksanaan Program Kegiatan Dana Keistimewaan Tahap 1 2022 Peran: 1. Paniradya: Memfasilitasi pelaksanaan Raker, mengkoordinir dan mengadministrasi laporan tahapan dari masing-masing OPD, menindaklanjuti Berita Acara Verifikasi pelaksanaan program dan kegiatan keistimewaan Tahap 1 TA 2022 dari Pemerintah Pusat untuk kemudian dijadikan acuan dalam penyusunan Laporan		BAGI KELOMPOK SASARAN

No	Kegiatan Lintas Sektor	KONTRIBUSI PARA PIHAK		OUTPUT DAN KELOMPOK SASARAN		MANFAAT BAGI OPD DAN MANFAAT BAGI KELOMPOK SASARAN
			Pelaksanaan Program Kegiatan Keistimewaan Tahap 1 TA 2022. 2. OPD DIY dan Kab/Kota serta 392 Kalurahan di DIY: Memberikan laporan tahapan pelaksanaan program kegiatan dan sub kegiatan yang diampu OPD DIY: Dinas Pertanahan Dan Tata Ruang Biro Tata Pemerintahan Setda Biro Hukum Setda Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Dinas Perhubungan Dinas Kelautan dan Perikanan Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Biro Umum Humas Protokol Balai Pengembangan Teknologi Tepat Guna (Dinas Perindustrian dan Pangan) Balai Latihan Pendidikan Teknik (Dikpora) Dinas Kebudayaan Taman Budaya Yogyakarta Museum Sonobudoyo Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Dinas Komunikasi dan Informatika Dinas Perindustrian dan Pangan Badan Penghubung Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Dinas Pariwisata Dinas Kesehatan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Dinas Sosial Badan Penanggulangan Bencana Daerah Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Satuan Polisi Pamong Praja Biro Administrasi Perekonomian dan SDA Setda Sekretariat DPRD Bappeda			

No	Kegiatan Lintas Sektor	KONTRIBUSI PARA PIHAK		OUTPUT DAN KELOMPOK SASARAN		MANFAAT BAGI OPD DAN MANFAAT BAGI KELOMPOK SASARAN
			Paniradya Kaistimewan Badan Kepegawaian Daerah Badan Pendidikan dan Pelatihan Biro Organisasi Setda OPD Kota: Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta UPT Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya Kota Yogyakarta Kemantren Gedong Tengen Kemantren Kotagede Kemantren Tegalrejo Bagian Organisasi Setda Kota Yogyakarta Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Yogyakarta OPD Kab Bantul: Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul Dinas Pengendalian penduduk, KB dan PMD Kabupaten Bantul Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian penduduk Kabupaten Bantul Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan perdagangan Kabupaten Bantul Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Bantul Bagian Hukum Setda Kabupaten Bantul Bagian Organisasi Setda Kabupaten Bantul Bappeda Kabupaten Bantul Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Bantul Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Bantul Kapanewon Banguntapan Kapanewon Bantul Kapanewon Dlingo			

No	Kegiatan Lintas Sektor	KONTRIBUSI PARA PIHAK		OUTPUT DAN KELOMPOK SASARAN		MANFAAT BAGI OPD DAN MANFAAT BAGI KELOMPOK SASARAN
			Kapanewon Imogiri Kapanewon Jetis Kapanewon Kasihan Kapanewon Pleret Kapanewon Sedayu Kapanewon Sewon Kapanewon Bambanglipuro Kapanewon Kretek Kapanewon Pajangan Kapanewon Pandak Kapanewon Piyungan Kapanewon Pundong Kapanewon Sanden Kapanewon Srandakan OPD Kab Kulon Progo: Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Kulon Progo Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Kulon Progo Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kulon Progo Dinas Kebudayaan Kabupaten Kulon Progo Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kulon Progo Dinas Pariwisata Kabupaten Kulon Progo Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kulon Progo Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo Bappeda Kabupaten Kulon Progo Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kulon Progo Bagian Organisasi Setda Kabupaten Kulon Progo Inspektorat Daerah Kabupaten Kulon Progo Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kulon Progo Bagian Administrasi Pemerintahan Setda Kabupaten Kulon Progo OPD Kab Gunungkidul: Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Gunungkidul Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Kabupaten Gunungkidul Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gunungkidul Dinas Perhubungan Kabupaten Gunungkidul Bappeda Kabupaten Gunungkidul Dinas Kebudayaan Kabupaten Gunungkidul Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gunungkidul Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul			

No	Kegiatan Lintas Sektor	KONTRIBUSI PARA PIHAK		OUTPUT DAN KELOMPOK SASARAN		MANFAAT BAGI OPD DAN MANFAAT BAGI KELOMPOK SASARAN
			Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul Dinas Perdagangan Kabupaten Gunungkidul Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil d Kabupaten Gunungkidul Dinas Sosial Kabupaten Gunungkidul Bagian Organisasi Setda Kabupaten Gunungkidul Bagian Hukum dan HAM Setda Kabupaten Gunungkidul DPMKP2KB (Semula P3KBPM) Kabupaten Gunungkidul BKPPD (UPT Badan Diklat Pegawai) Kabupaten Gunungkidul Kapanewon Wonosari Kapanewon Nglipar Kapanewon Playen Kapanewon Patuk Kapanewon Paliyan Kapanewon Panggang Kapanewon Tepus Kapanewon Semanu Kapanewon Karangmojo Kapanewon Ponjong Kapanewon Rongkop Kapanewon Semin Kapanewon Gedangsari Kapanewon Saptosari Kapanewon Girisubo Kapanewon Tanjungsari Kapanewon Purwosari OPD Kab Sleman: Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sleman Dinas Kebudayaan Kabupaten Sleman Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sleman Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman Bappeda Kabupaten Sleman Bagian Organisasi Setda Kabupaten Sleman BKPP Kabupaten Sleman Dinas PMK Kabupaten Sleman 3. Pemerintah Pusat: Memberikan evaluasi dan menyusun berita Acara. Pemerintah Pusat: Kementerian Keuangan Kementerian Dalam Negeri Kementerian PUPR			

No	Kegiatan Lintas Sektor	KONTRIBUSI PARA PIHAK	OUTPUT DAN KELOMPOK SASARAN	MANFAAT BAGI OPD DAN MANFAAT
		Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 1. Raker Verifikasi Pelaksanaan Program Kegiatan Dana Keistimewaan Tahap 1 TA 2022 sebesar 6.885.000 Jumlah SDM: 135 Orang Keluaran: 1. Berita Acara Verifikasi Pelaksanaan Program Kegiatan Keistimewaan Tahap 1 TA 2022 Raker Verifikasi Pelaksanaan Program Kegiatan Dana Keistimewaan Tahap 1 TA 2022 Kota Yogyakarta Peran: 1. Paniradya: Memfasilitasi pelaksanaan Raker, mengkoordinir, mengadministrasi dan mengevaluasi laporan tahapan dari masing-masing OPD Kota Yogyakarta, dan menyusun Berita Acara Pelaksanaan Program Kegiatan Dana Keistimewaan Tahap 1 TA 2022 Kota Yogyakarta. 2. OPD Kota Yogyakarta: Memberikan Laporan Tahapan Pelaksanaan Program Kegiatan dan Sub Kegiatan yang diampu. OPD Kota Yogyakarta: Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta UPT Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya Kota Yogyakarta Kemantren Gedong Tengen Kemantren Kotagede Kemantren Tegalrejo Bagian Organisasi Setda Kota Yogyakarta Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Yogyakarta Anggaran: Raker Verifikasi Pelaksanaan Program Kegiatan Keistimewaan Tahap 1 TA 2022 Kota Yogyakarta sebesar 900.000 Jumlah SDM: 25 orang Keluaran: 1. Berita Acara Verifikasi Pelaksanaan Program Kegiatan Keistimewaan Tahap 1 TA 2022 Kota Yogyakarta Raker Verifikasi Pelaksanaan Program Kegiatan Dana Keistimewaan Tahap 1 TA 2022 Kabupaten Sleman		BAGI KELOMPOK SASARAN

No	Kegiatan Lintas Sektor	KONTRIBUSI PARA PIHAK		OUTPUT DAN KELOMPOK SASARAN		MANFAAT BAGI OPD DAN MANFAAT BAGI KELOMPOK SASARAN
			Peran: 1. Paniradya: Memfasilitasi pelaksanaan Raker, mengkoordinir, mengadministrasi dan mengevaluasi laporan tahapan dari masing-masing OPD Kabupaten Sleman, dan menyusun Berita Acara Pelaksanaan Program Kegiatan Dana Keistimewaan Tahap 1 TA 2022 Kabupaten Sleman. 2. OPD Kabupaten Sleman: Memberikan Laporan Tahapan Pelaksanaan Program Kegiatan dan Sub Kegiatan yang diampu. OPD Kab Sleman: Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sleman Dinas Kebudayaan Kabupaten Sleman Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sleman Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman Bappeda Kabupaten Sleman Bagian Organisasi Setda Kabupaten Sleman BKPP Kabupaten Sleman Dinas PMK Kabupaten Sleman Anggaran: Raker Verifikasi Pelaksanaan Program Kegiatan Keistimewaan Tahap 1 TA 2022 Kabupaten Sleman sebesar 900.000 Jumlah SDM: 25 orang Keluaran: 1. Berita Acara Verifikasi Pelaksanaan Program Kegiatan Keistimewaan Tahap 1 TA 2022 Kabupaten Sleman Raker Verifikasi Pelaksanaan Program Kegiatan Dana Keistimewaan Tahap 1 TA 2022 Kabupaten Bantul Peran: 1. Paniradya: Memfasilitasi pelaksanaan Raker, mengkoordinir, mengadministrasi dan mengevaluasi laporan tahapan dari masing-masing OPD Kabupaten Bantul, dan menyusun Berita Acara Pelaksanaan Program Kegiatan Dana Keistimewaan Tahap 1 TA 2022 Kabupaten Bantul. 2. OPD Kabupaten Bantul: Memberikan Laporan Tahapan Pelaksanaan Program Kegiatan dan Sub Kegiatan yang diampu. Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul Dinas Pengendalian penduduk, KB dan PMD Kabupaten Bantul Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul			

No	Kegiatan Lintas Sektor	KONTRIBUSI PARA PIHAK		OUTPUT DAN KELOMPOK SASARAN		MANFAAT BAGI OPD DAN MANFAAT BAGI KELOMPOK SASARAN
			Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian penduduk Kabupaten Bantul Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan perdagangan Kabupaten Bantul Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Bantul Bagian Hukum Setda Kabupaten Bantul Bagian Organisasi Setda Kabupaten Bantul Bappeda Kabupaten Bantul Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Bantul Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Bantul Kapanewon Banguntapan Kapanewon Bantul Kapanewon Dlingo Kapanewon Imogiri Kapanewon Jetis Kapanewon Kasihan Kapanewon Pleret Kapanewon Sedayu Kapanewon Sewon Kapanewon Bambanglipuro Kapanewon Kretek Kapanewon Pajangan Kapanewon Pandak Kapanewon Piyungan Kapanewon Pundong Kapanewon Sanden Kapanewon Srandakan Anggaran: Raker Verifikasi Pelaksanaan Program Kegiatan Keistimewaan Tahap 1 TA 2022 Kabupaten Bantul sebesar 900.000 Jumlah SDM: 25 orang Keluaran: 1. Berita Acara Verifikasi Pelaksanaan Program Kegiatan Keistimewaan Tahap 1 TA 2022 Kabupaten Bantul			

No	Kegiatan Lintas Sektor	KONTRIBUSI PARA PIHAK		OUTPUT DAN KELOMPOK SASARAN		MANFAAT BAGI OPD DAN MANFAAT BAGI KELOMPOK SASARAN
			Raker Verifikasi Pelaksanaan Program Kegiatan Dana Keistimewaan Tahap 1 TA 2022 Kabupaten Kulonprogo Peran: 1. Paniradya: Memfasilitasi pelaksanaan Raker, mengkoordinir, mengadministrasi dan mengevaluasi laporan tahapan dari masing-masing OPD Kabupaten Kulonprogo, dan menyusun Berita Acara Pelaksanaan Program Kegiatan Dana Keistimewaan Tahap 1 TA 2022 Kabupaten Kulonprogo. 2. OPD Kabupaten Kulonprogo: Memberikan Laporan Tahapan Pelaksanaan Program Kegiatan dan Sub Kegiatan yang diampu. OPD Kab Kulon Progo: Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Kulon Progo Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Kulon Progo Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kulon Progo Dinas Kebudayaan Kabupaten Kulon Progo Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kulon Progo Dinas Pariwisata Kabupaten Kulon Progo Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kulon Progo Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo Bappeda Kabupaten Kulon Progo Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kulon Progo Bagian Organisasi Setda Kabupaten Kulon Progo Inspektorat Daerah Kabupaten Kulon Progo Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kulon Progo Bagian Administrasi Pemerintahan Setda Kabupaten Kulon Progo Anggaran: Raker Verifikasi Pelaksanaan Program Kegiatan Keistimewaan Tahap 1 TA 2022 Kabupaten Kulonprogo sebesar 900.000 Jumlah SDM: 25 orang Keluaran: 1. Berita Acara Verifikasi Pelaksanaan Program Kegiatan Keistimewaan Tahap 1 TA 2022 Kabupaten Kulonprogo Raker Verifikasi Pelaksanaan Program Kegiatan Dana Keistimewaan Tahap 1 TA 2022 Kabupaten Gunung Kidul Peran: 1. Paniradya: Memfasilitasi pelaksanaan Raker, mengkoordinir,			

No	Kegiatan Lintas Sektor	KONTRIBUSI PARA PIHAK		OUTPUT DAN KELOMPOK SASARAN		MANFAAT BAGI OPD DAN MANFAAT BAGI KELOMPOK SASARAN
			mengadministrasi dan mengevaluasi laporan tahapan dari masing-masing OPD Kabupaten Gunung Kidul, dan menyusun Berita Acara Pelaksanaan Program Kegiatan Dana Keistimewaan Tahap 1 TA 2022 Kabupaten Gunung Kidul. 2. OPD Kabupaten Gunung Kidul: Memberikan Laporan Tahapan Pelaksanaan Program Kegiatan dan Sub Kegiatan yang diampu. OPD Kab Gunungkidul: Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Gunungkidul Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Kabupaten Gunungkidul Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gunungkidul Dinas Perhubungan Kabupaten Gunungkidul Bappeda Kabupaten Gunungkidul Dinas Kebudayaan Kabupaten Gunungkidul Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gunungkidul Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul Dinas Perdagangan Kabupaten Gunungkidul Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil d Kabupaten Gunungkidul Menengah dan Tenaga Kerja Dinas Sosial Kabupaten Gunungkidul Bagian Organisasi Setda Kabupaten Gunungkidul Bagian Hukum dan HAM Setda Kabupaten Gunungkidul DPMKP2KB (Semula P3KBPM) Kabupaten Gunungkidul BKPPD (UPT Badan Diklat Pegawai) Kabupaten Gunungkidul Kapanewon Wonosari Kapanewon Nglipar Kapanewon Playen Kapanewon Patuk Kapanewon Paliyan Kapanewon Panggang Kapanewon Tepus Kapanewon Semanu Kapanewon Karangmojo Kapanewon Ponjong Kapanewon Rongkop Kapanewon Semin Kapanewon Gedangsari Kapanewon Saptosari Kapanewon Girisubo Kapanewon Tanjungsari Kapanewon Purwosari			

No	Kegiatan Lintas Sektor	KONTRIBUSI PARA PIHAK		OUTPUT DAN KELOMPOK SASARAN		MANFAAT BAGI OPD DAN MANFAAT BAGI KELOMPOK SASARAN
			Anggaran: Raker Verifikasi Pelaksanaan Program Kegiatan Keistimewaan Tahap 1 TA 2022 Kabupaten Gunung Kidul sebesar 900.000 Jumlah SDM: 25 orang Keluaran: 1. Berita Acara Verifikasi Pelaksanaan Program Kegiatan Keistimewaan Tahap 1 TA 2022 Kabupaten Gunung Kidul Kerjasama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika terkait penayangan konten-konten Paniradya Kaistimewan terutama di chanel Youtube Paniradya Kaistimewan Peran: Paniradya: Menyediakan konten tayangan Paniradya Kaistimewan dan mengupdate informasinya ke kementerian Kementerian Komunikasi dan Informatika: Mengagregasi tayangan-tayangan konten Paniradya Kaistimewan secara rutin setiap bulan serta menerbitkan Piagam "Sinergi Organisasi Perangkat Daerah dengan GPR TV" Anggaran: - Jumlah SDM: 10 orang Keluaran: Piagam "Sinergi Organisasi Perangkat Daerah dengan GPR TV" dan Surat Izin Penayangan Konten Paniradya Kaistimewan setiap bulan Audiensi dengan masyarakat mengenai isu terkini tentang keistimewaan DIY, baik melalui media sosial Paniradya Kaistimewan (Youtube, Instagram, Twitter, TikTok, website, dan email) maupun bersurat dan datang langsung Paniradya: Menjawab permasalahan dan pertanyaan dari masyarakat serta memberikan solusi Masyarakat: Memberikan masukan, saran, pertanyaan melalui berbagai media Anggaran: Rp 90.000.000,00 Jumlah SDM: 24 orang Keluaran: notulensi rapat dan bahan rekomendasi Kerjasama dengan Sekertariat Bersama DIY Paniradya: fasilitasi anggaran dan sarana prasarana serta kolaborasi kegiatan			

No	Kegiatan Lintas Sektor	KONTRIBUSI PARA PIHAK		OUTPUT DAN KELOMPOK SASARAN		MANFAAT BAGI OPD DAN MANFAAT BAGI KELOMPOK SASARAN
			Sekretariat Bersama DIY: pelaksana teknis kegiatan bersama Paniradya Kaistimewan Anggaran: Rp 1.100.000.000,00 SDM: 120 orang Keluaran: Peringatan Hari Besar Bersejarah di DIY (Dialog Keistimewaan dan Video Dokumenter sejarah DIY) FGD Parampara Praja terkait kemiskinan Paniradya : memberikan fasilitasi anggaran melalui alokasi dana Keistimewaan Pihak lain: mengundang stakeholder dari akademisi (Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia, UGM, LKDIKT Wilayah V, UNY, UPN, UII, UWM, ISI Yogyakarta, UPN, Atma Jaya, UMY, UKDW, Janabadra, Sanata Darma); memberi masukan terkait timpang kemiskinan yang masih tinggi sedangkan dana keistimewaan sudah masuk sejak tahun 2012 Anggaran: Rp 9.000.000,00 Jml SDM: 25 orang Keluaran: Bahan dokumen untuk rekomendasi terkait kemiskinan FGD Bahan Penyusunan Perencanaan Keistimewaan Peran - Paniradya : memberikan dukungan anggaran melalui alokasi dana Keistimewaan - Bappeda DIY : sebagai pemberi masukan - Dinas Kebudayaan DIY: sebagai koordinator penyusunan perencanaan kegiatan urusan kebudayaan untuk mengawal dan mengusulkan usulan program kegiatan Keistimewaan urusan kebudayaan - OPD pengampu urusan kebudayaan: sebagai penerima manfaat sekaligus mitra pelaksana kegiatan keistimewaan urusan kebudayaan Anggaran: Narasumber : 5.400.000 Moderator: 500.000 MC : 400.000 Akomodasi : 10.000.000, SDM : 50 orang Keluaran : Berupa penyiapan bahan perencanaan Keistimewaan DIY Talkshow Optimalisasi Pemanfaatan Taman Budaya			

No	Kegiatan Lintas Sektor	KONTRIBUSI PARA PIHAK		OUTPUT DAN KELOMPOK SASARAN		MANFAAT BAGI OPD DAN MANFAAT BAGI KELOMPOK SASARAN
			Peran - Paniradya : memberikan dukungan anggaran melalui alokasi dana Keistimewaan - Dinas Kebudayaan Kulon Progo, Dinas Kebudayaan Gunungkidul : memberikan informasi mengenai alokasi penggunaan dana Keistimewaan tahun 2022 untuk pemanfaatan taman budaya Anggaran: Narasumber : 2.000.000 Belanja publikasi : 10.000.000, SDM : 3 orang Keluaran : Berupa optimalisasi pemanfaatan Taman Budaya Talkshow Padat Karya Penerapan Tata Nilai Semangat Keyogyakartaan Peran - Paniradya : memberikan dukungan anggaran melalui alokasi dana Keistimewaan - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Gunungkidul sebagai OPD pengampu dais urusan kebudayaan yang memberikan informasi mengenai alokasi penggunaan dana Keistimewaan tahun 2022 untuk pelaksanaan kegiatan padat karya penerapan tata nilai semangat ke-Yogyakartaan. - Kalurahan Jepitu, Girisubo, Gunungkidul : sebagai Kalurahan penerima alokasi anggaran BKK dais tahun 2022 untuk penerapan pelaksanaan padat karya penerapan tata nilai semangat ke-Yogyakartaan. Anggaran: Narasumber : 1.705.000 Belanja publikasi : 10.000.000, SDM : 3 orang Keluaran : Berupa implementasi tata nilai semangat Keyogyakartaan TRIWULAN III 1. FGD Pra Pembahasan Usulan Program/Kegiatan Keistimewaan Urusan Tata Ruang Tahun 2022 -Paniradya Kaistimewaan sebagai fasilitator pembahasan -Bappeda Kabupaten Gunungkidul sebagai kontributor best practice pengelola dan pengguna dana keistimewaan di Kabupaten Gunungkidul -Kementerian ATR/BPN sebagai pengarah dan pemberi masukan kebijakan			

No	Kegiatan Lintas Sektor	KONTRIBUSI PARA PIHAK		OUTPUT DAN KELOMPOK SASARAN		MANFAAT BAGI OPD DAN MANFAAT BAGI KELOMPOK SASARAN
			Anggaran: Rp 20.000.000, SDM: 40 orang Keluaran yang dihasilkan: Saran dan masukan sebagai bahan pengusulan program/kegiatan keistimewaan di tahun-tahun berikutnya di urusan tata ruang 2. Penyusunan Roadmap Kegiatan Keistimewaan Urusan Kelembagaan 2022-2027 -Paniradya Kaistimewaan sebagai perencana dan fasilitator pembahasan - Biro Organisasi dan Bappeda DIY sebagai pengarah dan pembahas - Bappeda Kab/kota dan Bagian Organisasi Kab sebagai pemberi masukan Anggaran :Rp 100.000.000, SDM : 40 orang Keluaran yang dihasilkan : Roadmap Kegiatan Keistimewaan Urusan Kelembagaan 2022-2027 3. BKK ke Kalurahan Urusan Pertanahan Peninjauan lokasi panen perdana di salah satu kalurahan penerima manfaat (Kalurahan Sidoharjo, Tepus Kab Gunungkidul) yang melibatkan Paniradya, DPTR DIY, DPTR Kabupaten Gunungkidul, Kalurahan Sidoharjo,BPP (Balai Penyuluh Pertanian), Panewu Tepus, Kapolsek, Danramil, Bamuskal. Peninjauan lokasi penanaman bibit Cabe di Kalurahan Caturharjo, Paniradya, DPTR DIY, DPTR KAB Sleman, Kalurahan Caturharjo, Dukuh di Kalurahan Caturharjo Bamuskal. - Paniradya : sebagai fasilitator dan perencana - DPTR DIY : sebagai verifikator pendampingan dan Monitoring evaluasi - DPTR Kabupaten : sebagai pendamping dan monitoring evaluasi - Kalurahan : sebagai penerima manfaat dan pelaksana kegiatan Anggaran: 100.000.000,- SDM : 30 orang. Keluaran : Saran kebijakan untuk melanjutkan BKK Kalurahan di tahun selanjutnya (selama 3 tahun berturut-turut (kolaborasi Paniradya, DPTR DIY dan DPTR Kab Kabupaten/Kota) dengan target lebih banyak Kalurahan yang ikutserta. 4. MUSRENBANGKAL-IS DESA MANDIRI BUDAYA (8 Kalurahan) Peran : a. Paniradya = memfasilitasi pelaksanaan musrenbangkal, mengkoordinir dan memberikan arahan terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan (TA 2022) dan kegiatan yang akan dilaksanakan			

No	Kegiatan Lintas Sektor	KONTRIBUSI PARA PIHAK		OUTPUT DAN KELOMPOK SASARAN		MANFAAT BAGI OPD DAN MANFAAT
			(TA 2023) b. OPD Pengampu = memberikan arahan terhadap program dan kegiatan kalurahan c. Perangkat kalurahan dan stakeholder terkait = mengikuti jalannya musrenbang dan menyampaikan aspirasi terkait program dan kegiatan kalurahan Anggaran : Total anggaran pelaksanaan MUSRENBANGKAL-IS terhadap 8 kalurahan 157.500.000 (meliputi konsumsi 50 orang, sewa tempat pertemuan, narsum 3 orang, moderator 1 orang, honor non PNS 40 orang) Keluaran : 1. Program kegiatan yang sudah dilaksanakan TA 2022 2. Usulan program dan kegiatan dana keistimewaan TA 2023 3. Berita Acara pelaksanaan MUSRENBANGKAL 5. FORUM ASPIRASI KEISTIMEWAAN TA 2022 Peran : a. Paniradya = memfasilitasi pelaksanaan Forum Aspirasi Keistimewaan, menampung aspirasi peserta forum aspirasi keistimewaan b. OPD DIY, Kabupaten Kota dan Kalurahan = memberikan usulan terhadap program dan kegiatan yang akan datang. Anggaran : Total anggaran pelaksanaan FORUM ASPIRASI KEISTIMEWAAN sebesar 82.100.000 (meliputi sewa hotel 4 hari, honor narsum, dan honor non PNS 35 orang x 4 hari) Keluaran : 1. Berita Acara Forum Aspirasi 2. Usulan-usulan program dan kegiatan danais 6. FGD Penilaian kelayakan usulan perubahan kedua program dan kegiatan keistimewaan TA 2022 Peran: a. Paniradya: Memfasilitasi pelaksanaan FGD, mengkoordinir dan mengadministrasi usulan-usulan dari masing-masing OPD, menindaklanjuti Berita Acara FGD Penilaian kelayakan usulan perubahan kedua program dan kegiatan keistimewaan TA 2022 dari Pemerintah Pusat (Kementerian Keuangan) untuk dijadikan acuan dalam penyusunan Berita Acara Usulan perubahan kedua kepada kabupaten/kota b. OPD DIY dan Kab/Kota: Memberikan usulan perubahan kedua			BAGI KELOMPOK SASARAN

No	Kegiatan Lintas Sektor	KONTRIBUSI PARA PIHAK		OUTPUT DAN KELOMPOK SASARAN		MANFAAT BAGI OPD DAN MANFAAT BAGI KELOMPOK SASARAN
			program dan kegiatan OPD DIY OPD Kota OPD Kab Bantul Kapanewon Banguntapan Kapanewon Bantul Kapanewon Dlingo Kapanewon Imogiri Kapanewon Jetis Kapanewon Kasihan Kapanewon Pleret Kapanewon Sedayu Kapanewon Sewon Kapanewon Bambanglipuro Kapanewon Kretek Kapanewon Pajangan Kapanewon Pandak Kapanewon Piyungan Kapanewon Pundong Kapanewon Sanden Kapanewon Srandakan OPD Kab Kulon Progo OPD Kab Gunungkidul Kapanewon Wonosari Kapanewon Nglipar Kapanewon Playen Kapanewon Patuk Kapanewon Paliyan Kapanewon Panggang Kapanewon Tepus Kapanewon Semanu Kapanewon Karangmojo Kapanewon Ponjong Kapanewon Rongkop Kapanewon Semin Kapanewon Gedangsari Kapanewon Saptosari Kapanewon Girisubo Kapanewon Tanjungsari Kapanewon Purwosari OPD Kab Sleman 3. Pemerintah Pusat: Memberikan evaluasi dan menyusun berita			

No	Kegiatan Lintas Sektor	KONTRIBUSI PARA PIHAK		OUTPUT DAN KELOMPOK SASARAN		MANFAAT BAGI OPD DAN MANFAAT BAGI KELOMPOK SASARAN
			Acara. c. Kementerian Pusat (Kementerian Keuangan RI, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian BAPPENAS, Kementerian BPN/ATR) = memberikan arahan dan terlibat dalam penandatanganan Berita Acara Anggaran: 1. FGD Penilayaan Kelayakan Perubahan Pertama kedua 2.550.000,00 Jumlah SDM: 50 orang Keluaran: 1. Berita Acara Penilaian kelayakan usulan perubahan kedua program dan kegiatan keistimewaan TA 2022 dari Pusat 2. BA Perubahan kedua program dan kegiatan keistimewaan TA 2022 Kab/Kota 7. Raker Verifikasi Pelaksanaan Program Kegiatan Dana Keistimewaan Tahap 1 TA 2022 BKK Kalurahan Peran: a. Paniradya: Memfasilitasi pelaksanaan Raker, mengkoordinir, mengadministrasi dan mengevaluasi laporan tahapan dari masing-masing Kalurahan, dan menyusun Berita Acara Pelaksanaan Dana Keistimewaan Tahap 1 TA 2022 BKK Kalurahan. b. Kalurahan: Memberikan Laporan Tahapan Pelaksanaan Kebijakan Strategis Gubernur yang diampu. Kalurahan: Arsitektur Yogyakarta Kalurahan Jagalan Kalurahan Patalan Balai Budaya: Kalurahan Giripurwo Kalurahan Pandowoharjo Kalurahan Panggungharjo Kalurahan Putat Desa Budaya: Kalurahan Beji Kalurahan Bugel Kalurahan Gilangharjo Kalurahan Kalirejo Kalurahan Kemadang Kalurahan Ngalang Kalurahan Panggungharjo Kalurahan Semanu			

No	Kegiatan Lintas Sektor	KONTRIBUSI PARA PIHAK		OUTPUT DAN KELOMPOK SASARAN		MANFAAT BAGI OPD DAN MANFAAT BAGI KELOMPOK SASARAN
			Kalurahan Semin Kalurahan Sendangmulyo Kalurahan Sinduharjo Kalurahan Sukoreno Desa Maritim: Kalurahan Girikerto Kalurahan Tileng Kalurahan Tirtohargo Desa Preneur: Kalurahan Katongan Kalurahan Kemiri Kalurahan Kepek Kalurahan Sidoarum Kalurahan Sriharjo Kalurahan Tamanmartani Kalurahan Trimurti Kalurahan Triwidadi Desa Prima: Kalurahan Banyurejo Kalurahan Bleberan Kalurahan Giripurwo Kalurahan Seloharjo Kalurahan Timbulharjo Desa Wisata: Kalurahan Bokoharjo Kalurahan Gayamharjo Kalurahan Guwosari Kalurahan Katongan Kalurahan Mangunan Kalurahan Mulo Kalurahan Widodomartani Kalurahan Wukirsari Desa Mandiri Budaya Kalurahan Bangunjiwo Kalurahan Bangunkerto Kalurahan Banjarharjo Kalurahan Bejiharjo Kalurahan Girikerto Kalurahan Hargomulyo Kalurahan Jerukwudel Kalurahan Margodadi Kalurahan Pagerharjo			

No	Kegiatan Lintas Sektor	KONTRIBUSI PARA PIHAK	OUTPUT DAN KELOMPOK SASARAN	MANFAAT BAGI OPD DAN MANFAAT
		Kalurahan Pandowoharjo Kalurahan Putat Kalurahan Sabdodadi Kalurahan Tanjungharjo Kalurahan Tuksono Kalurahan Wedomartani Mandiri Pangan Kalurahan Bendung Kalurahan Sendangsari WBTB: Kalurahan Gedangrejo Anggaran: Raker Verifikasi Pelaksanaan Program Kegiatan Keistimewaan Tahap 1 TA 2022 Kalurahan sebesar 9.000.000 Jumlah SDM: 25 orang Keluaran: 1. Berita Acara Verifikasi Pelaksanaan Program Kebijakan Strategis Gubernur BKK Dana Keistimewaan Tahap 1 TA 2022 8. Pencermatan Usulan Perubahan Tahap II TA 2022 Urusan Kebudayaan a. Peran : - Paniradya : memberikan dukungan anggaran melalui alokasi dana Keistimewaan - BAPPEDA DIY : sebagai pemberi masukan terkait perencanaan dan pengendalian program kegiatan keistimewaan urusan kebudayaan - BPKA : sebagai operator pelaksana pengelolaan anggaran dana Keistimewaan urusan kebudayaan - Dinas Kebudayaan DIY: sebagai koordinator pengguna anggaran pelaksanaan kegiatan keistimewaan urusan kebudayaan untuk membantu pengendalian kegiatan Keistimewaan urusan kebudayaan - OPD pengampu urusan kebudayaan: sebagai penerima manfaat sekaligus mitra pelaksana kegiatan keistimewaan urusan kebudayaan untuk membantu pengendalian kegiatan Keistimewaan urusan kebudayaan -SDM : Semua OPD pengampu dais Kab/Kota - Keluaran : - Dokumen Penyusunan Program dan Kegiatan		BAGI KELOMPOK SASARAN

No	Kegiatan Lintas Sektor	KONTRIBUSI PARA PIHAK		OUTPUT DAN KELOMPOK SASARAN		MANFAAT BAGI OPD DAN MANFAAT BAGI KELOMPOK SASARAN
			Keistimewaan Urusan Kebudayaan tahun 2022 9. Talkshow TV LOKal dengan tema " Desa Mandiri Pangan sebagai Perwujudan Ketahanan Pangan Peran: - Paniradya Kaistimewan sebagai instansi di lingkup Pemerintah Daerah DIY, memiliki tugas dan fungsi dalam penyusunan kebijakan urusan keistimewaan, perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dan mempunyai peran yang besar dalam hal mewujudkan Good Governance of Government sebagaimana yang diamanatkan oleh Dana Keistimewaan DIY. - Dinas Pertanian dan Pangan Gunungkidul sebagai OPD pengampu dais urusan kebudayaan yang memberikan informasi mengenai alokasi penggunaan dana Keistimewaan tahun 2022 untuk pelaksanaan kegiatan Desa Mandiri Pangan sebagai Perwujudan Ketahanan Pangan. - Lurah Bendung Semin, Gunungkidul sebagai Kalurahan penerima alokasi anggaran BKK dais tahun 2022 untuk penerapan pelaksanaan padat karya penerapan tata nilai semangat ke-Yogyakarta. Anggaran : Narasumber : 1.900.000 Belanja publikasi : 10.000.000 SDM : 3 orang Keluaran : Bahan Evaluasi Kegiatan keistimewaan urusan kebudayaan mengenai Desa Mandiri Pangan sebagai Perwujudan Ketahanan Pangan. 10. FGD Pengembangan, Pelindungan, dan Pemeliharaan Bahasa Daerah Sinkronisasi Program Kerja Tahun 2023-2017 Peran: - Paniradya : memberikan dukungan anggaran melalui alokasi dana Keistimewaan - Bappeda DIY : sebagai pemberi masukan - Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (BBY): sebagai koordinator dalam rangka mensinkronkan pelaksanaan program pengembangan, pelindungan, dan pemeliharaan bahasa dan sastra Indonesia dan daerah di DIY;			

No	Kegiatan Lintas Sektor	KONTRIBUSI PARA PIHAK		OUTPUT DAN KELOMPOK SASARAN		MANFAAT BAGI OPD DAN MANFAAT BAGI KELOMPOK SASARAN
			- OPD DIY dan Kabupaten/Kota : sebagai penerima manfaat sekaligus mitra pelaksana kegiatan keistimewaan urusan kebudayaan Anggaran : Narasumber : 4 Orang Belanja akomodasi: 8.000.000 Keluaran: draf pembagian wewenang dalam pelaksanaan program pengembangan, perlindungan, dan pemeliharaan bahasa dan sastra daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta. 11. BKK ke Kalurahan Urusan Kebudayaan a. Peninjauan lokasi penerima BKK Dais di seluruh Kalurahan DIY b. SDM: 5 orang c. Keluaran: Bahan Evaluasi Kegiatan BKK keistimewaan urusan kebudayaan di tingkat Kalurahan 12. Peringatan Satu Dasawarsa Keistimewaan DIY Kerjasama dan kolaborasi kegiatan dengan para instansi pengampu Dana Keistimewaan baik di Pemerintah Daerah DIY, Kab/ Kota, Kapanewon/ Kemantren, maupun di tingkat Kelurahan/ Kalurahan dan bermitra dengan komunitas pendukung keistimewaan DIY dalam penyebarluasan informasi keistimewaan DIY, terutama dalam rangka Peringatan Satu Dasawarsa Keistimewaan DIY di bulan Agustus 2022 yang terselenggara selama 1 (satu) bulan penuh sejak 10 Agustus-10 September 2022 Peran Paniradya: Mengkolaborasikan kegiatan-kegiatan keistimewaan yang bersumber dari Dana Keistimewaan DIY dalam rangka Peringatan Satu Dasawarsa Keistimewaan DIY, selain itu juga mempublikasikan, mendokumentasikan dan menyebarkan informasi keistimewaan kepada masyarakat. OPD/ Mitra terkait: Bersedia berkolaborasi dan mengisi rangkaian acara kegiatan Peringatan Satu Dasawarsa Keistimewaan DIY serta menyediakan data yang dibutuhkan terkait bahan penyebarluasan informasi keistimewaan. Anggaran: 500 juta Jumlah SDM: 15 orang Keluaran: Konten-konten keistimewaan terkait Peringatan Satu Dasawarsa Keistimewaan DIY 13. Lanjutan FGD Kemiskinan Peran:			

No	Kegiatan Lintas Sektor	KONTRIBUSI PARA PIHAK		OUTPUT DAN KELOMPOK SASARAN		MANFAAT BAGI OPD DAN MANFAAT BAGI KELOMPOK SASARAN
			Parampara Praja: memantau, mendengarkan, serta mengarahkan FGD; membuat rekomendasi kepada gubernur DIY Paniradya : memberikan fasilitasi anggaran melalui alokasi dana Keistimewaan OPD/pihak lain (Dinas Perhubungan, Bappeda, Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia, UGM, LKDIKT Wilayah V, UNY, UPN, UII, UWM, ISI Yogyakarta, UPN, Atma Jaya, UMY, UKDW, Janabadra, Sanata Dharma) : memberikan input mengenai pelaksanaan keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta terutama masalah kemiskinan. Anggaran: Rp. 15.000.000,00 Jumlah SDM : 30 orang Keluaran : Bahan rekomendasi kepada gubernur DIY 14. Kunjungan ke BPS dan Bank Indonesia Perwakilan DIY Peran: Parampara Praja: mencari masukan terkait isu-isu terkini Paniradya : memberikan fasilitasi anggaran melalui alokasi dana Keistimewaan Pihak lain (Bank Indonesia dan BPS): memberikan masukan/data mengenai kemiskinan di DIY Anggaran Anggaran yang digunakan sebesar : Rp. 0,00 Jumlah SDM : 5 orang Keluaran : Bahan kajian rekomendasi terkait kemiskinan TRIWULAN IV A. FGD Monitoring Kegiatan Keistimewaan Urusan Tata Ruang Sebagai Dasar Penilaian Penyesuaian Program/Kegiatan Keistimewaan Urusan Tata Ruang Tahun Anggaran 2023 1. -Paniradya Kaistimewaan sebagai fasilitator pembahasan -Bappeda Kabupaten Gunungkidul sebagai kontributor best practice pengelola dan pengguna dana keistimewaan di Kabupaten Gunungkidul -Kementerian ATR/BPN sebagai pengevaluasi kegiatan, pengarah dan pemberi masukan kebijakan 2. Anggaran: Rp 20.000.000, SDM: 40 orang 3. Keluaran yang dihasilkan: Saran dan masukan sebagai bahan pengusulan program/kegiatan keistimewaan di tahun-tahun			

No	Kegiatan Lintas Sektor	KONTRIBUSI PARA PIHAK		OUTPUT DAN KELOMPOK SASARAN		MANFAAT BAGI OPD DAN MANFAAT BAGI KELOMPOK SASARAN
			berikutnya berdasarkan hasil monitoring kegiatan keistimewaan urusan tata ruang yang telah dilaksanakan di tahun-tahun sebelumnya B. Kajian Evaluasi Penataan Kelembagaan Asli 1. -Paniradya sebagai Inisiator dan pengarah -CV. Saka Sejahtera Raya sebagai pelaksana kajian -Biro Organisasi, Biro Tapem, Bappeda Kab/Kota, Bagian Organisasi Kab/kota, Kapanewon sebagai kontributor 2. Anggaran : Rp 94.366.650, SDM : 20 orang 3. Keluaran yang dihasilkan : hasil evaluasi pelaksanaan penataan kelembagaan asli dan rekomendasi serta arah kebijakan 5 tahun ke depan. C. FGD Monitoring Kegiatan Keistimewaan Urusan Kelembagaan Sebagai Dasar Penyesuaian Program/Kegiatan Keistimewaan Urusan Kelembagaan Tahun Anggaran 2023 dan 2024 1. -Paniradya Kaistimewaan sebagai fasilitator pembahasan -Bagian Organisasi Setda Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Bantul sebagai kontributor evaluasi pelaksanaan kegiatan di kabupaten masing-masing -Kementerian Dalam Negeri sebagai pengevaluasi kegiatan, pengarah dan pemberi masukan kebijakan 2. Anggaran: Rp 20.000.000, SDM: 40 orang 3. Keluaran yang dihasilkan: Saran dan masukan sebagai bahan pengusulan program/kegiatan keistimewaan di tahun-tahun berikutnya berdasarkan hasil monitoring kegiatan keistimewaan urusan kelembagaan yang telah dilaksanakan di tahun-tahun sebelumnya Dokumen Usulan Awal Dana Keistimewaan TA 2024 D. Penandatanganan Berita Acara BKK Program dan Kegiatan Dana Keistimewaan TA 2023 kepada Kalurahan Peran : Paniradya --> Memfasilitasi, mengkoordinir dan mengadministrasi BA BKK Kalurahan TA 2023 OPD Pengampu --> mendampingi kalurahan dalam pelaksanaan BKK TA 2023 dan menandatangani BA BKK TA 2023 kepada Kalurahan Perangkat Kalurahan --> Pelaksana BKK dan menandatangani BA BKK TA 2023 Anggaran : Total anggaran penandatanganan BA BKK TA 2023 4			

No	Kegiatan Lintas Sektor	KONTRIBUSI PARA PIHAK		OUTPUT DAN KELOMPOK SASARAN		MANFAAT BAGI OPD DAN MANFAAT BAGI KELOMPOK SASARAN
			kabupaten Rp 14.400.000 Keluaran : Berita Acara BKK Prorgam dan kegiatan Dana keistimewaan TA 2023 E. Raker Verifikasi Pelaksanaan Program Kegiatan Dana Keistimewaan Tahap 2 2022 Peran: 1. Paniradya: Memfasilitasi pelaksanaan Raker, mengkoordinir dan mengadministrasi laporan tahapan dari masing-masing OPD, menindaklanjuti Berita Acara Verifikasi pelaksanaan program dan kegiatan keistimewaan Tahap 2 TA 2022 dari Pemerintah Pusat untuk kemudian dijadikan acuan dalam penyusunan Laporan Pelaksanaan Program Kegiatan Keistimewaan Tahap 2 TA 2022. 2. OPD DIY dan Kab/Kota: Memberikan laporan tahapan pelaksanaan program kegiatan dan sub kegiatan yang diampu OPD DIY OPD Kota OPD Kab Bantul Kapanewon Banguntapan Kapanewon Bantul Kapanewon Dlingo Kapanewon Imogiri Kapanewon Jetis Kapanewon Kasihan Kapanewon Pleret Kapanewon Sedayu Kapanewon Sewon Kapanewon Bambanglipuro Kapanewon Kretek Kapanewon Pajangan Kapanewon Pandak Kapanewon Piyungan Kapanewon Pundong Kapanewon Sanden Kapanewon Srandakan OPD Kab Kulon Progo OPD Kab Gunungkidul Kapanewon Wonosari Kapanewon Nglipar Kapanewon Playen Kapanewon Patuk			

No	Kegiatan Lintas Sektor	KONTRIBUSI PARA PIHAK		OUTPUT DAN KELOMPOK SASARAN		MANFAAT BAGI OPD DAN MANFAAT BAGI KELOMPOK SASARAN
			Kapanewon Paliyan Kapanewon Panggang Kapanewon Tepus Kapanewon Semanu Kapanewon Karangmojo Kapanewon Ponjong Kapanewon Rongkop Kapanewon Semin Kapanewon Gedangsari Kapanewon Saptosari Kapanewon Girisubo Kapanewon Tanjungsari Kapanewon Purwosari OPD Kab Sleman 3. Pemerintah Pusat: Memberikan evaluasi dan menyusun berita Acara. Anggaran: 1. Raker Verifikasi Pelaksanaan Program Kegiatan Dana Keistimewaan Tahap 2 TA 2022 sebesar 6.885.000 Jumlah SDM: 135 Orang Keluaran: 1. Berita Acara Verifikasi Pelaksanaan Program Kegiatan Keistimewaan Tahap 2 TA 2022 F. Raker Verifikasi Pelaksanaan Program Kegiatan Dana Keistimewaan Tahap 3 2022 Peran: 1. Paniradya: Memfasilitasi pelaksanaan Raker, mengkoordinir dan mengadministrasi laporan tahapan dari masing-masing OPD, menindaklanjuti Berita Acara Verifikasi pelaksanaan program dan kegiatan keistimewaan Tahap 3 TA 2022 dari Pemerintah Pusat untuk kemudian dijadikan acuan dalam penyusunan Laporan Pelaksanaan Program Kegiatan Keistimewaan Tahap 3 TA 2022. 2. OPD DIY dan Kab/Kota: Memberikan laporan tahapan pelaksanaan program kegiatan dan sub kegiatan yang diampu OPD DIY OPD Kota OPD Kab Bantul Kapanewon Banguntapan Kapanewon Bantul Kapanewon Dlingo Kapanewon Imogiri			

No	Kegiatan Lintas Sektor	KONTRIBUSI PARA PIHAK		OUTPUT DAN KELOMPOK SASARAN		MANFAAT BAGI OPD DAN MANFAAT BAGI KELOMPOK SASARAN
			Kapanewon Jetis Kapanewon Kasihan Kapanewon Pleret Kapanewon Sedayu Kapanewon Sewon Kapanewon Bambanglipuro Kapanewon Kretek Kapanewon Pajangan Kapanewon Pandak Kapanewon Piyungan Kapanewon Pundong Kapanewon Sanden Kapanewon Srandakan OPD Kab Kulon Progo OPD Kab Gunungkidul Kapanewon Wonosari Kapanewon Nglipar Kapanewon Playen Kapanewon Patuk Kapanewon Paliyan Kapanewon Panggang Kapanewon Tepus Kapanewon Semanu Kapanewon Karangmojo Kapanewon Ponjong Kapanewon Rongkop Kapanewon Semin Kapanewon Gedangsari Kapanewon Saptosari Kapanewon Girisubo Kapanewon Tanjungsari Kapanewon Purwosari OPD Kab Sleman 3. Pemerintah Pusat: Memberikan evaluasi dan menyusun berita Acara. Anggaran: 1. Raker Verifikasi Pelaksanaan Program Kegiatan Dana Keistimewaan Tahap 3 TA 2022 sebesar 6.885.000 Jumlah SDM: 135 Orang Keluaran: 1. Berita Acara Verifikasi Pelaksanaan Program Kegiatan Keistimewaan Tahap 3 TA 2022			

No	Kegiatan Lintas Sektor	KONTRIBUSI PARA PIHAK		OUTPUT DAN KELOMPOK SASARAN		MANFAAT BAGI OPD DAN MANFAAT
			G. Pembahasan Usulan Perencanaan Kegiatan Desa Mandiri Budaya Tahun 2023 a. Paniradya sebagai fasilitator pemberi dukungan anggaran melalui alokasi dana Keistimewaan b. OPD Pengampu Desa Mandiri Budaya sebagai sebagai koordinator pengguna anggaran pelaksanaan kegiatan keistimewaan urusan kebudayaan pada Desa Mandiri Budaya c. Kalurahan sebagai penerima manfaat sekaligus mitra pelaksana kegiatan keistimewaan urusan kebudayaan SDM : 50 orang, anggaran : 10.000.000,- Keluaran : Bahan perencanaan usulan 2023 H. FGD Arahan dan Kebijakan Perencanaan Keistimewaan Urusan Kebudayaan tahun 2024 a. Paniradya sebagai fasilitator pemberi dukungan anggaran melalui alokasi dana Keistimewaan b. BAPPEDA DIY : sebagai pemberi masukan terkait perencanaan dan pengendalian program kegiatan keistimewaan urusan kebudayaan c. BPKA : sebagai operator pelaksana pengelolaan anggaran dana Keistimewaan urusan kebudayaan d. Dinas Kebudayaan DIY: sebagai koordinator pengguna anggaran pelaksanaan kegiatan keistimewaan urusan kebudayaan untuk membantu pengendalian kegiatan Keistimewaan urusan kebudayaan e. OPD pengampu urusan kebudayaan: sebagai penerima manfaat sekaligus mitra pelaksana kegiatan keistimewaan urusan kebudayaan SDM : Semua OPD pengampu dais Kab/Kota, Anggaran : 10.000.000 Keluaran : Dokumen Penyusunan Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Kebudayaan tahun 2024 I. FGD Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Urusan Kebudayaan dalam rangka persiaan laporan tahap 3 tahun 2022 a. Kementerian keuangan sebagai pemberi arahan kebijakan pembangunan Keistimewaan melalui dais b. Kemenristekdikti sebagai pengevaluasi pelaksanaan kegiatan urusan kebudayaan tahun 2022 c. Paniradya sebagai fasilitator pemberi dukungan anggaran melalui alokasi dana Keistimewaan d. BAPPEDA DIY : sebagai pemberi masukan terkait perencanaan			BAGI KELOMPOK SASARAN

No	Kegiatan Lintas Sektor	KONTRIBUSI PARA PIHAK		OUTPUT DAN KELOMPOK SASARAN		MANFAAT BAGI OPD DAN MANFAAT BAGI KELOMPOK SASARAN
			dan pengendalian program kegiatan keistimewaan urusan kebudayaan e. BPKA : sebagai operator pelaksana pengelolaan anggaran dana Keistimewaan urusan kebudayaan f. Dinas Kebudayaan DIY: sebagai koordinator pengguna anggaran pelaksanaan kegiatan keistimewaan urusan kebudayaan untuk membantu pengendalian kegiatan Keistimewaan urusan kebudayaan g. OPD pengampu urusan kebudayaan: sebagai penerima manfaat sekaligus mitra pelaksana kegiatan keistimewaan urusan kebudayaan SDM : 80 orang (40 orang secara luring, 40 orang secara daring) Anggaran : 8.000.000 Keluaran : Dokumen Laporan Pelaksanaan Kegiatan Dana Keistimewaan Urusan Kebudayaan Tahap III tahun 2022 J. Peringatan Mangayubagya Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY; Inovasi penyebarluasan informasi keistimewaan dalam kemasan baru yang lebih santai diiringi dengan dagelan yaitu Rerasan Golek Solusi (REGOL) yang tayang secara live streaming di Youtube Channel Paniradya Kaistimewan; Inovasi Youtube Channel baru milik Paniradya Kaistimewan yaitu REGOL BREGADA TRENGGINAS, untuk menguatkan informasi dan berisi tentang testimoni kegiatan program/ kegiatan Dana Keistimewaan yang langsung disampaikan oleh penerima manfaat. Anggaran: 1.922.514.000 Jumlah SDM: 15 orang Keluaran: 1. Konten informasi keistimewaan DIY yang terpublikasi kepada masyarakat (5 media) 2. Buku Infografis Capaian Keistimewaan DIY K. FGD/Raker Reformasi Birokrasi Peran: Parampara Praja: memantau, mendengarkan, serta mengarahkan FGD; membuat rekomendasi kepada gubernur DIY Paniradya : memberikan fasilitasi anggaran melalui alokasi dana Keistimewaan OPD/pihak lain (Universitas Gadjah Mada, APMD Yogyakarta) : memberikan masukan mengenai reformasi birokrasi di DIY. Parampara Praja melalui kegiatan FGD/Dengar Pendapat berusaha untuk mendapatkan berbagai informasi.masukan dari kelompok masyarakat,OPD,akademisi yang akan digunakan oleh Parampara			

No	Kegiatan Lintas Sektor	KONTRIBUSI PARA PIHAK		OUTPUT DAN KELOMPOK SASARAN		MANFAAT BAGI OPD DAN MANFAAT BAGI KELOMPOK SASARAN
			Praja untuk menyusun rekomendasi kepada Gubernur DIY Paniradya : memberikan fasilitasi anggaran melalui alokasi dana Keistimewaan Kegiatan tersebut dalam rangka memberikan input mengenai pelaksanaan keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta terutama terkait Reformasi Birokrasi, Reformasi Kalurahan dan Pertanahan L. FGD/Raker Reformasi Kalurahan Peran: Parampara Praja: memantau, mendengarkan, serta mengarahkan FGD; membuat rekomendasi kepada gubernur DIY Paniradya : memberikan fasilitasi anggaran melalui alokasi dana Keistimewaan OPD/pihak lain UGM,APMD,UNS,Universitas Terbuka,Paguyuban Lurah Nayantaka dan beberapa OPD di Pemda DIY (Bappeda DIY, BPKA DIY, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY, Dinas Kebudayaan DIY, Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah DIY, Biro Hukum, Biro Organisasi, Biro Tata Pemerintahan) Kegiatan tersebut dalam rangka memberikan input mengenai pelaksanaan keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta terutama terkait Reformasi Birokrasi Kalurahan M. Kajian Kebijakan dan Strategi Urusan Pertanahan dalam Upaya Membantu Mengurangi Kemiskinan di DIY : 1. -Paniradya sebagai Inisiator dan pengarah -CV. INSPECT MULTI KONSULTAN sebagai pelaksana kajian -DPTR Kab/Kota dan kalurahan di DIY terutama sebagai kontributor 2. Anggaran : Rp 94.700.000, - SDM : 30 orang 3. Keluaran yang dihasilkan : hasil kajian berupa strategi pengurangan kemiskinan di beberapa kalurahan di DIY yang disesuaikan dengan potensi daerah yang dimiliki. Pemantauan / Evaluasi : TRIWULAN I Perubahan Pergub Penugasan Urusan Keistimewaan (tindak lanjut kegiatan tahun lalu) Koordinasi dengan Biro Hukum Setda DIY dan Kemendagri Penyusunan Roadmap Kegiatan Keistimewaan Urusan Kelembagaan 2022-2027 1. Rapat koordinasi awal dengan tim pengarah dan tim penyusun			

No	Kegiatan Lintas Sektor	KONTRIBUSI PARA PIHAK		OUTPUT DAN KELOMPOK SASARAN		MANFAAT BAGI OPD DAN MANFAAT BAGI KELOMPOK SASARAN
			2. Penyusunan guideline roadmap Optimalisasi dan sinergisitas pemanfaatan penataan ruang 1. Rapat koordinasi dengan TAPD dan OPD pengampu urusan 2. Identifikasi kebutuhan dan permasalahan di masing-masing Satuan Ruang Strategis BKK ke Kalurahan Urusan Pertanahan 1. Rapat koordinasi peninjauan lokasi pelaksanaan 2. Identifikasi kebutuhan pelaksanaan kegiatan Kerjasama lintas sektor dengan OPD dan TAPD DIY dalam rangka Penyusunan Usulan program dan kegiatan keistimewaan yang terbentuk dalam Tim Perencanaan keistimewaan Kerjasama lintas sektor dengan Kementerian Pusat dalam dalam rangka penyusunan dan penilaian Usulan program dan kegiatan keistimewaan yang terbentuk dalam Tim Penilaian Kelayakan Kerjasama lintas sektor dengan OPD DIY dalam rangka arahan pelaksanaan arahan program, kegiatan, sub-kegiatan Dana keistimewaan TA 2022 kepada Kalurahan - Monitoring dan Evaluasi terhadap pelaksanaan Program dan Kegiatan Dana Keistimewaan ke Kabupaten/Kota maupun ke Kalurahan Kerjasama lintas sektor dengan OPD dan TAPD DIY dalam rangka monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan urusan kebudayaan dalam rangka persiapan verifikasi Tahap I tahun 2022 Kerjasama lintas sektor dengan Kementerian Pusat dalam dalam rangka monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan urusan kebudayaan dalam rangka persiapan verifikasi Tahap I tahun 2022 1. Monitoring dan evaluasi pada program/ kegiatan Keistimewaan urusan kebudayaan guna dapat mengukur tingkat kepatuhan kebijakan apakah sudah sesuai dengan perencanaan. 2. Monitoring dan evaluasi mencakup proses pengumpulan data, realisasi program/ kegiatan, pelaporan kegiatan s.d penilaian dan evaluasi capaian kinerja 3. Monitoring dan evaluasi bertujuan untuk mempertanggungjawabkan kepada masyarakat atas penggunaan anggaran yang dikelola sesuai dengan prinsip akuntabilitas 4. Monitoring dan evaluasi menginventarisir faktor-faktor pendukung dan penghambat sebagai bahan evaluasi agar program/kegiatan			

No	Kegiatan Lintas Sektor	KONTRIBUSI PARA PIHAK		OUTPUT DAN KELOMPOK SASARAN		MANFAAT BAGI OPD DAN MANFAAT BAGI KELOMPOK SASARAN
			selanjutnya dapat berdaya guna dan berhasil guna Kerjasama lintas sektor dalam memberikan informasi terkait keistimewaan/ penyebarluasan informasi keistimewaan Kerjasama lintas sektor dalam rangka menggali informasi atau inventarisasi permasalahan melalui audiensi dengan komunitas masyarakat Tema konten penyebarluasan informasi keistimewaan: 1. disesuaikan dengan isu yang update 2. Menjawab pertanyaan dari masyarakat yang ditujukan kepada Paniradya 3. Kecepatan merespon pertanyaan dari masyarakat melalui 5 media Rekomendasi kepada gubernur DIY Kerjasama lintas sektor dengan OPD di Pemda DIY (Bappeda DIY, Dinas Lingkungan Hidup DIY). - Monitoring terhadap penyusunan dan perumusan bahan kajian rekomendasi. TRIWULAN II 1. Rapat koordinasi dengan stakeholder terkait baik yang ada di Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah DIY, maupun Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Roadmap Kegiatan Keistimewaan Urusan Kelembagaan 2022-2027 2. Rapat koordinasi dengan stakeholder terkait baik yang ada di Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah DIY, Pemerintah Kabupaten/Kota maupun Perangkat Kalurahan dalam penyusunan program dan kegiatan keistimewaan. 3. Monitoring dan Evaluasi terhadap pelaksanaan Program dan Kegiatan Dana Keistimewaan yang diampu OPD DIY, OPD Kab/Kota dan Kalurahan ke Kabupaten/Kota maupun ke Kalurahan yang dilakukan setiap minggunya serta dilengkapi dengan optimalisasi penggunaan aplikasi KENES dalam pemantauan dan evaluasi tiap bulannya 4. Setiap bulan melaksanakan evaluasi konten dan evaluasi pelaksanaan kegiatan (penyiaran konten di Youtube, instagram, twitter, dan tiktok) 5. Pemantauan terkait tindak lanjut FGD kemiskinan dilaksanakan langsung oleh Parampara Praja 6. Monitoring dan Evaluasi terhadap pelaksanaan Program dan Kegiatan Dana Keistimewaan urusan kebudayaan yang diampu OPD DIY, OPD Kab/Kota.			

No	Kegiatan Lintas Sektor	KONTRIBUSI PARA PIHAK		OUTPUT DAN KELOMPOK SASARAN		MANFAAT BAGI OPD DAN MANFAAT BAGI KELOMPOK SASARAN
			TRIWULAN III FGD Pra Pembahasan Usulan Program/Kegiatan Keistimewaan Urusan Tata Ruang Tahun 20221. - Rapat koordinasi dan monev dengan stakeholder terkait baik yang ada di Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah DIY, maupun Pemerintah Kabupaten/Kota. Penyusunan Roadmap Kegiatan Keistimewaan Urusan Kelembagaan 2022-2027 - Manajemen Pelaksanaan disusun sebagai tools monitoring evaluasi roadmap kegiatan keistimewaan BKK ke Kalurahan Urusan Pertanahan : 1. Rapat koordinasi dengan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten/Kota yang menerima BKK Kalurahan. 2. Rapat koordinasi dengan Kalurahan penerima BKK Kalurahan. 3. Tinjau lapangan ke lokasi Kalurahan penerima BKK Kalurahan. 4. Menjalin komunikasi dengan intens dengan aparat Kalurahan penerima BKK Kalurahan. 5. Identifikasi permasalahan di masing-masing Kalurahan penerima BKK Kalurahan. 6. Melaksanakan kunjungan pada panen perdana untuk melihat secara langsung hasil dan manfaat yang diterima oleh petani penggarap program BKK Kalurahan. 7. Menyusun perencanaan berkelanjutan untuk BKK Kalurahan periode selanjutnya. Pencermatan Usulan Perubahan Tahap II TA 2022 Urusan Kebudayaan - Desk usulan perubahan ditindaklanjuti dengan pengumpulan RKA,KAK usulan perubahan II kepada semua OPD pengampu dais. Talkshow TV LOKal dengan tema " Desa Mandiri Pangan sebagai Perwujudan Ketahanan Pangan - Talkshow ditindaklanjuti dengan kunjungan ke OPD/pihak terkait . FGD Pengembangan, Pelindungan, dan Pemeliharaan Bahasa Daerah Sinkronisasi Program Kerja Tahun 2023-2017 - FGD ditindaklanjuti dengan mengevaluasi kegiatan keistimewaan berkaitan dengan Pengembangan, Pelindungan, dan Pemeliharaan Bahasa Daerah secara internal.			

No	Kegiatan Lintas Sektor	KONTRIBUSI PARA PIHAK		OUTPUT DAN KELOMPOK SASARAN		MANFAAT BAGI OPD DAN MANFAAT
			BKK ke Kalurahan Urusan Kebudayaan -Tinjauan movev BKK Kalurahan di lapangan ditindaklanjuti dengan mengevaluasi pelaksanaan program kegiatan BKK dais dilevel Kalurahan. Peringatan Satu Dasawarsa Keistimewaan DIY 1. Koordinasi yang intens dengan OPD yang ikut serta dalam mendukung peringatan satu dasawarsa keistimewaan DIY 2. Peninjauan langsung ke Kabupaten-Kabupaten dalam pelaksanaan rangkaian peringatan satu dasawarsa 3. Technical meeting dengan OPD dan Event Organizer pelaksanaan rangkaian kegiatan Lanjutan FGD Kemiskinan dan Kunjungan ke BPS dan Bank Indonesia Perwakilan DIY - FGD ditindaklanjuti dengan kunjungan ke OPD/pihak terkait untuk mendapatkan data otentik terutama masalah kemiskinan, selanjutnya diadakan rapat pleno Parampara Praja TRIWULAN IV 1. Verifikasi Laporan BKK Dana Keistimewaan Tahun 2021-2022 2. Rapat koordinasi dengan Kalurahan penerima BKK Kalurahan. 3. Tinjau lapangan ke lokasi Kalurahan penerima BKK Kalurahan. 4. Menjalin komunikasi dengan intens dengan aparat Kalurahan penerima BKK Kalurahan. 5. Identifikasi permasalahan di masing-masing Kalurahan penerima BKK Kalurahan. 6. Melaksanakan kunjungan pada panen perdana untuk melihat secara langsung hasil dan manfaat yang diterima oleh petani penggarap program BKK Kalurahan. 7. Menyusun perencanaan berkelanjutan untuk BKK Kalurahan periode selanjutnya. 8. Talkshow ditindaklanjuti dengan kunjungan ke OPD/ pihak terkait 9. FGD arahan perencanaan 2024 ditindaklanjuti dengan desk usulan program kegiatan Keistimewaan untuk mengumpulkan RKA, KAK usulan program kegiatan Keistimewaan urusan kebudayaan kepada semua OPD pengampu 10. Pemantauan terkait tindak lanjut FGD dilaksanakan langsung oleh Parampara Praja dengan melakukan kunjungan ke lapangan			

BAB 4

Penutup

Bab 4 Berisi :

1. *Kesimpulan*
2. *Langkah Perbaikan Kinerja*

Hasil laporan kinerja Paniradya Kaistimewan DIY tahun 2022 dapat disimpulkan sebagai berikut:

Hambatan permasalahan kinerja diperoleh dari pelaksanaan agenda Paniradya Kaistimewan DIY adalah sebagai berikut:

1. Perbedaan tingkat pemahaman para pemangku program dan kegiatan terhadap kaidah-kaidah pembangunan urusan keistimewaan berdampak pada belum optimalnya sinergitas pembangunan urusan keistimewaan antara pemerintah pusat, daerah, dan kabupaten-kota.
2. Panjangnya rentang kendali para pemangku keistimewaan sebagai akibat semakin banyaknya jumlah pemangku keistimewaan.
3. Kebijakan-kebijakan pemerintah pusat yang berbenturan dengan regulasi keistimewaan, sehingga tidak seluruhnya dapat mengakomodir kebutuhan dalam pengelolaan keistimewaan.
4. Sulitnya mencari benang merah yang langsung berdampak pada pengentasan kemiskinan dan penurunan angka pengangguran.
5. Era ‘new normal’ sebagai dampak dari Covid-19 yang penuh dengan ketidakpastian dan pembatasan menghambat pelaksanaan program dan kegiatan keistimewaan.
6. Minimnya pemahaman terkait konsekuensi dan penjabaran keistimewaan baik di lingkungan pemerintah daerah maupun di tingkat kabupaten/kota, berdampak pada ketidaksesuaian produk-produk program yang ada dengan amanat keistimewaan yang diharapkan.

Adapun langkah-langkah perbaikan ke depan sebagai berikut:

1. Menyusun kebijakan umum urusan keistimewaan;

2. Meningkatkan penilaian pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan program/kegiatan/sub kegiatan urusan keistimewaan. Kebijakan ini dilaksanakan melalui kegiatan Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan dengan indikator Terlaksananya Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan dan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan se DIY.
3. Meningkatkan pelayanan *Parampara Praja*. Kebijakan ini dilaksanakan melalui kegiatan Peningkatan Pelayanan *Parampara Praja* dengan indikator kegiatan Terlaksananya Penyusunan Rekomendasi Urusan Keistimewaan
4. Meningkatkan hubungan dengan semua pemangku kepentingan urusan keistimewaan. Kebijakan ini dilaksanakan melalui kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Keistimewaan dengan indikator kegiatan Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan Pelaksana Keistimewaan.

BAB 5 LAMPIRAN

Lampiran 1. Perencanaan Strategis (matriks Renstra lima tahun)

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Terwujudnya reformasi tata kelola pemerintahan yang baik (<i>good governance</i>)	- Terfasilitasinya kinerja parampara praja	- Meningkatnya kualitas pelayanan sekretariat kepada Parampara Praja	70	72	74	76	78
		- Meningkatnya kualitas implementasi urusan keistimewaan	- Rerata persentase capaian kinerja fisik dan keuangan program – program urusan keistimewaan	97,8	97,9	98	98,1	98,2
		- Terwujudnya kelembagaan perangkat daerah yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah	- Persentase kelembagaan yang efektif dan efisien	79	79,7	80,5	81,5	83



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PANIRADYA KAISTIMEWAN

ꦥꦤꦶꦫꦢꦪꦏꦭꦶꦱꦠꦶꦩꦺꦤ꧀

Kepatihan Danurejan Yogyakarta Telepon (0274) 562811 Faksimile (0274) 588613
Website: paniradyakaistimewan.jogjaprovo.go.id Email: paniradya.kaistimewan@jogjaprovo.go.id Kode Pos 5521

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022

Dalam rangka tindak lanjut penetapan Dokumen pelaksanaan perubahan Anggaran Tahun 2022 guna mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : ARIS EKO NUGROHO SP., M.Si
Jabatan : Paniradya Pati Paniradya Kaistimewan DIY
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : HAMENGKU BUWONO X
Jabatan : Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA pada tahun 2022 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Yogyakarta, 31 Oktober 2022

PIHAK KEDUA
GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,



HAMENGKU BUWONO X

PIHAK PERTAMA
PANIRADYA PATI
PANIRADYA KAISTIMEWAN DIY,


ARIS EKO NUGROHO SP., M.Si
NIP. 1972110111997031005

LAMPIRAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022

Perangkat Daerah : Paniradya Kaistimewan
Jabatan : Paniradya Pati Paniradya Kaistimewan DIY

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja (Program)	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Terasilitasinya Kinerja Parampara Praja	Meningkatnya kualitas pelayanan sekretariat kepada Parampara Praja	%	78	Triwulan I	78
					Triwulan II	78
					Triwulan III	78
					Triwulan IV	78*)
2	Meningkatkan Kualitas Implementasi Urusan Keistimewaan	Rerata presentase capaian kinerja fisik dan keuangan program-program urusan keistimewaan	%	98,2	Triwulan I	98,2
					Triwulan II	98,2
					Triwulan III	98,2
					Triwulan IV	98,2*)
3	Terwujudnya Kelembagaan Perangkat Daerah yang Sesuai dengan Kebutuhan dan Kemampuan Daerah	Persentase kelembagaan yang efektif dan efisien	%	83	Triwulan I	83
					Triwulan II	83
					Triwulan III	83
					Triwulan IV	83*)

Keterangan:

- Untuk mencapai Sasaran Strategis sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:

No	Program RPJMD	Penyandingan Program Permendagri 90 Tahun 2019 dan Pemutakhirannya	Anggaran
1.	Program Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Ketatausahaan (Dana Keistimewaan)	Rp 20.464.031.474
2.	Program Peningkatan Pelayanan Parampara Praja		
3.	Program Sarana dan Prasarana Keistimewaan Urusan Kelembagaan		
4.	Program Perencanaan dan Pengendalian Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Tata Cara		
5.	Program Perencanaan dan Pengendalian Keistimewaan Urusan Kebudayaan		
6.	Program Perencanaan dan Pengendalian Keistimewaan Urusan Pertanahan dan Tata Ruang		
7.	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Keistimewaan		
8.	Program Administrasi Perkantoran	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (APBD)	Rp 6.956.530.806
9.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		
10.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Pelaporan Keuangan		
	Jumlah Anggaran		Rp 27.420.562.280

2. *) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat *outcome*.

Yogyakarta, 31 Oktober 2022

PIHAK KEDUA
GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

HAMENGKU BUWONO X

PIHAK PERTAMA
PANIRADYA PATI
PANIRADYA KAISTIMEWAN DIY,

ARIS EKO NUGROHO SP., M.Si
NIP. 1972110111997031005

R



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

INSPEKTORAT

အောက်ကျသော အရာများမှာ

Kompleks Youth Centre, Jalan Kebon Agung, Tlogoadi, Mlati, Kabupaten Sleman

Telp.: (0274) 562009 Fax.: (0274) 512567 e-mail: inspektorat@jogjaprovo.go.id

website: <http://inspektorat.jogjaprovo.go.id/> Kode Pos 55286

Yogyakarta, 21 - 03 - 2022.

Kepada

Yth. Gubernur

Daerah Istimewa Yogyakarta

di_

Yogyakarta

Nomor : 700/01191

Lampiran : -

Sifat : Rahasia

Hal : Laporan Hasil Evaluasi atas

Implementasi Sistem AKIP

Paniradya Kaistimewan DIY

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem AKIP, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kami telah melakukan evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja dengan tujuan:
 - a. Memperoleh informasi tentang Implementasi Sistem AKIP OPD;
 - b. Menilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah OPD;
 - c. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas instansi.
2. Dalam melakukan Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) untuk Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lingkungan Pemerintah Daerah DIY, Tim Evaluasi (Evaluators) Inspektorat DIY melakukan penilaian terhadap aspek-aspek sebagai berikut:
 - a. Aspek Perencanaan Kinerja meliputi:
 - 1) Perencanaan Strategis, meliputi Sub Komponen Pemenuhan Renstra, Kualitas Renstra dan Implementasi Renstra;
 - 2) Perencanaan Kinerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja, meliputi Sub Komponen Pemenuhan Perencanaan Kinerja Tahunan dan

Perjanjian ..✍️

Perjanjian Kinerja, Kualitas Perencanaan Kinerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja, serta Implementasi Perencanaan Kinerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja Tahunan.

- b. Aspek Pengukuran Kinerja meliputi:
 - 1) Pemenuhan Pengukuran;
 - 2) Kualitas Pengukuran;
 - 3) Implementasi Pengukuran.
- c. Aspek Pelaporan Kinerja meliputi:
 - 1) Pemenuhan Pelaporan;
 - 2) Penyajian Informasi Kinerja;
 - 3) Pemanfaatan Informasi Kinerja.
- d. Evaluasi Internal meliputi:
 - 1) Pemenuhan Evaluasi;
 - 2) Kualitas Evaluasi;
 - 3) Pemanfaatan Evaluasi.
- e. Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi meliputi:
 - 1) Kinerja Yang di Laporkan (*Output*);
 - 2) Kinerja Yang di Laporkan (*Outcome*)
 - 3) Kinerja Yang di Laporkan (IKU);
 - 4) Kinerja dari Penilaian *Stakeholder*.
3. Hasil evaluasi yang dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 sampai dengan 100, Paniradya Kaistimewan DIY memperoleh nilai sebesar 84,64 kategori A dengan interpretasi Memuaskan (memimpin perubahan, berkinerja tinggi dan sangat akuntabel).
4. Nilai sebagaimana tersebut di atas merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi di Paniradya Kaistimewan DIY dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Perencanaan Kinerja memperoleh nilai 27,13 atau 90,43% dari bobot sebesar 30%;
 - b. Pengukuran Kinerja memperoleh nilai 22,26 atau 89,03% dari bobot sebesar 25%;
 - c. Pelaporan Kinerja memperoleh nilai 13,17 atau 87,81% dari bobot sebesar 15%;
 - d. Evaluasi Internal memperoleh nilai 7,50 atau 75,00% dari bobot sebesar 10%;
 - e. Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi memperoleh nilai 14,58 atau 72,92% dari bobot sebesar 20%.
5. Terhadap rekomendasi yang diberikan oleh Inspektorat DIY pada Evaluasi atas Implementasi SAKIP Tahun 2020 yang lalu, telah dilakukan tindak lanjut yaitu Paniradya Pati DIY beserta jajarannya telah melakukan upaya

perbaikan manajemen kinerja pada Komponen Perencanaan Kinerja dan Capaian Sasaran/Kinerja Organisasi.

6. Sehubungan dengan hasil Evaluasi atas Implementasi SAKIP Tahun 2021 seperti tersebut pada angka 4, kami merekomendasikan kepada Paniradya Pati DIY beserta seluruh jajarannya agar secara berkelanjutan melakukan upaya perbaikan manajemen kinerja dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan akuntabilitas kinerja OPD dengan penekanan perbaikan pada Komponen Evaluasi Internal.

Demikian Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi SAKIP pada Paniradya Kaistimewan DIY Tahun 2021, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Tembusan:
Paniradya Pati DIY



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PANIRADYA KAISTIMEWAN

paniradya kaistimewan

Kepatihan Danurejan Yogyakarta Telepon (0274) 562811 Faksimile (0274) 588613

Website: <http://paniradyakaistimewan.jogjaprov.go.id>

Email: paniradya.kaistimewan@jogjaprov.go.id

Kode Pos 55213

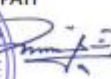
TANGGAPAN TINDAKLANJUT EVALUASI LKjip TAHUN SEBELUMNYA

PANIRADYA KAISTIMEWAN

No. 700/12050

REKOMENDASI LHE SAKIP (Surat Inspektur DIY Nomor 700/01191 tanggal 21 Maret 2022)	TINDAK LANJUT
melakukan upaya perbaikan manajemen kinerja dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan akuntabilitas kinerja OPD dengan penekanan perbaikan pada Komponen Evaluasi Internal	1. Mengintensifkan moneyv berkala capaian kinerja program/ kegiatan) realisasi fisik maupun keuangan) berdasarkan prinsip efisiensi dan efektifitas. 2. Peningkatan kualitas perencanaan, pengukuran, evaluasi internal dan data capaian kinerja.

Yogyakarta, 19 Agustus 2022
PANIRADYA PATI



PANIRADYA KAISTIMEWAN

ARIS EKO NUGROHO, S.P.,M.Si
NIP. 19721101.199703.1.005



**PEMERINTAH DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**